



MENGUAK KETERTINGGALAN MERETAS JALAN BARU



Katalog Dalam Terbitan

Menguak ketertinggalan meretas jalan baru/
penyusun, Hermen Malik ... [et al.] .—
Jakarta : Kemitraan, 2008.
... hlm . ; ... cm .

Diterbitkan atas kerja sama dengan
Kementrian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal.
ISBN 978-979-26-9618-9

1. Pembangunan ekonomi – Indonesia
- I. Hermen Malik.

338.959 8



MENTERI NEGARA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat Rahmat dan HidayahNya Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dapat menyusun buku “*Mengungkap Ketertinggalan Meretas Jalan Baru*”. Buku ini menggambarkan kondisi daerah tertinggal, pola pembangunan, dan contoh model rujukan (*best practices*) untuk keperluan diseminasi di daerah tertinggal lainnya.

Bunga rampai pemikiran ini merupakan karya yang cukup penting bagi pembangunan Indonesia umumnya dan daerah tertinggal khususnya, yang di dalamnya memuat pengalaman nyata keberhasilan pembangunan wilayah dalam bidang integrasi tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur perdesaan. Daerah tertinggal dapat mereplikasi keberhasilan tersebut sesuai kondisi wilayahnya.

Dengan terbitnya buku ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan terobosan bagi Pembangunan daerah tertinggal. Pembangunan di daerah tertinggal akan berhasil apabila strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerahnya yang terdiri dari wilayah pedalaman, pesisir, kepulauan, dan perbatasan, sebagai pilar strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Akhirnya, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan buku ini. Diharapkan buku ini dapat bermanfaat dalam mengakselerasi pembangunan daerah tertinggal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita.

Jakarta, Desember 2007

**MENTERI NEGARA
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**

IR MUHAMAD LUKMAN EDY MSI

KATA SAMBUTAN KEMITRAAN BAGI PEMBAHARUAN TATA PEMERINTAHAN DI INDONESIA



Dukungan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia (Kemitraan) kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) telah berjalan dalam rentang waktu yang cukup lama. Berbagai program KNPDT telah kami dukung bahkan sejak masih bernama Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan daerah tertinggal bukan semata-mata problematika yang harus dihadapi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal saja melainkan juga problema yang harus dihadapi dan ditangani oleh berbagai lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan mulai dari tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Partisipasi dari berbagai lembaga non pemerintahan sangat diharapkan dan menjadi salah satu faktor penting bagi tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai daerah tertinggal tersebut.

Saat ini, 45% dari sekitar 70.000 desa di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengentaskan desa-desa tersebut melalui berbagai peningkatan dibidang: 1) infrastruktur daerah yang kurang memadai 2) pertumbuhan ekonomi yang kurang dari 5 persen per tahun 3) tingkat pendidikan masyarakat yang dibawah standar 4) aksesibilitas warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan 5) kemampuan fiskal atau keuangan daerah yang rendah.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mencoba mengatasi permasalahan ini, keluhan tentang kesulitan pendanaan untuk berbagai program pembangunan guna mengentaskan desa-desa tertinggal tersebut dari ketertinggalannya bukan hanya kadang tetapi bahkan sangat sering sekali terdengar.

Permasalahannya memang bukan hanya karena minimnya anggaran tetapi lebih karena kita acapkali lalai menjadikan permasalahan pembangunan daerah tertinggal ini menjadi salah satu prioritas utama kita dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan. Pembangunan untuk rakyat di berbagai desa tersebut masih sering kita nomor sekiankan dari begitu banyak persoalan pembangunan yang ada. Perubahan paradigma inilah yang kami harapkan dari terwujud dari buku ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Tim Penulis serta berbagai pihak yang memberikan kontribusi baik dalam penulisan, percetakan maupun pendistribusian buku ini.

Kami mengharapkan agar buku ini bukan hanya dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang berbagai persoalan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia namun juga mampu membuat kita semua merasa peduli terhadap permasalahan pembangunan daerah tertinggal ini sebagai salah saru prioritas utama kita dalam membangun republik tercinta ini.

**Mohammad Sobary
Direktur Eksekutif**



DAFTAR ISI

Kata Sambutan Menteri Pendayagunaan Daerah Tertinggal	i
Kata Sambutan Direktur Executive Kemitraan	ii
Daftar Isi	iii
Rangkuman Eksekutif/Executive Summary	iv
1. Pendahuluan	1
2. Pembangunan Berbasis Masyarakat : Peluang, Tantangan, dan Pendekatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	5
3. Tata Pemerintahan Yang Baik : Keniscayaan Utama Bagi Daerah Tertinggal.	25
4. Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Kekuatan Sendiri	43
5. Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi	65
6. Penutup	73
Lampiran :	
1. Contoh Pembangunan Berbasis Masyarakat;	
2. Contoh Tata Pemerintahan Yang Baik;	
3. Contoh Pengembangan Ekonomi Lokal;	
4. Contoh Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi	
5. Daftar Alamat Lembaga-Lembaga Donor Internasional dan Nasional.	



RANGKUMAN EKSEKUTIF PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004 - 2009 dan Strategi Nasional (Stranas) PDT, menetapkan 199 kabupaten sebagai daerah tertinggal (termasuk 26 kabupaten diantaranya di perbatasan), yang lokasinya tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebanyak 123 kabupaten (62%), Sumatera 58 Kabupaten (29%), serta Jawa dan Bali 18 Kabupaten (9%).

Daerah tertinggal adalah kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya kurang berkembang, karena alasan : 1) rendahnya potensi dan pengelolaan sumber daya alam; 2) terbatasnya akses pertumbuhan; 3) rendahnya sarana prasarana sosial-ekonomi; 4) penduduknya terpencar dan terisolir.

Dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT), kondisi dan karakteristik daerah tertinggal dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu, wilayah pedalaman, pesisir, kepulauan, dan perbatasan. Tiga hal yang menjadi pilar dalam pembangunan daerah tertinggal, adalah, (1) pengembangan ekonomi lokal, (2) pemberdayaan masyarakat, dan (3) pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Dengan memperkuat ketiga pilar tersebut, maka daerah tertinggal akan menjadi

EXECUTIVE SUMMARY DEVELOPMENT OF UNDERDEVELOPED AREAS

The National Development Mid Term Plan 2004 – 2009 and Underdeveloped Area Development National Strategy has stated that 199 regencies as underdeveloped areas (including 26 regencies in border areas), 123 regencies located in the Eastern Indonesia region (62%), 58 regencies in Sumatera (29%) and 18 regencies in Java and Bali (9%).

Underdeveloped area is a regency with its community and area being less developed than other surrounding regencies, i.e., due to 1) low potency and improper management of natural resources, 2) limited access to economic growth, 3) inadequate social-economic facilities and infrastructure, and 4) widely dispersed, and isolated population.

In the National Plan Action of the State Ministry for Development of Disadvantage Area (DDA), Republic of Indonesia, condition and characteristics of underdeveloped areas have been categorized into four groups namely locked land area, coastline area, island area, and border area. There are three pillars used for development of underdeveloped area i.e., (1) local economic development, (2) community empowerment and (3) integrated infrastructure development. By strengthening the three pillars, especially the underdeveloped areas



lebih mandiri dan mampu keluar dari ketertinggalannya.

Program pembangunan daerah tertinggal, difokuskan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, dan ketersediaan infrastruktur. Untuk melaksanakan program tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006 atas perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005.

Dalam proses pembangunan berbasis masyarakat, keunggulannya dalam hal mengarahkan perkembangannya pada konsep : 1) kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan; 2) teknologi tepat guna, *indigenous technology*, *indigenous knowledge*, dan *indigenous institutions*; 3) tuntutan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan; 4) pembangunan berkelanjutan; 5) lembaga swadaya masyarakat, dan 6) meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.

could be more independent and able to exit from their underdeveloped situation.

The DDA program is especially focused on such aspect as social, cultural, economic, regional finance, accessibility and availability of infrastructure. The implementation are based on Presidential Regulation No. 90 Year 2006 which is a further amendment of Presidential Regulation No. 9 Year 2005 namely : 1) formulation of policy, 2) underdeveloped area development implementation coordination, and 3) operational assistance in village infrastructure, local economic development and community empowerment.

The speciality of community-based development are especially in the development of : 1) community awareness to the importance of their participating in development process, 2) development of appropriate technology concept, indigenous technology, indigenous knowledge, and indigenous institution 3) development of global community demand on human rights, justice and law enforcement in the development process, 4) development of sustainable development concept as an alternative of the new development paradigm, 5) increasing awareness of the importance of community development in the practice of development, and 6) development of community organizations.



Potensi Unggulan Daerah Tertinggal adalah 1) sumber daya hayati; 2) pertambangan (non migas), dan 3) pariwisata dan jasa.

Permasalahan utama daerah tertinggal adalah 1) Kualitas SDM relatif rendah; 2) Kurangnya sarana dan prasarana (Infrastruktur); 3) Terbatasnya akses ekonomi, informasi dan teknologi; 4) Terdapatnya gangguan keamanan dan bencana; dan 5) Merupakan daerah perbatasan, terisolir dan KAT.

Kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat. Pembangunan pendidikan di daerah tertinggal harus dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan. Pembangunan kesehatan harus dipandang investasi jangka panjang untuk meningkatkan SDM, guna meningkatkan ekonomi lokal dalam mendorong pembangunan, menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pengungkit kemajuan suatu wilayah, sehingga harus diarahkan pada pendekatan berbasis wilayah dan keberpihakan. Ketersediaan infrastruktur selain berfungsi untuk kemajuan sosial, ekonomi juga dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Gangguan keamanan harus dikurangi dengan menurunkan ancaman ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan saling percaya dan

Potential of underdeveloped areas is in: 1) bio-natural resources, 2) mining (non oil resources), and 3) tourism and services.

Main problem of underdeveloped areas are 1) Relatively low quality of human resources, 2) Limited facilities and infrastructure, 3) Limited access to economy, information and technology, 4) Social disturbance and disaster, and 5) border, isolated and indigenous community areas.

Quality of human resources depends on level of education, level of health status and community buying power.

Development of education in underdeveloped areas must ensure equal educational opportunities, increase in quality as well as educational relevancy and efficiency.

Development of health must be seen as a long term investment to increase human resources that will increase local economy and motivate development, as well as alleviation of poverty and underdevelopment.

Development of infrastructure serves to jump-start an area that must be directed to be area-based and community-based. Availability of infrastructure besides to promote social and economic development also solidifies national unity.

Social disturbance must be handled by decreasing tension and conflict among members of the community based on national values. In the future, maintenance and improving the eco-



harmonisasi antar kelompok dan pengembangan budaya yang dilandasi nilai-nilai luhur. Di masa datang, pemeliharaan dan perbaikan ekosistem yang rusak harus menjadi perhatian utama.

Instrumen Utama pembangunan daerah tertinggal adalah 1) Bantuan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus; 2) Pembukaan Keterisolasian Daerah; 3) Pembangunan Kawasan Produksi; 4) Pengembangan Jaringan Ekonomi dan Prasarana Antar Wilayah; 5) Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah; dan 6) Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau Terpencil.

Agenda untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, diarahkan untuk meningkatkan: 1) Akses, pemerataan, kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur pemerintah; 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan dan gizi; 3) Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan 4) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, *life skills*, serta lapangan kerja.

Kebutuhan infrastruktur daerah tertinggal adalah: 1) Prasarana: jalan, energi listrik, telekomunikasi, pendidikan; dan 2) Sarana: pengairan irigasi, perumahan dan permukiman, dan sarana air bersih.

Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil adalah: 1) Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah yang kokoh; 2) Memperkuat peran masyarakat sipil; 3)

system must be the main concern.

Main Instrument of Underdeveloped Area Development is 1) Development Assistance to Underdeveloped and Special Areas, 2) Opening Isolated Areas, 3) Development of Production Centers, 4) Development of Economic and Infrastructure Network between Regions, 5) Development of Regional Economic Growth Center; and 6) Development of Border and Isolated Island Regions.

Agenda to form quality human resources is directed to increase 1) Access, equality, quality of community and government services education, 2) Increase equality and quality of health and nutrition, 3) Increase community income; and 4) Increase equality and quality of population, social welfare, women empowerment, life skills, and job employment development.

Need of underdeveloped area infrastructure consists of 1) Facilities: road, electrical energy, telecommunication, education and 2) Infrastructure: irrigation, housing and living environment, and clean water supply.

Efforts to establish a democratic and just community through 1) fortifying local government institutions, 2) Reinforcing role of civil society, 3) Reinforcing quality of regional decentralization and



Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; 4) Pengembangan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; dan 5) Melakukan pembenahan struktur, budaya dan menegakkan hukum yang memihak rakyat.

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance melalui 1) Melaksanakan Hak Azasi manusia dengan benar, 2) Masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, 3) Melaksanakan Hukum secara konsekuen dalam melindungi kepentingan masyarakat, dan 4) Mengarahkan orientasi politik menuju pembangunan.

Masyarakat luas harus terinformasi dan ikut ambil bagian dalam proses politik dan pembangunan perekonomian. Informasi perlu dikembangkan secara transparan untuk digunakan siapapun yang membutuhkannya.

Partisipasi tidak berarti memaksakan kehendak masing-masing pihak tetapi merupakan pencapaian kesepakatan bersama, semacam konsensus bersama terhadap kebijakan dan langkah serta keputusan lainnya yang akan diambil.

Syarat Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah 1) Tempat yang Memadai, 2) Sumber Daya Manusia yang Kapabel, 3) Perlengkapan Kantor (*Electronic Information Communication System*), 4) Harga Jasa Pelayanan yang Terjangkau, 5) Partisipasi Masyarakat, dan 6) Proses Transparan.

Kiat untuk meningkatkan kinerja

autonomy, 4) Development of media in communicating the interests of the community, and 5) Implementing structural changes and law enforcement for the benefit of the community.

Application of good governance principles through 1) Implementation of human rights consistently, 2) Community actively participates in decision making process, 3) Implementation of law consistent with protection of community interests, and 4) Political orientation directed towards development.

The community in general must be informed and participate in the political process and economic development. Information must be developed transparently to be used by all who require such information.

Participation means not forcing one group's interest on others but to achieve consensus on policy and steps to be undertaken as well as other decisions to be taken.

*Criteria for managing services under one roof are 1) Adequate place, 2) Capable human resources, 3) Office paraphernalia (*Electronic information and communication system*), 4) Affordable fee for services provided, 5) Community participation, and 6) Transparent process.*

Efforts to increase performance of



Pelayanan Umum melalui 1) Penentuan tingkat standar pelayanan umum, 2) Ketersediaan dan keterbukaan informasi pelayanan umum, 3) Keterlibatan masyarakat, 4) Peningkatan akses pada pilihan layanan, 5) Perlakuan pelayanan yang menyeluruh dan adil, 6) Konsisten terhadap aturan dan prosedur (dinamis), 7) Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, 8) Jaga kepuasan masyarakat/pelanggan, 9) Peningkatan inovasi, dan 10) Bekerjasama dengan para penyedia jasa lainnya.

Rencana Tindak/*action plan* untuk penerapan faktor-faktor kunci dalam terwujudnya pemerintahan yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) 'Action Plan' tentang transparansi dan kebebasan untuk mendapatkan informasi pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat, 2) 'Action Plan' tentang Keikut Sertaan dan Kerjasama Masyarakat/Swasta, 3) 'Action Plan' pengelolaan pelayanan umum yang adil dan tanpa diskriminasi, dan 4) 'Action Plan' penanganan masalah kompetisi serta masalah pencegahan monopoli oleh pihak tertentu.

Faktor Pokok Pengembangan Ekonomi Lokal adalah 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2) Menggarap Ekonomi Lokal Sesuai Karakteristik Wilayah, 3) Pemanfaatan Plasma Nufrah dan Kearifan Lokal, 4) Swadaya Energi, 5) Pengembangan Sarana Produksi Pertanian Alami, 6) Pengembangan Sarana Transportasi dan Logistik Perdesaan, 7) Pengembangan Komunikasi Desa - Kota, dan 8) Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

public services through 1) Determination of public service standards, 2) Availability and openness of public service information, 3) Community involvement, 4) Increased access to various services/ menu, 5) Comprehensive and just services, 6) Consistent with regulation and procedure (dynamic), 7) Use of resources effectively and efficiently, 8) Maintain community/consumer satisfaction, 9) Increase innovation, and 10) Cooperation with other service providers.

Action Plan to implement key factors in establishing good governance include the following: 1) Action Plan on transparency and access to receive public service information needed by the community, 2) Action Plan on Community/Private Sector Participation and Cooperation, 3) Action plan on just and non-discriminatory public service management, and 4) Action Plan on competition management and prevention of monopoly by certain parties.

Main factors for development of local economy are 1) Fulfillment of community basic needs, 2) Development of local economy based of regional characteristics, 3) Use of Local Biological Resources and Indigenous Knowledge, 4) Locally generated energy, 5) Development of Natural Agriculture Production Resources, 6) Development of Village Transportation and Logistics Facilities, 7) Development of Village-City Communication and 8)



Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah suatu lembaga yang memberikan pendanaan dengan persyaratan yang ringan kepada bidang usaha kecil, menengah dan mikro. LKM dapat berbentuk : 1) LKM formal berbentuk bank, 2) LKM formal bukan bank, dan 3) LKM informal.

Ketersediaan air adalah prasyarat mutlak. Tanpa tersedianya air, dapat dikatakan bahwa bahan pangan lainnya tidak berguna dan aktivitas kehidupan akan lumpuh total. Pada situasi iklim yang sangat fluktuatif saat ini, dimana pada musim hujan air berlimpah dan pada musim kemarau air menghilang, maka perlu dipersiapkan kantung-kantung air (terbuat dari bahan plastik) untuk cadangan air minum dan pertanian di musim kemarau.

Bahan pangan pokok yang dapat dijadikan cadangan pangan sebaiknya adalah yang tahan simpan. Untuk daerah tertentu, tanaman sagu baik untuk dijadikan stok jangka panjang.

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan program nasional. Tujuan program tersebut adalah meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI selama kegiatan belajar, mendidik siswa untuk menyukai makanan tradisional, makanan jajanan lokal yang aman dan bersih, serta upaya-upaya untuk hidup sehat. Tujuan jangka panjang dari program tersebut selain untuk menjamin perbaikan gizi juga membantu upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian

Use of appropriate technology.

Micro Finance Institution (MFI) is an institution that provides financing with low interest to small, middle and micro businesses. MFI may be in the form of 1) formal MFI bank, 2) formal MFI non-bank, and 3) informal MFI.

Water availability is an absolute prerequisite. Without water, other food stuffs are not useful and local sustenance will be totally paralyzed. In fluctuating climates nowadays, where in rainy season water is plentiful and in dry season water is scarce, water containers made of plastic for drinking water supply and agriculture are needed.

Staple food used for food supply should be storage-able. In certain areas, sago is good for long term stock supply.

School Children Supplementary Food Program is a national inter-sector program. The objective of this program to increase physical resilience of primary school children during school hours, to teach children about healthy traditional foods, snacks which are safe and clean, and healthy lifestyle behavior. Long term objective of the program is efforts to increase community income through increasing local agriculture production.



setempat.

Untuk daerah yang jauh terpencil dengan infrastruktur minim, seyogyanya tidak mengembangkan atau berorientasi pada produksi komoditas umum untuk pasar umum karena dari aspek biaya usaha, kemungkinan besar akan sulit bersaing dengan wilayah lain yang sudah mapan dan berdekatan dengan pasar.

Untuk wilayah terpencil dengan prasarana yang minim, namun memiliki kekayaan dan keragaman sumber-daya hayati, maka pengembangan pertanian sebaiknya dilakukan pada skala kecil - menengah.

Tanpa perlindungan hukum, nilai kekayaan plasma nutfah dan kearifan lokal akan diambil oleh orang lain. Perlindungan Kekayaan Plasma Nutfah Khas dapat dilakukan dengan penerapan Hak Perlindungan Indikasi Geografis. Hal ini perlu dilakukan untuk produk-produk lokal yang memiliki kekhasan yang tinggi.

Kearifan lokal merupakan kekayaan intelektual tradisional yang sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai teknologi bernilai tinggi apabila telah dikonfirmasi dengan bukti-bukti ilmiah yang mendalam.

Produksi biodiesel dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana, yaitu dari minyak jarak (atau minyak nabati lain) yang diesterifikasikan dengan bahan methanol.

Isolated areas with minimal infrastructure should not be oriented to general commodity production for general markets because of aspects of marketing cost that most probably will lose in competition with other established areas that are nearer to market of products.

For isolated areas with minimal facilities, but rich in bio-diversity then agriculture development should be done at a lower – middle scale.

Without legal protection, added value of plant and indigenous knowledge will be taken and claimed by outsiders. Protection of Specific Indigenous Plants can be done by the implementation of Geographic Indicator Protection Rights. This is necessary to protect specific local products of high quality.

Indigenous knowledge is varied and potential traditional intellectual property can be developed as high value technology if confirmed based on comprehensive scientific evidence.

Bio-diesel production can be done with simple technology namely castor oil or other plant oils esterificated with methanol.



Pengembangan sistem transportasi dan logistik pertanian perlu memperhatikan karakteristik produk pertanian yang akan ditangani.

Telecenter mempromosikan Desa pada saat ini terdapat enam buah telecenter percontohan yang berdiri dan beroperasi di Indonesia. Dengan adanya program Telecenter ini terjadi komunikasi dan transaksi antara petani di desa dengan pembeli yang membutuhkan (baik pembeli dalam negeri maupun pembeli dari manca Negara) serta para ahli pertanian di kota lain.

Bambu bahan yang serba-guna dan tepat guna yang di banyak negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea dan Cina mulai memilih bambu untuk dikembangkan menjadi berbagai produk industri. Bangunan perumahan dan jembatan berstruktur bambu cocok untuk dikembangkan di wilayah rawan gempa. Pipa saluran air, kincir air, rakit, perabotan rumah tangga, alat musik dapat dipenuhi dari bahan bambu. Arang dari bambu juga baik untuk penyaringan dan penjernihan air. Cairan asap bambu (dikenal juga sebagai *bamboo vinegar*) dapat digunakan untuk pengawetan ikan dan juga sebagai bahan mempercepat pertumbuhan tanaman (*growth promoter*). Bambu adalah tanaman serba guna dan tepat guna untuk menunjang kehidupan di desa terpencil.

Infrastruktur terintegrasi adalah salah satu komponen fisik yang penting bagi sebuah wilayah. Infrastruktur terintegrasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan denyut

Development of agriculture transportation and logistics system must consider agricultural product characteristics.

Tele-centers for village promotion, presently there are six Tele-centers piloted and operational in Indonesia. With this Tele-center program communication and transaction is facilitated between farmers in villages and buyers, both domestic and overseas, who need commodities, as well as agricultural experts in other cities.

Many developed countries are turning to bamboo as industrial product material. Housing material and structure of bridges are appropriate for earthquake areas. Water pipe, water-mill, raft, furniture, musical instruments can be made using bamboo. Coal from bamboo is useful for water filtering and cleaning. Bamboo vinegar may be used for fish preservatives and as plant growth promoter. Bamboo has many uses that improve the livelihood of isolated areas.

Integrated infrastructure is one important physical component for a region. Integrated infrastructure has a close relation to community social activities that influence community



kegiatan sosial masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebanyakan daerah tertinggal di Indonesia merupakan daerah pedesaan. Dari segi penataan tata ruang, infrastruktur terintegrasi yang ada saat ini belum terintegrasi, khususnya dengan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah tertinggal, menjadikan pengembangan infrastruktur terintegrasi makin sulit.

Pengembangan infrastruktur terintegrasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan mendukung terciptanya iklim investasi bagi sebuah wilayah. Hal tersebut memberikan dampak “dua arah” dengan meningkatnya investasi untuk menunjang kegiatan perekonomian dan juga berdampak terhadap pengembangan infrastruktur terintegrasi. Hal tersebut memberikan dampak spiral dimana pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan pengembangan infrastruktur terintegrasi bertumbuh seiring dan sejalan.

Pengembangan infrastruktur terintegrasi pedesaan harus terintegrasi dan mengarah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan iklim investasi untuk pengembangan infrastruktur terintegrasi yang lebih luas.

Pertumbuhan iklim ekonomi diarahkan kepada pembangunan ekonomi pedesaan tempat tinggal kebanyakan masyarakat daerah tertinggal.

welfare. The majority of underdeveloped areas in Indonesia are rural areas. From the aspect of land zoning, infrastructure is not yet integrated, specifically for economic development.

Development of integrated infrastructure will be able to increase economic growth and support investment climate in the area. This will have a two way impact on increasing investment to support economic activities as well as development of an integrated infrastructure. There is a spiral impact on economic growth, investment climate and integrated infrastructure development.

Development of integrated infrastructure in rural areas must be integrated and directed to increase community economy. With increase in community economy the investment climate will increase that will further develop into an extensive integrated infrastructure.

Economic growth is directed to rural economy development where the majority of the population lives in rural areas. Increase in village economy must



Peningkatan ekonomi pedesaan tersebut harus terarah dan terintegrasi dengan berbagai sektor yang terlibat. Strategi pengembangan infrastruktur terintegrasi untuk daerah tertinggal didukung oleh tiga aspek pengembangan, yaitu: 1) Peningkatan Sumberdaya Manusia, 2) Sistem yang Dijalankan, dan 3) Teknologi yang Dimiliki daerah tersebut. 📌

be directed to and integrated in various related sectors. Integrated infrastructure development strategy in underdeveloped areas is supported by three aspects of development namely a) Increase in quality of human resources, b) Implementation of an integrated system, and c) Application of appropriate technology. 📌



1

Pendahuluan

Model pembangunan yang diterapkan beberapa dekade kebelakang seringkali masih bersifat atas bawah, di mana partisipasi masyarakat boleh dikatakan terabaikan, yang berimplikasi terhadap “turunnya” derajat kesejahteraan masyarakat secara luas. Sejatinya pembangunan adalah proses dalam rangka mewujudkan keadilan sosial secara nyata untuk seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin, marginal, dan rentan. Merinci pada data tingkat kemiskinan sejak tahun 1976 hingga 2005, terlihat penurunan yang sangat signifikan dari sekitar 40% (1976) menjadi sekitar 14% (1983). Namun pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi sekitar 16%. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, diperlukan partisipasi yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Tidak hanya pada akses peningkatan kesadaran berpolitik, namun harus pula disertai peningkatan pada penguatan struktur bidang ekonomi. Kata kuncinya terletak pada tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang baik. Buku ini menawarkan pendekatan terintegrasi dan sistematis, bagaimana menjalankan suatu mekanisme yang dapat mendorong pembangunan daerah tertinggal, agar setaraf dengan daerah maju lainnya dalam skala nasional, seperti tergambar dalam diagram di bawah ini.





Pendekatan utama yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

1. Pilar Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat berpusat pada manusia sendiri (*people centered*), sebagai pelaku dan pemanfaat dari proses pembangunan. Pengertian ini berbeda dari pendekatan selama ini yang menempatkan manusia sebagai objek pembangunan. Pemberdayaan juga diarahkan kepada tumbuh dan berkembangnya kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan dan prakarsa dalam mencapai tingkat kemakmuran dan kemandirian suatu masyarakat di daerah tertinggal.

2. Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal

Potensi dominan di daerah tertinggal bertumpu pada kemampuan daerah tertinggal dalam mengintegrasikan sumber daya lokal, perencanaan, akses dan membangun kerjasama yang sinergis dengan pihak lain.

3. Infrastruktur Terintegrasi

Infrastruktur terintegrasi meliputi transportasi, perumahan dan penyehatan lingkungan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur energi dan kelistrikan, dan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi.

Tiap komponen dalam ketiga pilar tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Terintegrasinya infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan Indeks Prestasi Manusia (IPM) dan derajat kesehatan dan pelayanan yang maksimal. Sedangkan pengembangan ekonomi lokal dengan pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan tingkat pendapatan ekonomi masyarakat yang tinggi (PDRB), yang berkorelasi linier dengan peningkatan pendapatan daerah. Sedangkan integrasi ekonomi dan infrastruktur akan menghasilkan penguatan di bidang infrastruktur ekonomi, seperti peningkatan terhadap sumber-sumber perekonomian, informasi, pasar dan lainnya. Semua pendekatan tersebut di atas didasarkan kepada karakteristik daerah yang meliputi kondisi existing daerah, faktor geografis, lingkungan sosial dan budaya, dan lokalitas daerah yang berbeda-beda. Ketiga integrasi faktor-faktor di atas akan berjalan sesuai seperti yang diharapkan dengan mengedepankan faktor signifikan dalam proses ini adalah diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam buku ini diberi penjelasan pula bagaimana menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip transparansi, fokus, professional, efisien dan partisipatif, yang diharapkan dapat direplikasi di daerah tertinggal. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) ini secara faktual telah diimplementasikan



dibeberapa kabupaten/kota yang berdampak pada peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasi pemerintahan dan anggaran. Efektifnya penggunaan anggaran daerah selanjutnya dimanfaatkan untuk program-program kerakyatan yang mendorong kemandirian lokal. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) tata pemerintahan yang baik, yang telah dipraktikkan di beberapa daerah (pelayanan publik seperti sistem satu atap, dan lainnya) dapat dijadikan model rujukan (*best practices*) untuk keperluan diseminasi dan uji coba di daerah tertinggal. Kata kunci dari pendekatan ini adalah, jika pemerintah daerah tertinggal menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, maka seluruh program percepatan pembangunan di daerah tertinggal akan berjalan efektif dan sistematis.

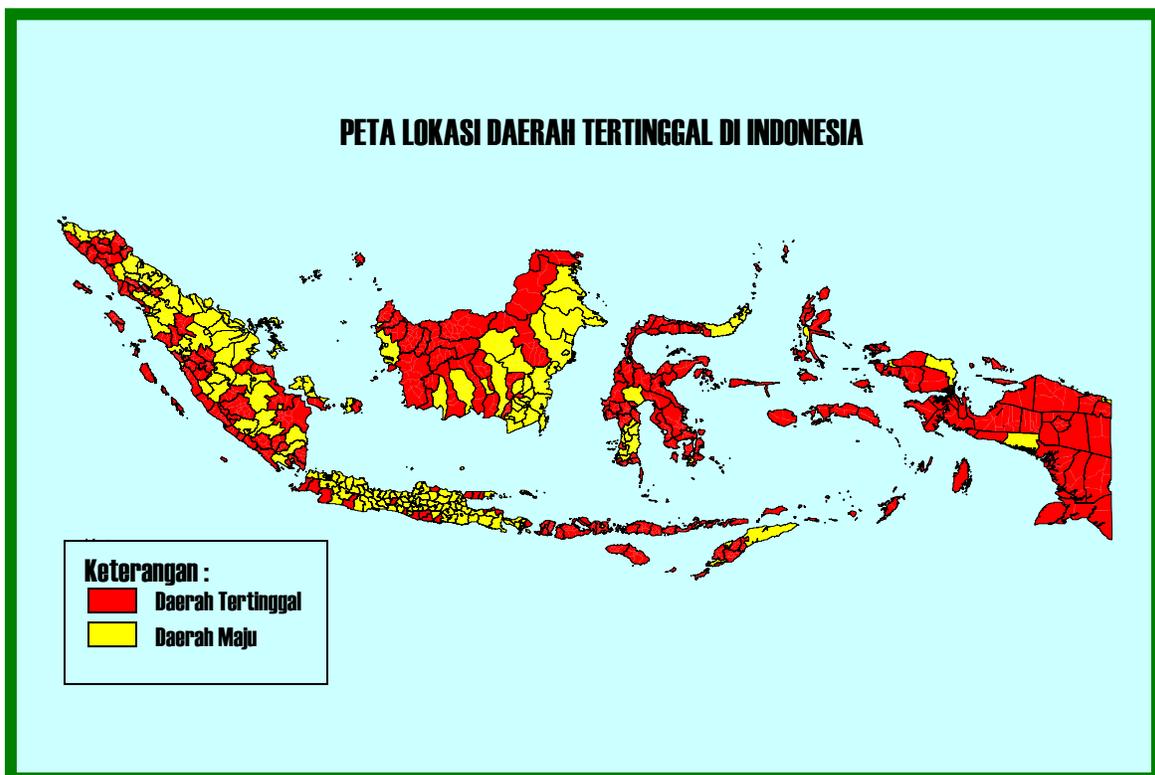
Diterbitkannya buku ini adalah sebagai bagian (*suplemen*) dari Rencana Aksi Nasional (RAN) Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009. Untuk memudahkan pemahaman dan mengimplementasikan di daerah tertinggal pada tiap penjelasan diberi penekanan yang tertera pada kotak (*box*). Contoh-contoh sukses di beberapa daerah yang telah menerapkannya dengan cukup berhasil dapat dilihat pada Lampiran. Adanya informasi tersebut di atas diharapkan para pembaca, terutama pengambil keputusan di daerah tertinggal dapat terinspirasi untuk menerapkannya. Di samping itu, pada akhir halaman diberikan juga Lampiran daftar lembaga atau yayasan yang bergerak dalam bidang terkait untuk keperluan konfirmasi lebih jauh dan kerjasama yang lebih nyata. 🙏



2

PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT : Peluang, Tantangan, dan Pendekatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun (RPJMN) 2004 – 2009 dan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PDT), telah menetapkan 199 kabupaten sebagai daerah tertinggal (26 kabupaten diantaranya berada di perbatasan), yang lokasinya tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebanyak 123 kabupaten (62%), Sumatera 58 kabupaten (29%), Jawa dan Bali 18 kabupaten (9%).





Daerah disebut tertinggal, karena:

1. Potensi sumber daya alam tidak memadai / pemanfaatannya berlebihan;
2. Terbatasnya akses pertumbuhan;
3. Rendahnya sarana prasarana ekonomi dan sosial;
4. Penduduknya terpencar dan terisolir;
5. Sering mengalami bencana alam dan konflik sosial;
6. Kebijakan pembangunan yang tidak tepat.

Apa yang dilakukan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ?

Adalah mengupayakan perubahan suatu daerah dan masyarakat dari ketertinggalan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi setaraf dengan daerah maju lainnya dalam skala nasional. Pola pembangunan daerah tertinggal berbeda dengan penanggulangan kemiskinan, karena bukan hanya meliputi aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan keamanan serta keterkaitan daerah tertinggal dengan daerah maju.

Fokus Program PDT adalah pada aspek sosial, budaya, ekonomi, keuangan daerah, aksesibilitas, serta ketersediaan infrastruktur. Selain melaksanakan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan akselerasi, Kementerian Negara PDT juga melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan di bidang bantuan infrastruktur perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat (Perpres 90 Tahun 2006).

A. Pembangunan Berbasis Masyarakat

Pembangunan menurut pengertian umum biasa ditafsirkan adanya suatu perubahan menuju keadaan lebih baik. Namun secara ilmiah, khususnya di bidang ilmu-ilmu sosial, pembangunan diartikan sebagai adanya perubahan struktur yang berlangsung secara terus menerus sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara optimal (*development is not a static concept, but it is continuously changing*). Strategi pembangunan berkembang dari masa ke masa secara dinamis, sesuai konteks peradabannya. Awalnya, pembangunan diterjemahkan semata-mata sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi semata. Namun akhirnya strategi ini



mulai ditinggalkan, karena tidak mampu menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesenjangan maupun keterbelakangan.

Paradigma pembangunan yang tepat untuk daerah tertinggal adalah pembangunan berbasis manusianya, dengan *pendekatan pemberdayaan masyarakat*. Paradigma ini memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek semata, akan tetapi sebagai pelaku atau aktor penentu tujuan yang hendak dicapai, menguasai sumber-sumber, mengarahkan proses yang menentukan hidup mereka. Karenanya, paradigma ini memberi tempat penting bagi prakarsa dan keanekaragaman lokal, serta paradigma ini menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*) sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.

Keunggulan pembangunan berbasis masyarakat adalah mengarahkan perkembangannya pada :

- 1. Kesadaran masyarakat, akan pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan;*
- 2. Konsep teknologi tepat guna, indigenous technology, indigenous knowledge, dan indigenous institutions sebagai akibat kegagalan konsep transfer teknologi antarnegara;*
- 3. Tuntutan masyarakat dunia tentang hak asasi, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses pembangunan;*
- 4. Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang merupakan suatu alternatif paradigma pembangunan baru;*
- 5. Lembaga swadaya masyarakat;*
- 6. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendekatan pengembangan masyarakat dalam praksis pembangunan.*

A. 1. Perlunya memberdayakan dan Membudayakan Masyarakat

Dalam pembangunan saat ini diperlukan perubahan paradigma kearah *people driven*, dengan orientasi pembangunan pertumbuhan ekonomi yang tercipta melalui keadilan ekonomi (*growth through equity*). Dengan paradigma *people driven*, dapat menempatkan kepentingan ekonomi masyarakat sebagai prioritas pembangunan, dalam hal ini sebagai contoh, adalah kegiatan ekonomi buruh tani, petani dan berbagai bidang usaha masyarakat yang harus dikembangkan.

Melaksanakan paradigma *people driven* dalam pembangunan berarti mampu untuk mengenali kapasitas dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini,



memang pada akhirnya bermuara pada pemimpin¹ yang memiliki kebersihan hati dan kecintaan pada masyarakat yang dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas. Kalaupun sulit untuk menemukan pribadi yang sanggup untuk mengemban misi suci tersebut, maka pada akhirnya rakyat jualah yang harus melaksanakan sendiri. Dan penyadaran akan pentingnya perubahan itu pulalah yang harus diterangkan kepada rakyat.

Strategi pembangunan *people driven* pada akhirnya bermuara pada penciptaan masyarakat yang berdaya dan berbudaya. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan dan kebudayaan yang tinggi. Namun, selain nilai fisik seperti diatas, ada pula nilai-nilai *intrinsik* dalam masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan dan kebudayaan, seperti kekeluargaan, kegotongroyongan, dan bagi bangsa Indonesia, kebhinekaan.

Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang didalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Pengalaman krisis kita tahun 1997 lalu mengajarkan kepada kita, bahwa usaha kecil dan menengah serta koperasi jauh lebih "tahan banting" dibanding perusahaan besar/pengusaha konglomerat.

Memberdayakan dan membudayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, *memberdayakan* adalah *memampukan dan memandirikan* masyarakat.

A. 2. Mendorong Masyarakat Berdaya dan Berbudaya

Upaya menciptakan masyarakat yang berdaya dan berbudaya di daerah tertinggal, haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang

¹ Mempunyai *know-how*, komitmen yang konsisten, integrasi, dorongan maju, kepercayaan diri, keuletan, serta mau belajar terhadap hal-hal yang baru. Mampu melihat dari berbagai altitude dan elevasi, dan mendingkai kembali dari prospektif yang berbeda. Memiliki keterbukaan pikiran, keterbukaan hati dan telinga, keterbukaan terhadap tekanan-tekanan, keterbukaan terhadap kesepakatan, dan keterbukaan diri terhadap orang lain yang tidak dipengaruhi keberbedaan dan disiplin yang bertentangan. Bersikap realistis yang menggabungkan sikap optimisme dan pesimisme dalam setiap pengambilan keputusan, seorang visioner sekaligus realis yang berpijak di bumi.



memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini, titik tolaknya adalah pengenalan bahwa, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Dengan demikian pembangunan berbasis rakyat sebenarnya merupakan upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat (*people*) serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam kerangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Dengan demikian jelaslah bahwa masyarakat dalam kaca mata pemberdayaan adalah pelaku utama pembangunan (merupakan bagian yang berpartisipasi secara aktif). Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah *transformasi manajemen komunitas* menuju kesejahteraan bersama. Dalam konteks daerah tertinggal, pemberdayaan merupakan sarana yang ampuh untuk segera keluar dari ketertinggalan menuju kesejahteraan.

Transformasi manajemen komunitas merupakan segala upaya perubahan dan penguatan kompetensi komunitas dalam menginisiasi, merencanakan, mengelola dan mengembangkan kompetensi mereka, baik kapasitas manusia, kelembagaan maupun jaringan kerja. Jika disepakati bahwa komunitas (*community*) adalah *subset* dari masyarakat (*society*), maka dapatlah dikatakan bahwa transformasi manajemen komunitas merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat.

Berkenaan dengan upaya transformasi tersebut, ada beberapa pendekatan yang sering dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat. Secara umum pendekatan tersebut terdiri atas empat hal yang saling mendukung.

Pertama, **fasilitasi**. Melalui proses fasilitasi diharapkan komunitas dapat merumuskan bersama visi dan misi mereka, merencanakan langkah-langkah prioritas dan alternatif, mengelola kegiatan, mengevaluasi dan menyempurnakan hingga melakukan inovasi. Meningkatnya kompetensi manajemen komunitas merupakan fokus dari proses fasilitasi.

Kedua, **mediasi**. Mediasi dilakukan untuk membuka akses komunitas ke sumberdaya pendukung dan jaringan kerja yang dibutuhkan sesuai dengan



perkembangan mereka. Termasuk di dalamnya menjembatani mereka untuk dapat berasosiasi dengan komunitas yang memiliki kepentingan serupa.

Ketiga, **redistribusi**. Redistribusi ditujukan untuk mengembalikan kekuatan yang setara dalam konteks kepemilikan alat produksi. Inilah pendekatan yang kurang digemari oleh negara-negara donor penganut mekanisme pasar bebas. Pendekatan ini cenderung bernuansa sosialis dan regulatif ketimbang demokratis. Pada negara berkembang, di mana ketimpangan sosial/ekonomi begitu nyata, sehingga pilihan terhadap pendekatan ini seringkali terkesan populis ketimbang sebuah upaya penciptaan prasyarat dasar untuk penguatan fundamen pembangunan.

Keempat, **advokasi**. Advokasi dibutuhkan dalam memperkuat peluang masyarakat untuk ikut serta secara langsung dalam menentukan arah kebijakan yang kondusif bagi perkembangan mereka.

A. 3. Alternatif Intervensi dalam Pemberdayaan

Karena pemberdayaan memiliki spektrum pengertian yang luas, bentuk-bentuk intervensinya pun beragam. Salah satu intervensi yang paling populer adalah pola intervensi yang interaktif, yang artinya baik komunitas ataupun pihak yang melakukan intervensi akan menjalani proses belajar bersama.

Secara umum pola intervensi interaktif ini dapat dibagi menjadi beberapa tahapan, yakni membangun komitmen, pengorganisasian, kerja kelompok, terminasi, dan konsultasi/mentoring.

Membangun Komitmen. Pada tahap ini fasilitator (*intervenor*) dan komunitas terlibat dalam hal-hal di seputar upaya mempertemukan gagasan. Komunitas maupun fasilitator masuk ke suasana penjajakan. Dalam program-program pembangunan partisipatif dikenal sebagai masa sosialisasi.

Pengorganisasian. Tahap pengorganisasian merupakan masa di mana komunitas dan fasilitator mulai merumuskan ide, menjajaki dan merumuskan kebutuhan, membangun visi, misi dan rencana bersama. Termasuk di dalamnya rancangan awal kelembagaan dan aturan main.

Kerja Kelompok. Pada tahap ini kelompok mulai merealisasikan rencana sesuai dengan prioritas yang ditetapkan mereka. Interaksi yang terjadi semakin nyata. Konflik semakin nyata dan kemampuan personal maupun kelompok semakin terukur dan terspesialisasi, berbagai perubahan perilaku mulai tampak. Kelompok melakukan evaluasi, mencari solusi dan melakukan perbaikan.



Terminasi. Inilah tahap akhir dari intervensi. Komunitas mulai mengambil inisiatif dominan setelah terjadi proses terminasi. Proses belajar selama tahap-tahap sebelumnya umumnya sangat berpengaruh terhadap cara kelompok mengambil inisiatif dan menjalankan manajemen komunitas.

Konsultasi/Mentoring. Pada tahap ini peran fasilitator (*intervenor*) akan mengalami perubahan dari pola-pola fasilitasi ke konsultasi/mentoring. Peran mediasi biasanya juga semakin meningkat dibanding tahap-tahap sebelumnya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat:

1. *Inpres Desa Tertinggal (IDT);*
 - a. *Bantuan kepada desa tertinggal rata-rata 20 juta/desa;*
 - b. *Penentuan prioritas dengan musyawarah (pokmas);*
 - c. *Kegiatan prioritas pada pengembangan ekonomi;*
2. *P3DT*
 - a. *Bantuan kepada desa-desa miskin terisolir;*
 - b. *Disediakan fasilitator untuk membantu menentukan prioritas kegiatan pokmas lewat musyawarah;*
 - c. *Jenis kegiatan hanya untuk infrastruktur dasar;*
3. *Program Pengembangan Kecamatan (PPK)*
 - a. *Bantuan kepada kecamatan (untuk desa-desa tertinggal);*
 - b. *Basis kegiatan dengan musyawarah lewat berbagai kelompok masyarakat;*
4. *Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP);*
5. *Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM-IP Tahun 2005.*

B. Peluang Pengembangan Keunggulan Daerah

B. 1. Sektor Keunggulan.

Umumnya mengandalkan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang faktualnya belum berpengaruh nyata terhadap nilai tambah dan daya saing. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus dalam pengembangan ekonomi daerah tertinggal, dan apakah keadaan ini dibiarkan berlangsung secara natural atau perlu terobosan dalam pengembangannya?

Potensi unggulan daerah tertinggal :

1. *Sumber daya hayati;*
2. *Pertambangan (non migas);*
3. *Pariwisata dan jasa.*



B. 2. Kelembagaan

Karakteristik yang mengakar dan representatif bagi komunitas di daerah tertinggal, sangat memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan daerah dan masyarakat. Kelembagaan masyarakat tersebut, banyak tumbuh dan berkembang sebagai motivator sikap partisipasi, peduli, percaya diri dan mandiri yang berorientasi pada moral dan nilai luhur kehidupan. Selain itu nilai-nilai kapital sosial, seperti gotong royong, musyawarah, keswadayaan dan lain-lain, dapat menciptakan keamanan dan terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

C. Problematika Daerah Tertinggal

Permasalahan yang dihadapi berkisar pada masalah kemiskinan, produktivitas dan kualitas hidup rendah, sarana dan prasarana pembangunan wilayah sangat terbatas, pendidikan dan kesehatan masyarakat rendah, kesempatan kerja sangat terbatas. Permasalahan tersebut saling berkaitan dan merupakan masalah kompleks yang harus diprioritaskan pembangunannya secara serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Umumnya pembangunan di daerah tertinggal belum banyak tersentuh program pembangunan, sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari berbagai pemangku kepentingan.

Permasalahan utama daerah tertinggal :

- 1. Kualitas sumber daya manusia relatif rendah;*
- 2. Kurangnya sarana dan prasarana (Infrastruktur);*
- 3. Terbatasnya akses ekonomi, informasi dan teknologi;*
- 4. Terdapatnya gangguan keamanan dan bencana;*
- 5. Merupakan daerah perbatasan, terisolir, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses terbatas;*
- 6. Kebijakan pembangunan yang kurang tepat.*

C. 1. Sumber Daya Manusia (SDM). Anggapan masyarakat daerah tertinggal, bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan tidak memberikan manfaat sebanding dengan sumberdaya yang dikeluarkan. Dampaknya masyarakat daerah tertinggal memiliki angka partisipasi pendidikan rendah



dan buta aksara cukup tinggi, dan pendidikan yang tersedia saat ini belum dapat dijangkau penduduk miskin di daerah tertinggal.

Tingkat kesehatan masyarakat saat ini telah menunjukkan peningkatan, tetapi disparitas status kesehatan antar: tingkat sosial ekonomi, kawasan, perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Angka kematian balita golongan miskin hampir empat kali lipat dari golongan kaya, angka kematian bayi dan ibu lebih tinggi di daerah perdesaan, dan di Kawasan Timur Indonesia, serta penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Prosentase balita berstatus gizi kurang dan buruk di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan.

- *Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat;*
- *Pembangunan pendidikan di daerah tertinggal harus dapat menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi pendidikan;*
- *Pembangunan kesehatan harus dipandang investasi jangka panjang untuk meningkatkan sumber daya manusia, guna meningkatkan ekonomi lokal dalam mendorong pembangunan, menanggulangi kemiskinan dan ketertinggalan.*

C. 2. Infrastruktur. Disparitas kesejahteraan antar kawasan diakibatkan kesenjangan infrastruktur. Aspek penting yang menentukan kemajuan suatu wilayah meliputi infrastruktur sosial dasar, ekonomi, transportasi, komunikasi dan informasi, teknologi, dan infrastruktur perdesaan seperti pertanian.

Pembangunan infrastruktur merupakan pengungkit/lokomotif kemajuan suatu wilayah, sehingga harus diarahkan pada pendekatan berbasis wilayah dan keberpihakan. Ketersediaan infrastruktur selain berfungsi untuk kemajuan sosial, ekonomi juga mempunyai akses dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

C. 3. Sumber Daya Ekonomi, Informasi dan Teknologi. Ketertinggalan daerah ditentukan oleh kurangnya akses terhadap sumber daya yang diperlukan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan. Saat ini Akses terhadap sumberdaya daerah tertinggal, seperti akses pada lahan produktif untuk pengembangan usaha, prasarana ekonomi, sosial, permodalan, informasi, teknologi, dan inovasi sangat terbatas, sehingga kebutuhan dasar manusia banyak yang belum terpenuhi.



C. 4. Keamanan dan Bencana. Keadaan aman dicerminkan oleh suasana tenteram, tidak ada rasa takut dan khawatir serta tidak terjadi konflik, dan kerusuhan. Sumber daya alam dapat menjadi modal pertumbuhan ekonomi dan penopang sistem kehidupan, untuk itu harus dikelola secara seimbang guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdampak besar bagi kehidupan manusia, di beberapa daerah sudah sangat mengkhawatirkan sehingga timbulnya bencana yang tidak pernah terjadi sebelumnya.

Gangguan keamanan harus dikurangi dengan menurunkan ancaman ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat, sehingga diperlukan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok dan pengembangan budaya yang dilandasi nilai-nilai luhur. Dimasa mendatang, pemeliharaan dan perbaikan ekosistem yang rusak harus menjadi fokus perhatian utama.

C. 5. Daerah Perbatasan: Kebijakan pembangunan wilayah selama ini cenderung berorientasi *inward looking*, seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan (lebih mengedepankan aspek keamanan di banding aspek kesejahteraan). Akibatnya wilayah perbatasan bukan merupakan wilayah pembangunan daerah maupun nasional, dan dampaknya daerah ini hampir tidak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

C. 6. Komunitas Adat Terpencil. Di beberapa daerah tertinggal terdapat komunitas adat terpencil yang perlu diperhatikan, dan komunitas seperti ini sangat jauh tertinggal dengan komunitas lainnya. Untuk mendorong percepatan PDT merupakan suatu keharusan mempelajari komunitas ini, dan memetakannya kemudian memberdayakannya untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

D. Skenario Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Sebaran daerah tertinggal secara kondisi geografis terletak pada wilayah yang tidak menguntungkan, umumnya merupakan wilayah pedalaman dan tepi hutan, pegunungan, pesisir, dan pulau terpencil yang memiliki kesulitan akses ke daerah lain, terletak di perbatasan antar negara baik batas darat ataupun laut.



Untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan suatu instrumen yang menjadi acuan dalam merencanakan, menyusun, dan merumuskan program kegiatan terkait dengan pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Adapun instrumen yang dimaksud adalah sebagai berikut :

D. 1. Instrumen Bantuan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus.

Penyelenggaraan instrumen ini merupakan dukungan nyata pemerintah dalam memfasilitasi pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dan mengembangkan daerah-daerah tertinggal dan khusus, serta meningkatkan sosial ekonomi dan pemerintah setempat dengan memperkuat kapasitas masyarakat ditingkat kabupaten serta memusatkan pada upaya memperkuat kembali proses perencanaan sebagai jalan menuju proses pembangunan yang normal dan secara operasional dapat mendorong terjadinya pendekatan yang efektif secara multi sektor.

Sasaran daerah tertinggal yaitu daerah kabupaten yang memiliki ciri-ciri: tertinggal secara ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal (celah fiskal), aksesibilitas, dan karakteristik daerah yang kurang mendukung. Sedangkan sasaran daerah khusus dan perbatasan adalah kabupaten yang sering mengalami bencana alam, bencana sosial serta daerah di perbatasan dengan negara lain.

Prinsip Pelaksanaannya adalah 1) desentralisasi, memberikan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan kepada pemerintah kabupaten; 2) partisipasi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan; 3) prioritas, pengelolaan kegiatan yang didanai berdasarkan prioritas dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat miskin, sebagai rumusan dari musyawarah; 4) Non diskriminatif, pelaku dan penerima manfaat program tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan masyarakat tertentu; 5) terbuka, informasi pengelolaan kegiatan dapat diakses masyarakat luas dan pihak terkait; 6) kearifan lokal, memperhatikan adat dan budaya sebagai kearifan tradisional dalam masyarakat; 7) terpadu, pengelolaan kegiatan dilakukan dalam kesatuan sistem dengan kegiatan pembangunan lainnya; 8) berwawasan, lingkungan mempertimbangkan dampak kondisi lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya; 9) dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 10) berkelanjutan, terjadinya pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan,



penguatan kelembagaan serta terjadi proses penguatan mekanisme pembangunan reguler.

D. 2. Instrumen Pembukaan Keterisolasian Daerah

Penyelenggaraan PDT memprioritaskan *penyediaan infrastruktur dasar* yang mendukung potensi ekonomi wilayah berbasis sektor primer, sekunder maupun tersier, yang dapat dipergunakan untuk *membuka keterisolasian daerah* dan mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur dasar tersebut. Melalui dukungan peningkatan infrastruktur dalam pembangunan, diharapkan produk-produk yang dihasilkan (dari bahan baku yang memiliki keunggulan *komparatif*) akan memiliki keunggulan *kompetitif atau berdaya saing (competition advantages)* tinggi, yang diharapkan mampu menguasai pasar domestik ataupun berkiperah dalam pasar global.

Tujuan dan sasaran penyelenggaraan instrument ini adalah membuka keterisolasian yang difokuskan pada daerah memiliki potensi ekonomi besar dan aksesibilitas yang sangat diperlukan dalam membuka keterisolasian Daerah. Dengan demikian *gema* pembangunan daerah tertinggal tidak hanya menjadi retorika politik (tidak berhenti pada tataran *political will*), namun merupakan akselerasi (*political implementation*) yang dilakukan secara terpadu dan harmonis, serta menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah tertinggal yang selama ini sering terjadi.

Prinsip pelaksanaannya adalah 1) peningkatan infrastruktur antar wilayah dengan instansi terkait dalam upaya mengakselerasi pembangunan di daerah tertinggal, serta melibatkan peranserta masyarakat dimasing-masing kawasan dengan tujuan meningkatkan perekonomian di kawasan regional dan sub regional secara terintegrasi sesuai karakteristik wilayah di daerah tertinggal; 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga ekonomi kerakyatan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, pengembangan sektor khusus, serta meningkatkan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif melalui pendekatan integrasi, komprehensif, multi-sektor, interdependensi dan bercirikan kewilayahan; 3) menerapkan kebijakan pembangunan secara terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan koordinasi dan peningkatan infrastruktur antar kawasan secara tepat dan terarah.



D. 3. Instrumen Pembangunan Kawasan Produksi

Instrumen pembangunan kawasan produksi, salah satunya melalui pengembangan lahan usaha dan investasi di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, pariwisata dan sektor lainnya sesuai potensi unggulan daerah setempat yang produktif dan prospektif dalam skala usaha ekonomi menengah dan besar menjadi sebuah kawasan produksi terpadu yang saling terintegrasi mulai dari kegiatan hulu, tengah sampai kegiatan hilir.

Pembangunan kawasan produksi bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat berbasis komoditas unggulan di daerah tertinggal, memperluas lapangan usaha dan kesempatan kerja baru di sektor pertanian, perikanan, hutan tanaman industri dan industri pengolahan, serta meningkatkan *penghasilan* masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha produksi di daerah tertinggal. Sasarannya adalah 1) terbangunnya kawasan produksi berbasis pertanian, perikanan, hutan tanaman industri dan industri pengolahan yang mampu menumbuhkan perekonomian di wilayah tertinggal; 2) dibangunnya sarana prasarana produksi di daerah tertinggal; 3) bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Prinsip pelaksanaannya adalah 1) penyertaan masyarakat sebagai pemilik dan produsen; 2) penyediaan tanah sebagai aset dan agunan; 3) penerapan manajemen usaha secara kooperatif; 4) pelibatan usaha swasta sebagai fasilitator pelayanan pengembangan bisnis; 5) ketepaduan kegiatan produksi pengolahan dan pemasaran dan pengembangan kluster industri.

D. 4. Instrumen Pengembangan Jaringan Ekonomi Antar Wilayah

Jaringan ekonomi di daerah tertinggal ternyata belum berjalan optimal, akibat masih belum tertanganinya pembangunan secara terintegrasi. Salah satu daya pemacu dalam pembangunan daerah tertinggal adalah melalui pembinaan ekonomi dan dunia usaha secara konsisten dan berkesinambungan, sedangkan daya topan yang sangat vital adalah ketersediaan jaringan ekonomi antar wilayah yang memadai. Ketersediaan jaringan ekonomi antar wilayah di daerah tertinggal masih sangat terbatas atau dapat dikatakan jauh dari memadai. Apabila jaringan ekonomi antar wilayah ini dikembangkan, jarak antara produsen dan konsumen menjadi lebih singkat, sehingga produk yang dihasilkan berdasar pada potensi lokal masing-masing daerah tertinggal akan mempunyai daya saing yang tinggi, baik lokal maupun pasar global.



Sasaran penyelenggraan instrumen ini adalah 1) terwujudnya aksesibilitas antar wilayah yang lancar untuk mendorong terjadinya peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah daerah tertinggal dengan daerah lainnya yang lebih maju, dalam suatu “sistem wilayah pengembangan ekonomi; 2) terwujudnya jaringan pemasaran antar wilayah untuk menunjang terlaksananya pasar global, dengan pendeknya jarak antara produsen dengan konsumen diharapkan produksi yang dihasilkan daerah tertinggal mempunyai daya saing tinggi; 3) memudahkan pelaku usaha sebagai upaya regulasi ekonomi, yang berdampak signifikan terhadap iklim investasi dan dunia usaha kondusif.

Prinsip pelaksanaannya dititikberatkan pada keterpaduan pembangunan ekonomi kawasan/wilayah atau pendekatan kesisteman secara totalitas, sehingga mampu mengidentifikasi komponen-komponen penting dalam pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah, yaitu 1) pembenahan kebijakan/perundangan terkait bidang perekonomian dan dunia usaha; 2) penguatan kelembagaan ekonomi dalam lingkup wilayah pembangunan sekaligus pelaksanaan otonomi daerah; 3) pemahaman ekologi kultural wilayah pembangunan; 4) penguatan kelembagaan pengembangan sumber daya manusia; 5) peningkatan partisipasi semua *stakeholders*; 6) peningkatan kerjasama antar kelembagaan baik kelembagaan pelayanan maupun kelembagaan keuangan.

D. 5. Instrumen Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu kegiatan strategis Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan daerah. Tujuannya membangun daerah tertinggal yang mampu meningkatkan kegiatan ekonomi produktif berbasis komoditas unggulan, memperluas lapangan usaha, dan membuka kesempatan kerja baru, meningkatkan taraf hidup lebih layak, serta tercapainya pemerataan pembangunan.

Prinsip pelaksanaannya mendorong tumbuhnya pusat kegiatan ekonomi baru dengan memperhatikan produk andalan, yang diselenggarakan melalui 1) pengembangan partisipasi dengan memaksimalkan koordinasi; 2) pelibatan pelaku usaha sebagai fasilitator pengembangan bisnis; 3) keterpaduan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran melalui pengembangan klaster industri.



Kegiatannya adalah 1) pembangunan kota-kota penyangga daerah tertinggal, dengan pendekatan yang berorientasi pada sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini potensi sumber daya alam dijadikan arahan untuk pembangunan kota sebagai penyangga daerah tertinggal dan pemberdayaan sumber daya manusia setempat diarahkan untuk berpartisipasi sebagai *stakeholder* dan *beneficiaries* keberhasilan pembangunan daerah tertinggal. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan daerah agar memiliki a) kegiatan ekonomi penggerak pertumbuhan daerah atau dikenal sebagai *prime mover*; b) keterkaitan dengan daerah pedalaman (*hinterland*), c) infrastruktur yang relatif lebih baik. Pembangunan *Free Trade Zone* (FTZ), guna menumbuhkan kegiatan perdagangan, perindustrian, pelayaran dan kegiatan bidang ekonomi lainnya di daerah tertinggal. Untuk hal tersebut, perlu dibangun FTZ yang didukung ketersediaan sarana prasarana seperti pelabuhan guna mengembangkan usaha di lokasi strategis pusat pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal. Tujuan kegiatan ini adalah mendorong percepatan pengembangan daerah, mendatangkan devisa serta dapat membuka lapangan kerja baru di daerah tertinggal. Sasarannya adalah tersedianya sarana dan prasarana yang mampu meningkatkan aksesibilitas produksi dari dan ke lokasi pusat pertumbuhan ekonomi, termasuk transportasinya, sarana pergudangan, sarana pengolahan komoditas, yang didukung jaringan informasi yang canggih dan administrasi yang efisien.

D. 6. Instrumen Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau Terpencil

Sebagian besar kawasan perbatasan dan pulau terpencil di Indonesia merupakan kawasan tertinggal, dari 199 kabupaten tertinggal, 26 diantaranya berada di wilayah perbatasan dengan sarana prasarana sosial dan ekonomi masih sangat terbatas. Perubahan paradigma pembangunan perbatasan yang lebih mengutamakan pendekatan keamanan (*security approach*) daripada kesejahteraan (*prosperity approach*), mengakibatkan kawasan perbatasan di beberapa wilayah menjadi daerah yang tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan.

Peluang ekonomi di kawasan perbatasan dan pulau terpencil menjadi lebih terbuka dengan berlakunya perdagangan bebas dan kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, didukung potensi sumber daya alam cukup potensial namun belum dikelola secara optimal. Di samping itu kawasan tersebut memiliki arti sangat penting ditinjau dari aspek ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan karena berhadapan langsung dengan



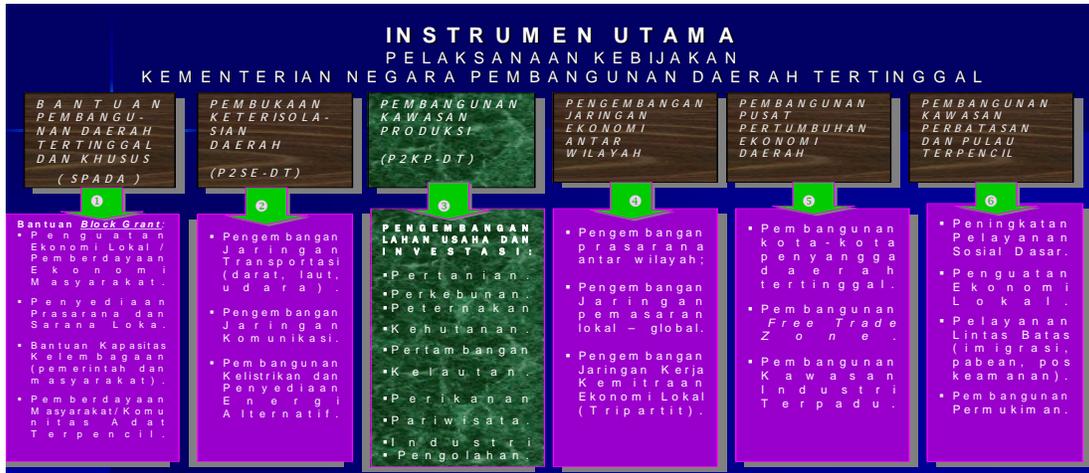
wilayah negara tetangga. Tujuan pembangunan di kawasan perbatasan dan pulau terpencil adalah 1) terwujudnya koordinasi perumusan konsep-konsep kebijakan pengembangan kawasan perbatasan sesuai karakteristik daerah-daerah; 2) merumuskan pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan serta langkah-langkah pembangunannya.

Prinsip kegiatannya adalah meningkatkan efisiensi produktivitas melalui ketersediaan fasilitas penampungan, pemasaran dan pusat informasi bersama. Guna mendorong tumbuhnya pusat ekonomi dengan memperhatikan produk andalan daerah, dibutuhkan pembangunan kawasan perbatasan dan pulau terpencil merupakan konsep pengembangan wilayah yang menciptakan suatu *pusat koleksi dan distribusi* yang memberikan keuntungan dan meningkatkan efisiensi kerja wilayah produksi dengan menawarkan produk dan layanan jasa bagi sentra-sentra produksi wilayah sekitarnya.

Instrumen utama pembangunan daerah tertinggal yaitu :

- 1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus;*
- 2. Pembukaan Keterisolasian Daerah;*
- 3. Pembangunan Kawasan Produksi;*
- 4. Pengembangan Jaringan Ekonomi dan Prasarana Antar Wilayah;*
- 5. Pembangunan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah;*
- 6. Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Pulau Terpencil.*

Konsep utamanya adalah pembangunan wilayah dengan memperhatikan prioritas potensi didasarkan pada kebutuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Sasarannya adalah 1) meningkatkan pemulihan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal dan khusus; 2) peningkatan infrastruktur melalui pertumbuhan ekonomi dalam pembukaan keterisolasian daerah; 3) terciptanya kawasan produksi yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri pengolahan; 4) terwujudnya jaringan ekonomi lokal dengan prasarana antar wilayah yang lancar dalam sistem pengembangan ekonomi; 5) meningkatnya aksesibilitas produksi dari dan ke lokasi pertumbuhan ekonomi didukung jaringan ekonomi yang canggih; 6) percepatan pembangunan di daerah tertinggal dan perbatasan dengan stabilitas ekonomi dan keamanan.



E. Langkah Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal

E. 1. Pembangunan Ekonomi

Pengembangan ekonomi daerah tertinggal perlu memperhatikan potensi dan peluang yang tersedia secara terintegrasi dan sinergis. Namun demikian, mengingat persebaran penduduk yang tidak merata dan terpencair, diperlukan *strategi khusus* untuk membangun perekonomian daerah tertinggal. Kondisi yang demikian menjadi tidak efisien dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, baik dari aspek pendidikan reguler, puskesmas reguler, pasar, dan yang lainnya.

Upaya khusus yang perlu dilakukan untuk daerah seperti itu adalah dengan a) *mempelajari daya dukung daerah tertinggal*, untuk menentukan apakah daerah tersebut itu dapat disisipkan penduduk baru atau tidak; b) *transmigrasi sisipan* dari masyarakat lokal maupun luar daerah, untuk lebih efisien memberikan pelayanan masyarakat; c) *kluster desa*, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan perlu dibentuk kluster-kluster desa pada desa-desa berdekatan (2-5 desa).



Langkah-langkah strategis pembangunan ekonomi daerah tertinggal :

- 1. Strategi makro, yakni pembangunan ekonomi terintegrasi dan keterkaitan ekonomi daerah strategis, cepat tumbuh, perbatasan, yang diwujudkan dalam pembangunan kota-kota kecil dan menengah sebagai motor penggerak/prime mover;*
- 2. Strategi mikro, yaitu optimalisasi sumberdaya lokal, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan modal usaha, pasar dan teknologi; dan peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat;*
- 3. Strategi khusus, yaitu mengupayakan pemerataan penduduk untuk mengembangkan kluster atau pusat pelayanan pendidikan, kesehatan, pasar, informasi, dan lembaga yang diperlukan.*

E. 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Kemajuan daerah sangat ditentukan kualitas sumber daya manusianya, disamping kekayaan sumber daya alam. Kualitas sumber daya manusia dibutuhkan untuk menghadapi persaingan global serta mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Tinggi-rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.

Agenda untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, diarahkan untuk meningkatkan :

- 1. Akses, pemerataan, kualitas pendidikan masyarakat dan aparatur pemerintah;*
- 2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas kesehatan dan gizi;*
- 3. Meningkatkan pendapatan masyarakat; dan*
- 4. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan kependudukan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, life skills, serta lapangan kerja.*

E. 3. Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa. Prasarana bidang ketenagalistrikan diupayakan untuk mendukung pengembangan industri, jasa dan bidang telekomunikasi. Bidang ketelekomunikasian dikembangkan guna mempercepat mendapatkan informasi, baik dalam bidang perdagangan, pasar, pendidikan, teknologi dan pelayanan jasa. Selain itu, prasarana perumahan dan air bersih merupakan



upaya memberikan akses secara adil dan terjangkau kepada masyarakat agar berperikehidupan sehat, bersih, dan produktif, serta terjangkau bagi semua golongan masyarakat sangat diperlukan.

Kebutuhan infrastruktur daerah tertinggal :

1. *Prasarana, meliputi jalan, energi listrik, telekomunikasi, pendidikan;*
2. *Sarana, meliputi irigasi, perumahan dan permukiman, dan sarana air bersih.*

E. 4. Kelembagaan

Pendukung utama keberhasilan pembangunan banyak ditentukan oleh kondisi pelaksanaan pemerintahan yang adil dan demokratis berdasarkan *law enforcement*, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memaksimalkan pengelolaan potensi sumberdaya pembangunan dan bersifat transparan. Sedangkan hukum, pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan.

Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dan adil :

1. *Pemantapan kelembagaan pemerintah daerah yang kokoh;*
2. *Memperkuat peran masyarakat sipil;*
3. *Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;*
4. *Pengembangan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat;*
5. *Melakukan pembenahan struktur, budaya dan menegakkan hukum yang memihak rakyat.*

Selain itu langkah strategis yang dapat mendorong berhasilnya pembangunan adalah *menciptakan sistem pemerintahan yang baik (good governance)*, yakni diperlukan etika birokrasi dan budaya kerja yang tinggi diikuti peningkatan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketata-pemerintahan yang baik. Langkah lainnya adalah *membangun kelembagaan masyarakat yang kuat*, yakni perlunya mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai universal kemanusiaan (*moral*), prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan. Perubahan cara pandang masyarakat ini merupakan dasar yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelakunya dapat bertindak sesuai harkat dan martabat manusia. Kemandirian lembaga



masyarakat ini dibutuhkan, dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat agar menjadi obor perjuangan bagi daerah tertinggal. 🏗️



3

Tata Pemerintahan Yang Baik : Keniscayaan utama bagi daerah tertinggal

Mengapa harus tata pemerintahan yang baik ?

Berbagai pendapat dan rumusan tentang *good governance* dalam berbagai literatur maupun penerapannya oleh lembaga-lembaga baik pemerintah, **donor**, non-pemerintah, dan lain-lain masih berbeda, namun pada umumnya mengandung prinsip yang hampir bersamaan yaitu bagaimana berbagai kegiatan baik di pemerintahan, swasta maupun masyarakat harus dikelola secara baik, transparan, profesional dan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemerintahan yang demokratis. Di samping itu *good governance* yang dilengkapi dengan penerapan etika dalam pengelolaan tersebut seperti **kejujuran** serta penerapan azas peradaban yang **luhur** akan mempercepat dukungan terhadap terwujudnya cara-cara pengelolaan kegiatan dalam bernegara dan berbangsa yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Prinsip-prinsip good governance :

- *Transparansi;*
- *Partisipasi;*
- *Akuntabilitas;*
- *Prediksi;*
- *Equiti (Kesetaraan);*
- *Responsip (ketanggapan);*
- *Visi Strategis;*
- *Efektivitas dan Efisiensi;*
- *Profesionalisme;*
- *Penegakan hukum.*



Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance¹ dijalankan ?

- Melaksanakan Hak Azasi Manusia dengan benar;
- Masyarakat ikut serta *berpartisipasi aktif* dalam pengambilan keputusan;
- Melaksanakan hukum secara konsekuen dalam melindungi kepentingan masyarakat;
- Mengarahkan orientasi politik menuju *pembangunan*.

Mulailah dari diri pribadi :

Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dimulai dari diri pribadi, berarti anda telah mempunyai andil dalam penerapan secara luas.

A. Pengertian Prinsip-Prinsip Good Governance

A.1. Transparansi

Proses kegiatan dalam rangka pelayanan publik, memerlukan mekanisme yang transparan untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan tidak jujur, termasuk juga perlunya mekanisme terhadap keluhan masyarakat yang tidak puas/*complaints*. Mekanisme kerja harus diatur berdasarkan peraturan yang tidak memihak agar kedua pihak penyelenggara sektor publik maupun yang dilayani (*masyarakat*) sama-sama mendapat kepuasan, sehingga terwujud kebijakan dan mekanisme prosedur tentang pelayanan yang baik, karena pihak-pihak terkait menerapkan prinsip transparansi dalam prosedur kerjanya.

Transparansi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam berbagai aspeknya termasuk dalam pelayanan kepada publik.

Prinsip transparansi diperlukan tidak hanya dalam proses pelayanan publik, tetapi juga dalam proses investasi, proses pengambilan keputusan, berbagai macam kontrak dan persetujuan lainnya. Informasi harus tersedia dan dapat diperoleh secukupnya. Masyarakat luas harus *terinformasi* dan ikut ambil bagian dalam *proses politik dan pembangunan perekonomian*. Informasi perlu dikembangkan secara transparan untuk digunakan siapapun yang membutuhkannya.

¹ Robert Hass "The Issue of Good Governance in International Cooperation", 1970



Transparansi dan akuntabilitas juga telah ditekankan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masyarakat luas harus terinformasi dan ikut ambil bagian dalam proses politik dan pembangunan perekonomian. Informasi perlu dikembangkan secara transparan untuk digunakan siapapun yang membutuhkannya.

A. 2 Partisipasi

Prinsip partisipasi tidak saja penting bagi kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya, tetapi semua pihak yang semestinya terlibat dalam berbagai kegiatan yang terkait perlu ikut ambil bagian, termasuk peran lelaki dan wanita. Mekanisme keterlibatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, langsung maupun melalui **berbagai media** yang dapat menyalurkan seluruh aspirasinya (contoh : Televisi lokal di Kabupaten Kebumen).

Partisipasi yang luas dan melibatkan berbagai pihak akan menjangkau sebagian besar kebutuhan masyarakat. Dengan prinsip transparansi dalam rangka partisipasi tersebut, para penguasa pemerintahan serta para penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu menjalankan tugas dan melaksanakan programnya secara transparan dan adil. Dengan penerapan prinsip partisipasi, secara tidak langsung mengarah kepada akuntabilitas yang dapat diterima semua pihak, karena mereka sudah dilibatkan sejak awal tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Partisipasi tidak berarti memaksakan kehendak masing-masing pihak, tetapi merupakan **pencapaian kesepakatan bersama**, semacam konsensus bersama terhadap kebijakan dan langkah serta keputusan lainnya yang akan diambil.

Memberi kepercayaan kepada pihak lain untuk ikut andil dalam pengelolaan pelayanan kepada publik, akan memberi peluang pula bagi pihak-pihak yang berpartisipasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam bidang yang menjadi obyek kerjasama, dalam hal ini bidang pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan pelayanan akan lebih efisien dan berkualitas. Pengurangan pengeluaran dari segi pemerintah juga berkurang, malah sebaliknya mungkin saja pemerintah dapat royalti dari hasil kerjasama tersebut. Di lain pihak harapannya korupsi dapat dikurangi bahkan dihilangkan sama sekali. Mungkin diawal proses partisipasi dan



kualifikasi, peluang untuk korupsi selalu ada misalnya waktu pemilihan mitra kerja, proses penawaran, penilaian dan lain-lain. Walaupun sifat resistensinya sudah membudaya, harapannya dengan penggalakan penerapan prinsip *good governance*, kondisi pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Partisipasi tidak berarti memaksakan kehendak masing-masing pihak tetapi merupakan pencapaian kesepakatan bersama, semacam konsensus bersama terhadap kebijakan dan langkah serta keputusan lainnya yang akan diambil.

A. 3. Akuntabilitas

Pengertian umum akuntabilitas :

Usaha instansi pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan memperlihatkan umpan balik sebagai wujud pelayanan atas penghasilan yang diberikan masyarakat.

Prinsip *good governance* menuntut pertanggungjawaban dari para penyelenggara pemerintahan dibidang pelayanan publik maupun bidang lainnya seperti bidang politik. Ukuran keberhasilan harus ditetapkan untuk bahan perbandingan apakah kinerja yang bersangkutan layak disebut baik atau memenuhi persyaratan pertanggungjawaban yang baik dari segi ekonomis maupun keuangan. Prinsip akuntabilitas apabila dilaksanakan dengan baik akan mencegah terjadinya korupsi serta menjamin bahwa kinerja organisasi telah sesuai dengan misi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja :

Perwujudan dari instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik.

A. 4. Prediksi

Penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik semakin hari semakin banyak melibatkan investor, mengingat berbagai keterbatasan dari pihak pemerintah sendiri antara lain di bidang pendanaan, di pihak lain tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Bagi investor pilihan untuk melalukan investasi tentu saja adanya jaminan dalam proses pelaksanaan yang lancar



dan stabil. Untuk itu perlu ada ukuran yang dapat dipakai untuk memprediksikan masa depan yang menjangkau masa investasi.

A. 5. Responsibilitas

Para penyelenggara pelayanan publik harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat ditunjukkan dalam bentuk kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaannya dengan menggunakan prosedur berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*. Tingkat ketanggapan terhadap pelayanan publik ini akan menjadi ukuran baik tidaknya kinerja sekaligus akuntabilitas instansi dan penyelenggara yang bersangkutan.

A. 6. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi dikatakan tercapai apabila proses maupun prosedur serta hasilnya dapat memenuhi kebutuhan yang telah ditargetkan melalui penggunaan sumberdaya yang minimal.

Dalam pelaksanaannya prinsip efektivitas dan efisiensi dapat diterapkan pada berbagai unsur penyelenggaraan. Misalnya sebuah organisasi yang besar dan tidak efektif bisa saja diubah menjadi organisasi yang ramping, efisien namun dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan. Apalagi ketersediaan sumber dana daerah yang tidak mencukupi, perombakan organisasi menjadi lebih ramping menuju kondisi yang lebih efektif dan efisien dapat dipertimbangkan. Dalam hal seperti kondisi tersebut, administrasi dan manajemen organisasi yang kecil dan birokrasi yang pendek dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan biaya yang lebih murah.

A. 7. Kesetaraan/Keadilan

Tugas dan tanggung jawab para pejabat publik baik yang dipilih secara politis maupun para pegawai negeri harus melayani masyarakat seluas-luasnya. Tugas ini meliputi pengalokasian dana, pengelolaan dan penyediaan keamanan dan ketentraman para penduduk, serta keadilan dalam pengelolaan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat. Dilain pihak kesetaraan akan menjamin pria dan wanita mempunyai kesempatan yang sama dalam memperjuangkan keberadaan mereka masing-masing.

A. 8. Visi Strategis

Pendekatan baru dalam menentukan kebijakan pembangunan kearah yang tepat perlu dikembangkan agar mampu mengalokasikan program-program



pembangunan yang tepat sasaran sesuai aspirasi masyarakat. Program-program yang tepat sasaran akan menimbulkan dan mendorong terjadinya proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah yang bersangkutan yang telah digariskan.

Berbagai usaha dewasa ini sedang digalakkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahannya yang bernuansakan *good governance*, usaha mana disejajarkan dengan usaha pemberdayaan kelebagaannya.

A. 9 Profesionalisme

Profesionalisme :
Dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan moral para penyelenggara pemerintahan sedemikian rupa sehingga mereka dapat melakukan usaha untuk memudahkan para penggunaan mendapatkan layanan umum yang cepat, tepat dan terjangkau.

Pelayanan dan penyelesaian hambatan membutuhkan kerja manajerial yang lebih professional, yang meletakkan kepuasan masyarakat atau klien sebagai acuan utama pada sektor publik. Dengan demikian para penyelenggara pemerintahan pada berbagai tingkatan dari yang paling atas sampai kepada terendah (tingkatan kecamatan atau kelurahan) kinerjanya perlu ditingkatkan kearah yang lebih profesional, agar pelayanan bisa lebih diterima masyarakat, lebih menguntungkan semua pihak, lebih dapat dipertanggungjawabkan dan pada gilirannya dapat lebih berkelanjutan/*sustainable*.

Manajemen Pelayanan dan Titik Perhatian Tata Pemerintahan yang Baik

No	Prinsip-prinsip	Titik Perhatian	
		Kebutuhan Publik	Kebutuhan Manajemen
1	Persamaan keuntungan dan logika usaha	Pelanggan merasakan kualitas pelayanan, sehingga memberikan keuntungan	Keputusan terhadap efisiensi ke dalam maupun keluar harus terintegrasi secara hati-hati



No	Prinsip-prinsip	Titik Perhatian	
		Kebutuhan Publik	Kebutuhan Manajemen
2	Kewenangan dalam pengambilan keputusan	Pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan	Beberapa keputusan penting yang strategis harus dibuat terpusat
3	Fokus pengorganisasian	Organisasi harus terstruktur dan berfungsi sehingga tujuan utama untuk menggerakkan sumber-sumber dapat mendukung garis depan operasional	Hal ini sering menuntut kesederhanaan organisasi dengan tanpa penempatan bagian-bagian yang tidak terlalu dibutuhkan
4	Kontrol pengawasan	Pemimpin dan pengawas harus memperhatikan pada dorongan semangat dan dukungan kepada pegawai	Prosedur pengawasan yang jeli namun tidak berbelit-belit/rumit
5	Sistem ganjaran (<i>rewards</i>)	Wujud kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan fokus dari sistem ganjaran	Semua bidang yang relevan seharusnya dipertimbangkan
6	Fokus pengukuran	Kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan harus menjadi fokus dari pengukuran yang ingin dicapai	Untuk memonitor produktivitas dan efisiensi internal, kriteria pengukuran ke dalam perusahaan dapat digunakan sebaik mungkin, dengan mendominasikannya untuk pencapaian kepuasan pelanggan

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, Penyusunan Standar Pelayanan Publik, 2003



A. 10. Penegakan Hukum

Kerangka hukum yang adil dan dapat dilaksanakan merupakan dasar pewujudan *good governance*. Ketiga prinsip *good governance* yaitu **akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi** akan mendorong lembaga-lembaga bersangkutan khususnya di bidang pengembangan perekonomian dan lembaga legislatif untuk membuat peraturan dan perundang-undangan yang adil dan berwibawa. Sesuai kebutuhannya, pemerintah harus dapat menjamin bahwa pelaksanaan hukum dapat diterapkan secara merata, tanpa memilih-milah bulu serta adanya praduga tidak bersalah terhadap semua warga yang dicurigai. Perangkat hukum perlu dilaksanakan secara **adil** dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya terutama hukum tentang hak asasi manusia.

Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi akan membantu aspek politis dan kelembagaan perekonomian untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang adil. Aspek peran hukum bertujuan agar produk-produk hukum tersebut dapat diberlakukan dan dilaksanakan secara merata, tanpa pamrih, kepada seluruh masyarakat.

B. Parameter Keberhasilan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik

Salah satu perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, adalah bahwa daerah **berkewajiban** untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerahnya secara adil, transparan, berkualitas dan bertanggungjawab, yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan daerah (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan pasal 67 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Salah satu **ukuran dalam melihat kinerja pemerintah daerah ini adalah dengan melihat pada kualitas pelayanan publik**. Kemampuan dalam peningkatan pelayanan publik yang baik berdasarkan prinsip *good governance* menjadi salah satu ukuran kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sebagaimana diuraikan pada Bab terdahulu, untuk membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanannya kepada publik, Departemen Dalam Negeri yang berfungsi sebagai pembina administratif daerah dalam



rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 100/757/OTDA, tanggal 8 Juli 2002, telah menggariskan prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam kaitannya dengan kewenangan wajib dalam menerapkan **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**. Pada surat edaran tersebut ada indikator Standar Pelayanan Minimal di mana diharapkan secara nasional untuk suatu jenis pelayanan tertentu dianggap minimal merupakan rata-rata kondisi kemampuan daerah.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya diacu dalam perencanaan daerah, penganggaran daerah dan pemekaran dan penggabungan lembaga perangkat daerah, pengawasan, merupakan salah satu dokumen penilaian kapasitas daerah yang antara lain dicantumkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kepala Daerah.

Kiat untuk meningkatkan kinerja pelayanan umum :

- *Penentuan tingkat standar pelayanan umum;*
- *Ketersediaan dan keterbukaan informasi pelayanan umum;*
- *Keterlibatan masyarakat;*
- *Peningkatan akses pada pilihan pilihan layanan;*
- *Perlakuan pelayanan yang menyeluruh dan adil;*
- *Konsisten terhadap aturan dan prosedur (dinamis);*
- *Penggunaan sumber daya seefektif dan seefisien;*
- *Jaga kepuasan masyarakat/pelanggan;*
- *Peningkatan inovasi;*
- *Bekerjasama dengan para penyedia jasa lainnya.*

Sembilan cara untuk dapat **meningkatkan** kinerja dibidang pelayanan umum, meliputi :

1. Penentuan tingkat standar pelayanan umum

Tingkat standar pelayanan umum ini harus jelas agar masyarakat dapat mengetahui seberapa jauh pelayanan yang dapat mereka harapkan. *Monitoring, riview* kinerja, sosialisasi hasil yang didapat, perlu selalu dilakukan.



2. Ketersediaan dan keterbukaan informasi pelayanan umum yang terus menerus

Ketersediaan dan keterbukaan informasi yang jelas, mudah didapat, lugas dan efektif dalam penggunaannya oleh masyarakat termasuk harga serta wujud pelayanannya perlu dikemas secara baik.

3. Konsultasi/masukan serta keterlibatan masyarakat

Konsultasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pengguna jasa, dan berbagai pihak terkait akan meningkatkan tingkat pelayanan.

4. Peningkatan akses kepada pilihan layanan yang bisa disediakan

Buatlah pelayanan semudah mungkin kepada siapapun juga yang memerlukannya. Gunakan teknologi terbaik serta berikan pilihan layanan kepada masyarakat.

5. Perlakuan pelayanan yang menyeluruh dan adil

Perlakukan semua pelanggan secara adil; hormati keinginan dan keberadaan mereka para pelanggan; layani dan perhatikan sebaik-baiknya kebutuhan pelanggan sesuai dengan kemampuan yang telah diinformasikan kepada mereka.

6. Tempatkan setiap kekeliruan pada aturan dan prosedur yang semestinya

Pembenahan segala sesuatu pada aturan dan tempat yang semestinya secara cepat dan efektif termasuk bila ada kekeliruan dari pelanggan, termasuk penanganan terhadap keluhan.

7. Penggunaan semua sumber daya seefektif dan seefisien mungkin demi kepuasan masyarakat/pelanggan

8. Peningkatan inovasi

Peningkatan berbagai cara untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat.

9. Bekerjasama dengan para penyedia jasa lainnya

Untuk memudahkan penyampaian pelayanan yang baik, sederhana, efektif, bekerjasamalah dengan para penyedia jasa melalui prosedur yang benar.



C. Faktor Kunci Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

C. 1. 'Action Plan' faktor kunci

Muara dari berbagai kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah adalah pelayanan umum kepada masyarakat.

Rencana tindak/*action plan* untuk penerapan faktor-faktor kunci dalam terwujudnya pemerintahan yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut :

- '*Action Plan*' tentang transparansi dan kebebasan untuk mendapatkan informasi pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
- '*Action Plan*' tentang keikutsertaan dan kerjasama masyarakat/swasta;
- '*Action Plan*' pengelolaan pelayanan umum yang adil dan tanpa diskriminasi;
- '*Action Plan*' penanganan masalah kompetisi serta masalah pencegahan monopoli oleh pihak tertentu.

C. 2. 'Action Plan' tentang transparansi

Konsep transparansi menjadi semakin penting sejalan dengan merebaknya keinginan masyarakat untuk mewujudkan *good governance*. Hak warga untuk mengetahui apa yang terjadi dalam suatu birokrasi publik sering kali masih sangat terbatas, apalagi untuk memperoleh informasi tertentu yang bersifat sensitif, karena terkait dengan kepentingan pejabatnya, misalnya anggaran proyek, warga tidak punya akses sama-sekali².

Informasi mungkin saja telah tersedia namun pejabat publik yang bersangkutan perlu menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat pengguna layanan umum di daerahnya serta bagaimana cara informasi tersebut dapat diperoleh sesuai prosedur yang mengacu pada *good governance*. Perlu adanya komunikasi dengan masyarakat dan *stakeholders* tentang akurasi dan batasan-batasan informasi yang dibutuhkan baik mengenai proses kebijakannya, alokasi anggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian akan mempermudah upaya masyarakat dalam menilai keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

Nampaknya sudah mulai marak adanya berbagai contoh mengenai penerapan unsur transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut dicantumkan beberapa contoh penerapan kebijakan pemerintah berbasis transparansi.

² Dwiyanto, Agus, (2006), "Mewujudkan *Good Governance* melalui Pelayanan Publik"



C. 3. 'Action Plan' tentang Partisipasi masyarakat/swasta

'Action Plan' ini meliputi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan :

- a. Koordinasi di mana ada pihak-pihak yang saling menunggu kesepakatan bersama yang perlu diputuskan oleh koordinator;
- b. Keterlibatan semua 'stakeholders' terkait, siapa saja yang perlu diberi informasi, siapa yang perlu dihubungi untuk konsultasi, dan sebagainya;
- c. Cara pencapaian kerjasama dengan tetap mempertimbangkan adanya faktor kompetisi diantara 'stakeholder'.

Dalam upaya pelaksanaan partisipasi masyarakat/swasta untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum perlu langkah-langkah sebagai berikut (1) mengidentifikasi peran masyarakat/swasta; (2) mengidentifikasi metode dan instrumen yang dapat dibunakan; (3) mencocokkan instrumen partisipasi yang sesuai dengan peran masyarakat/swasta dan memilih instrumen partisipasi yang akan digunakan; (4) mengimplementasikan strategi yang dipilih.

C. 4. 'Action Plan' pengelolaan yang adil

Pelayanan umum yang adil adalah sistem pelayanan yang memberlakukan semua pengguna layanan tanpa membedakan status sosial ekonomi, kesukuan, etnik, agama, kepartaian dan sebagainya. Latar belakang pengguna pelayanan tidak boleh dijadikan pertimbangan dalam memberikan layanan.

Indikator penerapan layanan yang adil misalnya (1) adanya akses yang sama untuk mendapatkan layanan; (2) layanan berdasarkan nomor urut; (3) tidak ada dispensasi pelayanan. Netralitas pemberi layanan termasuk jajaran birokrasi berikut pemilikan kode etikanya sangat diperlukan.

Ada indikasi bahwa sampai saat ini, proses tender kegiatan pembangunan di berbagai daerah masih sering dirasakan tidak adil dan tidak transparan oleh sebagian pengusaha, karena yang mendapatkan 'proyek' masih mereka yang dekat dengan penguasa³.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan bagi aparat birokrasi untuk aktif menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang masuk menjadi anggota dan atau jadi pengurus partai politik akan diberhentikan. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tidak dikaitkan dengan latar belakang politik pengguna layanan.

³ Dwiyanto, Agus (2006)



C. 5. 'Action Plan' penanganan kompetisi dan monopoli

Rencana tindak ini harus dapat mengantisipasi kecenderungan adanya monopoli yang tidak sehat. Perlu adanya pedoman pelelangan yang jelas dan tegas. Wilayah operasi pelayanan yang jelas dengan aturan yang jelas pula, kejelasan tugas dan fungsi para pesaing, peran monitoring serta institusi penengah yang akan menyelesaikan kerucuhan atau keluhan diantara stakeholder terlibat, dan lain-lain.

Dwiyanto, Agus (2006) merujuk pada salah satu upaya yang bisa dijadikan teladan untuk menegakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, praktik monopoli dan sebagainya adalah *pelembagaan pakta integritas* yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Solok, di mana semua pejabat dan pegawai berjanji dan menandatangani komitmen untuk melakukan berbagai hal (terinci dalam surat dimaksud) menuju *good governance*. Komitmen ditandatangani dihadapan pejabat/atasannya. Dengan adanya kontrak ini setidaknya membantu semua pihak untuk secara terbuka menyepakati hak dan kewajiban pengguna dan penyelenggara pelayanan, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan, serta rasionalitas yang melatar belakangnya. Di *negara maju* kesepakatan yang dituangkan dalam pakta integritas tersebut sudah biasa dilakukan. Pemerintah Kabupaten Solok sementara ini merupakan satu-satunya pemerintah daerah yang melakukan hal tersebut di Indonesia.

Pada akhirnya tentu saja perlu disimak tentang bagaimana *'action plan'* tersebut akan mempengaruhi bukan saja pada cara pelayanan umum yang semakin membaik tetapi juga pada cara dan prosedur kerja para petugas publik itu sendiri bekerja dalam mengelola pelayanan umum yang baik. Transparansi dalam berbagai hal pengelolaan, integritas para pejabat publik dalam pelayanan yang efektif dan penerapan prinsip *'good governance'* dalam memberikan pelayanan kepada publik pada gilirannya akan meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkualitas yang bukan saja menguntungkan daerah, tetapi negara dan dunia (*global*) pada umumnya. *'Best practice'* diberbagai negara telah menunjukkan hasil yang baik, dengan melakukan *'action plan'* sebagaimana diuraikan di atas.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pembahasan mengenai penerapan faktor-faktor kunci dalam terwujudnya pemerintahan yang baik, selalu bermuara pada berbagai kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah dalam pelayanan umum kepada masyarakat.



Oleh karena itu pembahasan ini juga dibatasi pada rencana tindak atau 'action plan' yang berkisar pada bagaimana pelayanan umum kepada masyarakat dilakukan sebaik-baiknya. Pembahasan ini meliputi :

- a. 'Action Plan' tentang transparansi dan kebebasan untuk mendapatkan informasi pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat (*Penyebarluasan Informasi Pelayanan melalui Worldwide Website di Kabupaten Sidoarjo <http://www.perijinan.sidoarjo.go.id>*);
- b. 'Action Plan' Tentang Partisipasi Masyarakat/Swasta (*Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sampah di Kota Mataram www.goodgovernance.or.id*);
- c. 'Action Plan' untuk pengelolaan pelayanan umum yang adil (*Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan bagi aparat birokrasi untuk aktif menjadi anggota atau pengurus partai politik*);
- d. 'Action Plan' untuk menangani kompetisi dan monopoli (*Komitmen para pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Solok untuk pelaksanaan sistem integritas dalam rangka pelayanan prima⁴*).

Pada sektor swasta kepuasan pelanggan menjadi acuan utama dalam pelayanan, sedangkan pada sektor publik pelayanan bisa tergantung pada tidak adanya pilihan lain. Dengan demikian **kualitas pelayanan** merupakan dimensi penting untuk standar ukuran kinerja.

D. Tertib proses dan prosedur

Anchor Person dan Pratibha Rajgopal⁵ menguraikan tentang kiat-kiat untuk proses dan prosedur yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan publik antara lain :

1. Penentuan tingkat pelayanan umum suatu sektor untuk masyarakat di wilayah tertentu, perlu proses dan prosedur yang benar dan tertib dengan melibatkan masyarakat yang akan dilayani tersebut;
2. Pengambilan keputusan oleh pimpinan instansi dari sektor publik yang bersangkutan tentang cara terbaik dalam melayani kebutuhan masyarakat tersebut baru ditentukan setelah diperoleh data dan informasi yang lengkap dan setelah dikaji manfaat yang paling menguntungkan dilihat dari berbagai aspek untuk berbagai pihak;

⁴ Dwiyanto, Agus, 2006, hal. 262.

⁵ Distance Learning Package on Citizen's Charter National Module", 2006



3. Untuk keperluan tersebut pejabat publik yang bertanggungjawab menyiapkan program dan rencana tindaknya serta membuat draft rencana pelayanan publik yang ditargetkan;
4. Dalam penyusunan program/rencana tindaknya hal-hal yang menyangkut pelaksanaan perlu disiapkan sebaik mungkin (termasuk dukungan aspek legalnya) seperti proses dan prosedur dalam penyiapan pelayanan umum (pelibatan pihak ke - 3; penyiapan kesepakatan tentang penerapan prinsip-prinsip pelayanan yang dapat ditindak lanjuti dengan baik. (termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan pelatihan, supervisi, para petugas operasional, sanksi, komputerisasi kegiatan, tim teknis/advisor dengan anggota dari wakil masyarakat, instansi pemerintah terkait, monitoring, masalah pengaduan dari masyarakat, dan sebagainya);
5. Penyampaian informasi kepada masyarakat pengguna pelayanan umum dengan penerapan prinsip 'good governance'.

Sebagai ilustrasi berikut disajikan contoh diagram pengembangan SOP :

Diagram Pengembangan SOP





E. Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dijelaskan bahwasanya penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai kewenangan wajib daerah dengan pengembangan yang disesuaikan dengan keperluannya. Standar Pelayanan Minimal harus mampu menjalin terwujudnya hak-hak individu serta dapat menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar dari Pemerintah daerah sesuai patokan dan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping itu Standar Pelayanan Minimal bersifat ***dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah.***

Ketentuan Standar Pelayanan Minimal perlu disusun secara jelas dan nyata, sederhana mudah diukur dari kualitas dan kuantitas indikator Standar Pelayanan Minimal dengan nilai bobot yang jelas, sumber daya yang digunakan, proses, waktu, lokasi, cara pengelolaan, hasil/wujud kinerja, manfaat dan kepuasan masyarakat, dan lain-lain.

Sebagai contoh adalah Kontrak Pelayanan Puskesmas Bendo Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PSKK-UGM dan *Ford Foundation*. Dalam kontrak tersebut disebutkan hak dan kewajiban penyelenggara dan pengguna layanan puskesmas, standar pelayanan yang disepakati, waktu, tempat, tarif, prosedur, penyampaian keluhan, dan lain sebagainya. Kontrak pelayanan ini dirumuskan oleh forum *citizen's charter* yang beranggotakan *multi stakeholders* yang terdiri dari aparat birokrasi, masyarakat pengguna layanan, LSM, media masa, akademisi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh masyarakat⁶.

Dengan demikian reformasi pelayanan publik di daerah tertinggal dapat dimulai dengan menetapkan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal yang dipergunakan sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan dasar, yaitu jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

⁶ Sumber: Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2003



dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan, dengan mutu yang lebih baik.

Keberhasilan dalam peningkatan mutu standar minimal pelayanan dasar yang dilaksanakan dalam koridor pelaksanaan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dapat dijadikan investasi awal bagi daerah-daerah untuk melepaskan diri dari status ketertinggalan. 🙏

Standar Pelayanan Minimal bersifat :
Dinamis dan perlu dikaji ulang dan diperbaiki dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan kebutuhan nasional dan perkembangan kapasitas daerah.



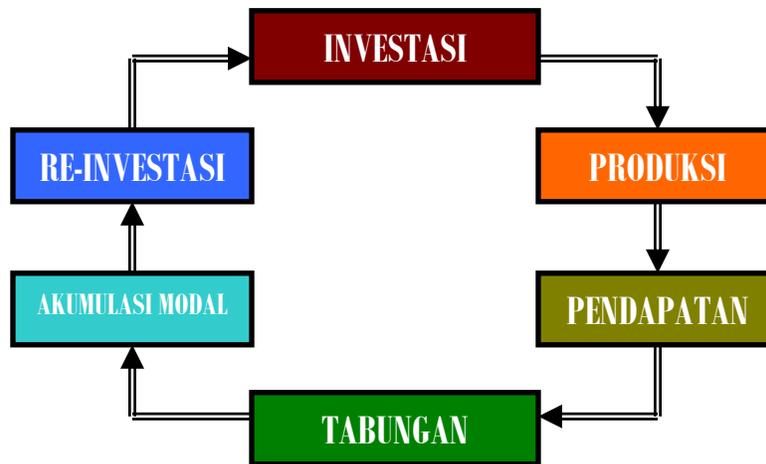
4

Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Kekuatan Sendiri

Berdasarkan hasil identifikasi, faktor penyebab kesenjangan perkembangan antar daerah adalah 1) letak geografis relatif terpencil atau jarak yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi; 2) potensi sumber daya alam relatif rendah/belum terdayagunakan optimal; 3) kualitas sumber daya manusia relatif rendah; 4) ketersediaan infrastruktur kurang memadai; 5) aliran dan akumulasi investasi rendah; 6) kapasitas institusi sosial-ekonomi kurang memadai; 7) kebijakan (regulasi) yang kurang tepat/kurang pro-daerah tertinggal.

Kondisi tersebut di atas memunculkan permasalahan perekonomian di daerah tertinggal, yakni 1) kegiatan produksi dan investasi yang rendah, sehingga kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat rendah; 2) kemampuan dan peran dunia usaha khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kurang berkembang; 3) kegiatan ekonomi lokal yang stagnan, sehingga kegiatan sektor riil kurang berkembang; 4) kelembagaan ekonomi kurang mampu mendukung kegiatan investasi, jaringan usaha, dan proses produksi, pengolahan, dan pemasaran; 5) kemitraan usaha antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal belum dikembangkan; 6) keterbatasan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan kegiatan usaha ekonomi dan penyediaan prasarana dasar.

Memperhatikan Dimensi Ketertinggalan Daerah seperti diatas, yakni *SDM, SDA, Infrastruktur, Investasi, Institusi* (2 'S' dan 3 'I'). Pembangunan ekonomi di daerah tertinggal memerlukan upaya **pemberdayaan, pemihakan, dan percepatan**, serta terobosan strategis melalui ketersediaan masukan sumberdaya (pengetahuan, ketrampilan, modal, teknologi, institusi) untuk mendukung "kapasitas"-nya agar mampu berkerja, berusaha, berpendapatan, dan berinvestasi, sehingga terjadi "siklus spiral", yaitu:



Berkaitan dengan hal tersebut, idealnya pembangunan ekonomi daerah tertinggal dilakukan melalui 1) peningkatan investasi pada 'produk' yang memiliki 'siklus hidup' panjang (*long life cycle product*); 2) produksi yang berorientasi pada permintaan pasar; 3) kegiatan produksi bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam atau potensi lokal; 4) penyediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan produksi; 5) penggunaan teknologi produksi yang tepat guna untuk menjamin akumulasi modal dan reinvestasi.

Instrumen pembangunan ekonomi daerah tertinggal :

1. Pengembangan kawasan produksi; dilakukan melalui penyiapan lahan dan investasi skala besar dalam kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan rakyat, berikut industri pengolahan dan pendukung, yang dimiliki dan dikelola masyarakat bersama pihak lain;
2. Pengembangan jaringan ekonomi dan prasarana antar regional dilakukan melalui manajemen regional dan marketing, pengembangan sistem distribusi, pelayanan informasi (input produksi, teknologi, pasar komoditas), maupun pengembangan prasarana antar regional (transportasi dan komunikasi).
3. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan melalui pembangunan kota penyangga, kawasan industri, dan kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*) atau kawasan ekonomi khusus (*special economic zone*) (FTZ/SEZ).

Hal tersebut dapat terselenggara dan berjalan, apabila semua kondisi yang diperlukan mendukung untuk mampu menarik sumber pembiayaan yang



dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya pembangunan yang tersedia. Dan kebijakan pengembangan ekonomi daerah tertinggal yang tidak berdasarkan pada potensi-potensi tersebut diatas (tidak sesuai dengan potensi lokal) ditingkat prakteknya tidak mampu tumbuh secara optimal.

A. Mengapa Harus Pengembangan Ekonomi Lokal ?

Setiap wilayah yang berpenghuni (yang terbelakang sekalipun), sudah barang tentu memiliki sumber alam yang mendukung kehidupan penghuninya seperti misalnya tanah, hutan, pepohonan, hewan, laut, ikan, barang tambang bahkan bebatuan, yang apabila diperiksa secara teliti akan menunjukkan ciri dan kekhasannya masing-masing yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Sayangnya, jarang orang mengira bahwa *kekhasan sesungguhnya memiliki nilai tinggi* dan saat ini semakin banyak diburu oleh bangsa-bangsa maju. Titik tolak pembangunan ekonomi lokal adalah kesadaran akan kekayaan yang selama ini mengelilingi kita tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Namun demikian, proses pembangunan ekonomi lokal adalah jalan panjang mendaki yang harus ditempuh masyarakat dan dipandu oleh pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang mempunyai *know-how*, visioner dan realistis, dan menjejak bumi.

Faktor pokok pengembangan ekonomi lokal :

- *Pemenuhan kebutuhan dasar;*
- *Menggarap ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah;*
- *Pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah dan kearifan lokal;*
- *Swadaya energi;*
- *Pengembangan sarana produksi pertanian alami;*
- *Pengembangan sarana transportasi dan logistik pedesaan;*
- *Pengembangan komunikasi desa – desa, desa - kota;*
- *Pemanfaatan teknologi tepat guna.*

Untuk menggerakkan kesemua faktor tersebut di atas, maka diperlukan sistem tata kelola pendanaan yang dapat mengalirkan dan menggulirkan dana secara merata sampai unit-unit usaha terkecil (mikro), sehingga menggairahkan setiap warga untuk melakukan usaha. Salah satu sistem tata kelola pendanaan yang telah terbukti ampuh dalam mengentaskan kemiskinan adalah sistem "*micro-finance*" atau pendanaan mikro.



Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah suatu lembaga yang memberikan pendanaan dengan persyaratan yang ringan kepada bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.

LKM dapat berbentuk :

- LKM formal berbentuk bank;
- LKM formal bukan bank;
- LKM informal.

B. Dimulai dari Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Mengacu kepada teori kebutuhan dasar Abraham Maslow, prasyarat sebuah masyarakat untuk menuju sejahtera, adalah apabila masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhan primer jasmaniahnya yaitu makanan bergizi seimbang sepanjang waktu (secara stabil) sehingga dapat menjalani siklus hidup secara sehat turun temurun. Bergeraknya roda ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi untuk hidup sebagai manusia seutuhnya, yang berekspresi dan berkarya akan mudah dicapai apabila kebutuhan primer terpenuhi dan kesemuanya itu tergantung pada keberhasilan bidang penyediaan pangan dari sektor pertanian.

- *Tata kelola air adalah prasyarat mutlak. Tanpa tersedianya air, dapat dikatakan bahwa bahan pangan lainnya tidak berguna dan aktivitas kehidupan akan lumpuh total. Pada situasi iklim yang sangat fluktuatif saat ini, di mana pada musim hujan air membanjir dan pada musim kemarau air menghilang, maka perlu dipersiapkan sistem irigasi yang memadai serta kantung-kantung air untuk cadangan air minum dan pertanian di musim kemarau. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat misalnya, selain dibuat bendungan, persediaan air juga disimpan dalam "embung".*
- *Bahan pangan pokok yang dapat dijadikan cadangan pangan sebaiknya adalah yang tahan simpan, misalnya beras, jagung, kedelai (biji-bijian). Untuk daerah tertentu, tanaman sagu baik dijadikan pangan cadangan jangka panjang, karena umur panennya mencapai 7-10 tahun, tahan banjir dan tahan kering (tumbuh di daerah rawa), dan produktivitas patinya dapat mencapai 25 ton/ha atau sekitar 4 kali dibanding beras atau jagung.*

Program ketahanan pangan dan perbaikan gizi selalu terkait erat, terutama untuk mencegah ancaman kelaparan ataupun gizi buruk. Pembuatan standar operasi penyediaan pangan darurat dan penanggulangan bencana perlu pula dipersiapkan secara sistematis dengan perangkat organisasi yang handal dan



melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari anak-anak hingga orang dewasa. Pendidikan ketahanan pangan perlu diberikan baik kepada para orang tua (ibu dan bapak) serta kepada anak-anak Sekolah Dasar, yaitu terutama pendidikan untuk mengkonsumsi berbagai makanan pokok alternatif (melalui program diversifikasi pangan), makanan darurat dan pengetahuan gizi praktis terutama sebagai persiapan menghadapi kondisi darurat pangan.

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) merupakan program nasional dimulai sejak tahun 1996/1997, dilaksanakan secara lintas sektoral yang terkait dalam Forum Koordinasi PMT-AS dan mempunyai dasar hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah. Tujuan program ini adalah meningkatkan ketahanan fisik siswa SD/MI selama kegiatan belajar, mendidik siswa untuk menyukai makanan tradisional, makanan jajanan lokal yang aman dan bersih, serta upaya-upaya untuk hidup sehat. Tujuan jangka panjang dari program ini selain untuk menjamin perbaikan gizi juga membantu upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan produksi pertanian setempat.

C. Menggarap Ekonomi Lokal Sesuai Karakteristik Wilayah

Untuk daerah yang jauh terpencil dan terisolir dengan infrastruktur minim, seyogyanya tidak mengembangkan atau berorientasi pada produksi komoditas umum untuk pasar umum, karena dari aspek biaya usaha, kemungkinan besar akan sulit bersaing dengan wilayah lain yang sudah mapan dan berdekatan dengan pasar.

Meskipun bertujuan sama, namun pengarahan atau orientasi pembangunan ekonomi lokal di setiap wilayah dapat berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi wilayah masing-masing.

Wilayah yang memiliki orisinalitas yang tinggi (alam, budaya) mungkin lebih tepat mengembangkan sektor wisata sebagai tulang punggung ekonominya. Dengan demikian pengembangan sektor lainnya seperti sektor pertaniannyapun diorientasikan kepada topik agro-wisata. Sejalan dengan itu, pengembangan infrastruktur lainnya seperti perumahan, jalan, terminal, pelabuhan dan sebagainya mengacu kepada konsep wisata.



Untuk wilayah terpencil dan terisolir dengan prasarana yang minim, namun memiliki kekayaan dan keragaman sumber-daya hayati, maka pengembangan pertanian sebaiknya dilakukan pada skala kecil - menengah, misalnya :

Pengembangan komoditi khas sebagai produk unggulan daerah seperti misalnya buah Merah di Papua, kopi Toraja, kopi Mandailing, pala Papua dan sebagainya telah dikenal hingga mancanegara;

- Pengembangan pertanian yang bertema *agro-environment (eco-product)*, yaitu mengembangkan produk pertanian (ekspor) dengan menjual dan mengangkat isu pelestarian lingkungan (kecenderungan masyarakat di negara maju semakin berorientasi pada *back-to-nature* dan semakin menghargai produk-produk yang murni alami);
- Pengembangan pertanian yang bertema *agro-forestry (pertanian hutan)* untuk masyarakat yang tinggal dikawasan hutan seperti misalnya pengembangan produk kemiri hutan, *seedlak* di NTT, dan lainnya;
- Pengembangan komoditi pertanian bertema *ethnic-product*, yaitu sebagai upaya mengangkat nilai produk pertanian dengan memanfaatkan nilai budaya setempat dan kearifan lokal (*dadih* dari Sumatera Barat adalah contoh kearifan lokal dalam mengolah susu melalui proses fermentasi tradisional yang terbukti menghasilkan keju lokal, yang memiliki zat anti kanker dan dapat meningkatkan imunitas yang lebih unggul dari produk yang dikembangkan oleh industri modern di luar negeri. Contoh lainnya adalah, gula aren Baduy, *tempe* dan lainnya).

D. Harta Karun Plasma Nuftah dan Kearifan Lokal

Banyak bangsa lain di negara maju merasa kagum dan “iri” atas kekayaan alam berupa keragaman plasma nuftah yang kita miliki. Diantara mereka yang menjadi turis sesungguhnya banyak yang “mengintai” koleksi tanaman-tanaman langka dan produk-produk etnik (khas daerah) yang dibuat dengan kearifan lokal. Konsep Hak Paten (*Intellectual Property Rights*) merupakan konsep yang relatif baru dan belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun pemberlakuannya akan semakin gencar di seluruh dunia dan merupakan ladang pencaharian baru.

- Tanpa perlindungan hukum, nilai kekayaan plasma nuftah dan kearifan lokal akan diambil oleh orang lain;
- Perlindungan kekayaan plasma nuftah khas dapat dilakukan dengan penerapan hak perlindungan indikasi geografis. Hal ini perlu dilakukan untuk produk-produk lokal yang memiliki kekhasan yang tinggi seperti misalnya buah Merah Papua, pisang Pontianak dan sebagainya.



Masyarakat tradisional umumnya juga memiliki kearifan lokal (*indigenous knowledge system*) dalam mengelola kehidupannya secara turun-temurun. Subak adalah sebuah contoh manajemen tradisional di bidang pertanian di Bali yang terbukti handal hingga saat ini. Contoh lainnya adalah produk makanan yang disebut *dadih* dari Sumatera Barat, yang dihasilkan dari “pembusukan” susu (fermentasi tradisional) yang secara ilmiah terbukti menghasilkan makanan kesehatan (probiotik) yang berguna meningkatkan kekebalan tubuh bagi konsumennya. Kapal Phinisi, Candi Borobudur merupakan hasil dari kearifan lokal.

Kearifan lokal (local wisdom) merupakan kekayaan intelektual tradisional yang sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai teknologi bernilai jual tinggi apabila telah dikonfirmasi dengan bukti-bukti ilmiah yang mendalam.

E. Energi dari Kebun Sendiri

Energi dibutuhkan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi seperti misalnya untuk pembangkit listrik tenaga diesel untuk menunjang sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian, pariwisata, transportasi, pengairan, penerangan dan sebagainya.

Salah satu bentuk pemanfaatan energi tepat guna bagi pertanian di wilayah pedalaman terpencil yang sejak dahulu telah diterapkan antara lain adalah apa yang disebut CLS (Crop Livestock System) yaitu integrasi antara tanaman pangan dengan ternak (seperti tanaman padi - kerbau, sapi) yang merupakan pola usaha tani yang diperkenalkan kembali oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagai upaya meningkatkan produktifitas, efisiensi lahan, biaya dan tenaga kerja. Pada CLS, ternak kerbau atau sapi berfungsi mengubah biomasa (rumput, jerami) menjadi pupuk organik dan energi untuk pembajakan tanah, transportasi dan lainnya. Hewan ternak adalah pengubah energi biomassa yang paling efisien.

Bahan bakar konvensional yang bersifat tidak terbarukan biasa digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) maupun motor penggerak perahu nelayan. Bahan bakar alternatif yang bersifat terbarukan (biodiesel) dapat digunakan sebagai substitusi bahan bakar konvensional serta dialihkan penggunaannya untuk berbagai mesin/motor penggerak sesuai anjuran



Pemerintah. Biodiesel dapat diolah dari bahan yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat.

Produksi biodiesel dapat dilakukan dengan teknologi yang sederhana, yaitu dari minyak jarak (atau minyak nabati lain) yang disenyawakan dengan suatu bahan kimia tertentu dengan bantuan katalis.

Dengan menggunakan biodiesel untuk menggerakkan PLTD, masyarakat setempat dapat memperoleh pendapatan dari budidaya tanaman jarak (atau minyak nabati lainnya) dan proses pengolahannya menjadi biodiesel.

F. Sarana Produksi Pertanian Alami

Pupuk modern (Urea, SP-36, ZA, KCL) apabila digunakan, perlu tersedia secara lengkap dan seimbang. Di daerah terpencil hal itu sangat sulit diadakan (dari segi jumlah, proporsi, kualitas, konsistensi dan harga). Namun, untuk daerah terpencil yang memiliki tanah yang masih “sehat” ketergantungan pupuk pabrik tidak perlu terjadi karena pupuk alami/organik dapat disediakan dari daun-daunan, sampah pertanian, pupuk kandang dan lainnya. Sedangkan kebutuhan akan insektisida alami misalnya dapat dibuat dari *daun mimba (Azadirachta indica)* dengan teknologi tepat guna.

PT. Agro Potumbulu adalah sebuah contoh upaya desa untuk dapat memenuhi sendiri kebutuhan sarana produksi pertanian seperti misalnya pupuk, organik, traktor dan lainnya di wilayahnya. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Gorontalo yang salah satu produknya adalah pupuk cair organik yang dikembangkan dengan modal sekitar Rp. 10 juta. Selain itu traktor diadakan untuk disewakan kepada petani yang hasil dan keuntungannya sebagian dikembalikan untuk pembangunan desa, dengan model usaha tersebut, pengelola desa dan masyarakat petani sama-sama diuntungkan.

G. Sarana Transportasi dan Logistik Perdesaan

Sarana transportasi (jalan darat dan air) diperlukan untuk menghubungkan desa-desa pelosok (*hinterland*) dengan wilayah pusat pertumbuhan terutama pada pusat dan titik-titik logistiknya (terminal, sub-terminal, pelabuhan dan sebagainya). Sarana transportasi tradisional seperti kuda dan sapi kemungkinan akan menjadi sarana yang strategis dimasa mendatang ketika



minyak bumi semakin langka. Dengan mengembangkan transportasi tradisional kuda ataupun sapi maka sekaligus akan menghidupkan usaha peternakannya.

Pengembangan sistem transportasi dan logistik pertanian perlu memperhatikan karakteristik produk pertanian yang akan ditangani. Bahan-bahan pertanian yang mudah rusak (perishable) seperti misalnya buah-buahan/sayuran (hortikultura) memerlukan transportasi yang relatif cepat oleh karenanya pusat-pusat pengembangannya perlu berada di dekat jalur transportasi cepat seperti misalnya jalur sungai atau laut. Untuk produk pertanian yang tidak mudah rusak seperti misalnya kemiri, kacang mete, vanili, kopi dan sebagainya tidak terlalu mensyaratkan gerak cepat oleh karenanya dapat dikembangkan di mana saja. Pelabuhan atau terminal-terminal dimaksudkan untuk tempat mengumpulkan produk pertanian sehingga cukup ekonomis untuk didistribusikan lebih lanjut ke pusat-pusat perdagangan. Tempat penampungan sementara produk-produk pertanian seyogyanya berada di jalur strategis (mudah diakses) dan seharusnya tersedia sumber air bersih untuk membersihkan dan menjaga kesegaran produk.

H. Komunikasi Desa – Kota

Pasar akan terbentuk dengan sendirinya apabila terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli. Di zaman modern seperti sekarang ini, teknologi untuk mendukung komunikasi seperti radio, televisi, telepon dan bahkan internet bukan lagi sesuatu yang istimewa dan tidak hanya layak bagi daerah perkotaan, bahkan di daerah yang paling terpencilpun bukan hal yang sulit untuk memilikinya. Salah satu contoh sarana komunikasi yang berhasil dikembangkan untuk menghubungkan antara petani di desa, pembeli di kota dan mancanegara dan para ahli pertanian yang ada di kota adalah program telecenter.

Telecenter mempromosikan desa :

Telecenter adalah program yang dikembangkan oleh Bappenas dan UNDP untuk meningkatkan komunikasi desa-kota. Hingga saat ini enam buah telecenter percontohan telah berdiri dan beroperasi di Indonesia. Telecenter tersebut adalah e-Pabelan di Jawa Tengah, Semeru di Jawa Timur, Muneng di Jawa Timur, Tuladenggi di Gorontalo, Lapulu di Sulawesi Tenggara, dan Salubomba di Sulawesi Tengah. Dengan adanya program telecenter ini terjadi komunikasi dan transaksi antara petani di desa dengan pembeli yang membutuhkan (baik pembeli dalam negeri maupun pembeli dari mancanegara) serta para ahli pertanian di kota lain. Dengan bantuan telecenter di Pabelan seorang santri berhasil menjadi juara 2



perlombaan yang diselenggarakan oleh sebuah pabrikan software dan memperoleh hadiah uang dan pelatihan ke luar negeri, serta memfasilitasi pemasaran produk tradisional seperti kerupuk teri, dengan pembeli dari Jakarta, dan order sebesar 2 ton. Di Muneng, budi daya jangkrik telah berhasil dijual ke Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa, dengan order sebesar 3 kwintal perminggu (dari seorang peternak jangkrik telah berkembang menjadi 37 peternak jangkrik). Keberhasilan peningkatan produktifitas dan efisiensi tanaman melon, sebagai hasil dari informasi yang diperoleh melalui internet yang meningkatkan penjualan dan pendapatan petani melon. Di Kertosari, budi daya bull frog (katak banteng) telah mendapat pembeli dari Singapura dan Cina, dengan permintaan sebesar 2 ton per bulan. Berbagai produk keripik telah dikirimkan berbagai kota besar di Jawa dan Kalimantan dengan memanfaatkan program telecenter.

I. Teknologi yang Tepat Guna

Teknologi tepat guna adalah teknologi yang seyogyanya menggunakan bahan setempat, dapat dibuat oleh masyarakat setempat dan mudah dioperasikan.

Teknologi pengawetan hasil pertanian dan perikanan yang paling mendasar (teknologi zaman purbakala yang kini kembali “trendy”) adalah pengawetan produk pertanian dengan pengeringan energi surya, pengasapan dan sebagainya. Penyediaan sarana untuk penyimpanan seperti lumbung anyaman bambu, atau cara penyimpanan ubi dalam lubang-lubang di tanah (di Papua) adalah teknologi tradisional yang memiliki kearifan tinggi. Selain itu, teknologi kemasan tradisional (keranjang tradisional, karung, daun kelobot jagung, daun pisang dan lainnya) mudah dilakukan dengan teknologi sederhana, padat karya, dan ramah lingkungan. Hal-hal seperti itu apabila dikerjakan secara “apik” akan berpeluang menjadi bahan kemasan yang bergengsi untuk konsumen di kota dan bahan di mancanegara.

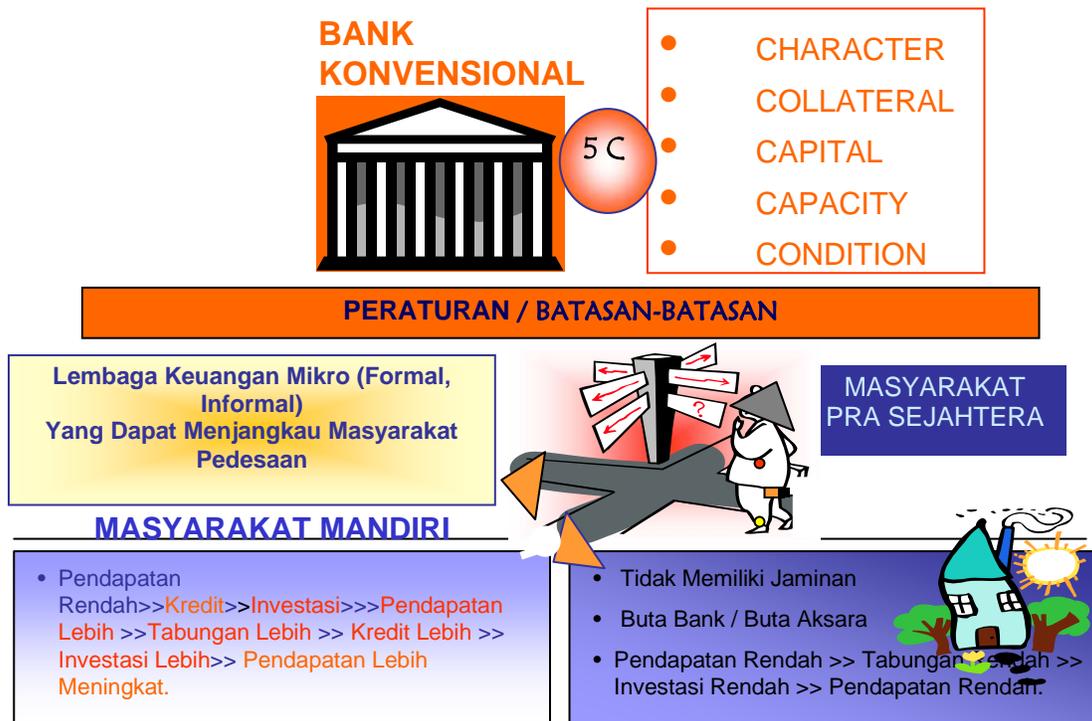
Bahan alami yang tersedia di setiap wilayah sesungguhnya telah disediakan oleh Sang Pencipta untuk mendukung kelangsungan kehidupan makhluk yang ada di dalamnya. Pepohonan seperti hutan bakau yang tumbuh di pesisir dan kepulauan berfungsi untuk menjaga kelangsungan kehidupan ikan dan juga berfungsi mencegah abrasi dan pemecah ombak besar. Kelapa yang tumbuh di daerah pesisir berfungsi sebagai pemecah angin (wind breaker) dan ombak besar. Bambu yang terutama tumbuh di wilayah daratan dan tebing berfungsi menjaga erosi dan longsor. Pemanfaatan sumber daya alam yang demikian perlu dilakukan secara arif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.



Bambu bahan yang serba-guna dan tepat guna :
 Banyak negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea dan Cina mulai memilih bambu untuk dikembangkan menjadi berbagai produk industri. Bangunan perumahan dan jembatan berstruktur bambu cocok untuk dikembangkan di wilayah rawan gempa. Pipa saluran air, kincir air, rakit, perabotan rumah tangga, alat musik dapat dipenuhi dari bahan bambu. Arang dari bambu dapat digunakan untuk penyaringan dan penjernihan air. Cairan asap bambu ('bamboo vinegar') dapat digunakan untuk pengawetan ikan dan juga sebagai bahan pemercepat pertumbuhan tanaman (growth promoter).
 Bambu adalah tanaman yang paling cepat pertumbuhannya dengan produktivitas biomasa per hektarnya dapat mencapai 25 kali lipat dari pohon kayu. Bambu adalah tanaman serba guna dan tepat guna untuk menunjang kehidupan di desa tertinggal.

J. Lembaga Keuangan Mikro

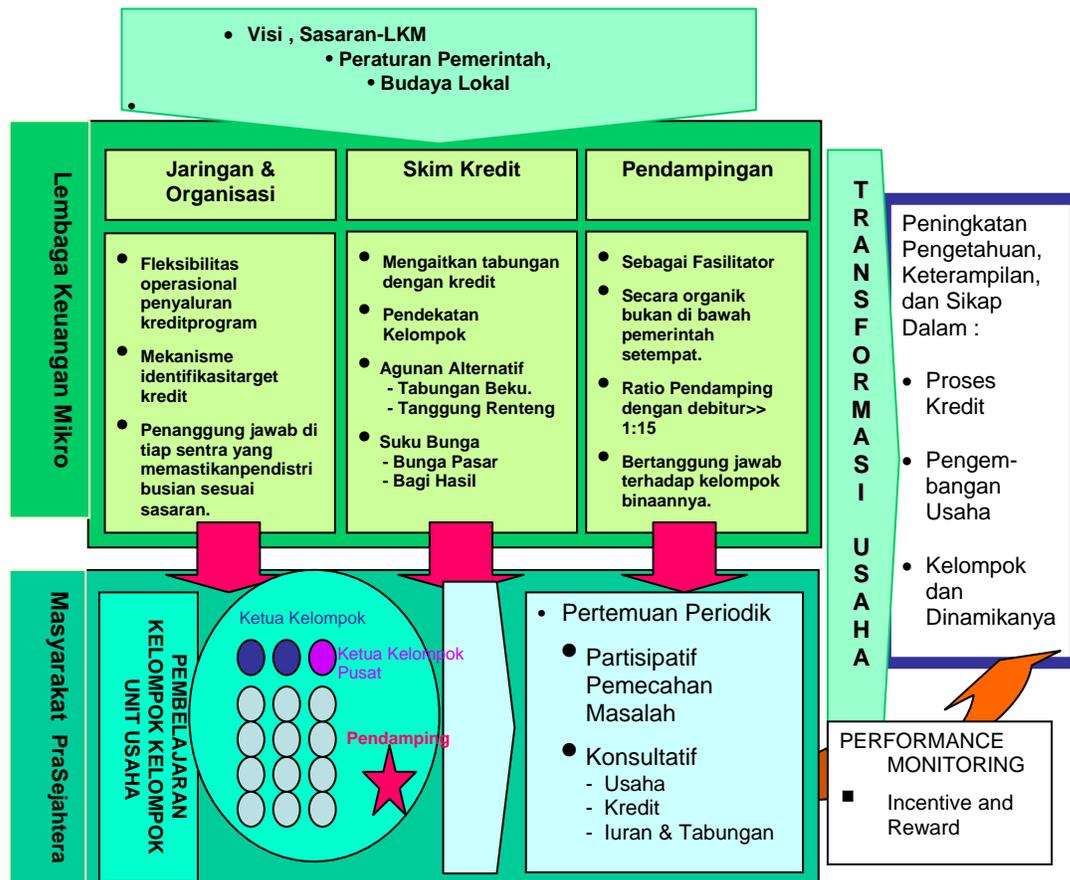
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibentuk sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat pedesaan, dimana keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil berpenghasilan rendah dan pengusaha kecil dalam skala mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal.





Lembaga Keuangan Mikro memiliki keunggulan komparatif dibandingkan lembaga keuangan berskala besar yaitu tidak rentan terhadap krisis ekonomi, lebih dekat dengan nasabah, pangsa pasar yang luas, kemampuan mengakses sampai pelosok perdesaan, pola pelayanan sederhana. Kondisi tersebut yang menyebabkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat bermanfaat dan diperlukan oleh masyarakat khususnya masyarakat perdesaan.

Pengembangan LKM sebaiknya dilakukan secara desentralisasi karena spesifikasi lembaga yang berbeda beda, keragaman daerah, dan segmen pasar yang amat beragam, maka bentuk LKM yang bersifat informal didorong pertumbuhannya dan diperlukan monitoring secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah setempat agar memudahkan pembinaannya. Jenis dan karakteristik LKM di Indonesia bervariasi sesuai dengan tujuan pendirian, budaya dan karakteristik masyarakat setempat, kebijakan pemerintah, dan sasaran yang akan dicapai.





Beberapa pendekatan LKM (skim kredit dan pemberdayaan) telah diupayakan dalam menangani masyarakat dalam kategori 3B (Buta Usaha, Buta Bank, Buta Aksara) yaitu dengan mengaitkan tabungan dengan kredit, tabungan beku dan tanggung renteng sebagai pengganti agunan fisik, bagi hasil sampai dengan bunga pasar, sampai dengan pola pola pengembangan, pembinaan dan pemberdayaan yang **bersifat partisipatif dan berkelanjutan** dari LKM terhadap nasabahnya dengan tujuan:

1. Membangun masyarakat miskin perdesaan (petani, nelayan) untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi kehidupan dan penghidupannya;
2. Memberdayakan masyarakat perdesaan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya;
3. Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya iklim dan sistem pelayanan yang mendukung kegiatan usaha produktif;
4. Memperkuat kelembagaan komunitas perdesaan guna meningkatkan kemampuan kerjasama, posisi tawar dalam skala ekonomi usahanya.

Prinsip pemberdayaan **partisipatif** lebih mengutamakan turut berperan sertanya masyarakat dalam menentukan peluang peluang usaha dan upaya meningkatkan taraf hidupnya dengan LKM sebagai **fasilitator** , yaitu :

1. **Berkelompok**

Mendorong agar mampu bekerja bersama dalam kelompok, antar kelompok dan dengan mitra kerja lainnya, berdasarkan keserasian dan kepemimpinan dari kalangan mereka sendiri;

2. **Pendekatan Kemitraan**

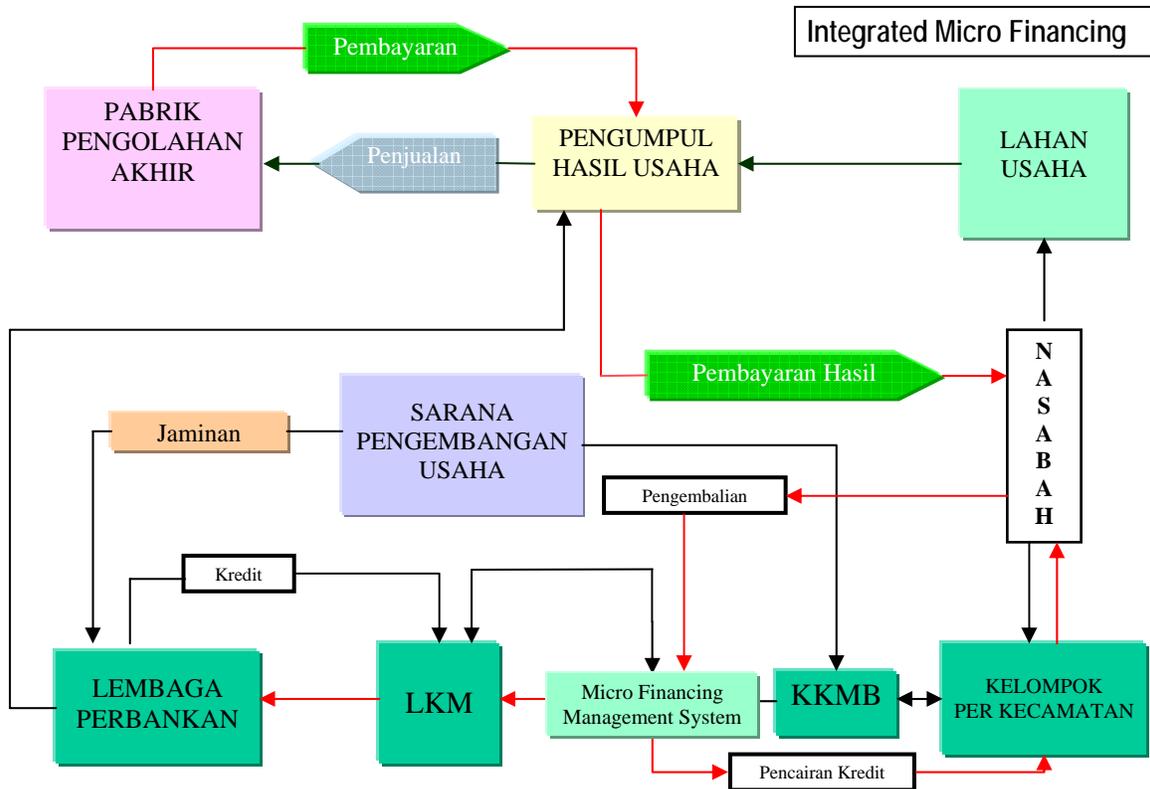
Ikut sertanya masyarakat dalam program tersebut, akan lebih menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dalam menentukan hari depannya;

3. **Kesatuan Keluarga**

Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan pemacu dan pemicu kemajuan usaha mereka;

4. **Belajar Menemukan Sendiri**

Pembelajaran tumbuh dan berkembang agar mereka menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka kembangkan.



K. Jenis Dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia merupakan lembaga yang terbesar di dunia, baik dilihat dari jenis dan jumlahnya. Jenis dan karakteristiknya bervariasi sesuai dengan tujuan pendirian, budaya masyarakat, kebijakan pemerintah, dan bentuk kelembagaan sesuai sasaran yang akan dicapai. Jenis dan karakteristik Lembaga Keuangan Mikro, sebagai berikut :

K. 1. LKM Formal Berbentuk Bank

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Produk berupa tabungan, deposito, dan pemberian kredit. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi dalam valuta asing, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, dan ikut dalam sistem pembayaran lalu lintas giral.



JENIS	KARAKTERISTIK
BPR-BKD (Badan Kredit Desa)	<ul style="list-style-type: none">Dikenal sebagai Bank Desa dan lumbung desa;Kepemilikan dan manajemen dikelola oleh aparat desa setempat;Pembinaan dan pengawasan oleh BRI.
BPR-NON BKD	<ul style="list-style-type: none">Secara kelembagaan dan operasional lebih luas dari BPR-BKD;Terdiri dari LKM yang ada BPR, Bank Pasar, Bank Desa, Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan (Lumbung Pitih Nagari, dan lainnya).
BRI-UNIT	<ul style="list-style-type: none">Lebih kurang 3800 unit BRI;Pengawasan operasional oleh BRI Cabang, secara keseluruhan oleh Bank Indonesia.

K. 2. LKM Formal Bukan Bank

JENIS	KARAKTERISTIK
LDKP (Lembaga Dana & Kredit Pedesaan)	<ul style="list-style-type: none">Didirikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, dengan tujuan peningkatan pembangunan di perdesaan;Saat ini lebih dikenal sebagai Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jateng, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan lainnya;Kegiatan operasional, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan memberikan kredit; Manajemen dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah dibantu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kebijakan LDKP berbeda untuk masing masing propinsi tergantung kebijakan, kemampuan Pemerintah Daerah dan BPD setempat.
KSP (Koperasi Simpan Pinjam)	<ul style="list-style-type: none">Koperasi yang kegiatan utamanya simpan pinjam, dan umumnya didirikan oleh masyarakat perdesaan;Unit Simpan Pinjam (USP) adalah salah satu kegiatan usaha dari KSP (USP-KUD, USP-KOPKAR);Perizinan, pengaturan, pengawasan, dan pembinaannya dilakukan Departemen Koperasi;Koperasi memberikan pelayanan sebatas anggota, pelayanan diluar anggota terkena ketentuan perbankan.



K. 3. LKM Informal

Pada umumnya didirikan oleh masyarakat pedesaan yang dalam pembentukannya cenderung dipengaruhi oleh budaya setempat serta untuk tujuan tertentu lainnya.

JENIS	KARAKTERISTIK
LSM/KSM (Lembaga/ Kelompok Swadaya Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan penyediaan dana yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan usaha para anggotanya;• Pada umumnya bertujuan mendukung program program pemerintah seperti pengadaan rumah sederhana, keluarga berencana, transmigrasi, dan pertanian (program inpres desa tertinggal /IDT);• Keegiatannya melalui kelompok kelompok yang ada di masyarakat pedesaan.
BMT (Baitul Maal wat Tamwil)	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah Islam :<ul style="list-style-type: none">- Sosial, menerima zakat, infaq, dan shadaqah yang kemudian disalurkan sesuai dengan aturan dan amanahnya;- Bisnis, mengumpulkan dana simpanan dan melakukan pembiayaan kegiatan kegiatan dengan prinsip prinsip syariah;- Kelembagaan biasanya beberbentuk KSM atau pra koperasi, koperasi, bank syariah sesuai persyaratan dari masing masing kelembagaan tersebut;- Pengawas dan Pembina oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai Lembaga Pendamping Swadaya Masyarakat (LPSM).
ARISAN	<ul style="list-style-type: none">• Merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan dengan mengadakan pengumpulan dana dan melakukan penarikan secara periodik dan bertahap. Keanggotaan bervariasi antara 10 - 30.

L. Jaringan dan Organisasi

Untuk mempertahankan kelangsungan dan peningkatan LKM serta memperkuat daya saing perlu dibentuk jaringan LKM sejenis dalam wilayah tertentu maupun jaringan dengan lembaga keuangan lain yang berskala



besar. Dengan jaringan yang terbentuk LKM dapat melakukan benchmarking, dapat mengakses dana, tranfer pengetahuan dan praktek praktek operasional yang dilakukan. Langkah lebih lanjut LKM yang sejenis dapat membentuk asosiasi dengan harapan dapat memperjuangkan dan menjamin kepentingan anggotanya dan sebagai wadah untuk memberikan konsultasi dan peningkatan kualitas dari anggota anggotanya.

Bank Indonesia di Bandung telah melakukan upaya pemberdayaan asosiasi dengan cara memberikan technical assistance dan financial assistance berupa kerjasama dalam hal pelatihan dan konsultasi bagi BPR- BPR di Jawa Barat.

M. Sumber Pendanaan

Basis bisnis Lembaga Keuangan Mikro adalah adanya permodalan yang kuat yang memungkinkan berkembang dan menjalankan usahanya dengan resiko yang dapat diprediksi secara optimal. Bebarapa alternatif dapat dilakukan seperti mendorong kerja sama bank umum dalam rangka penyaluran kredit usaha kecil baik secara *chanelling* pelaksana, maupun penyertaan modal. Seperti misalnya bentuk penyertaan modal dan penyaluran kredit dari BNI dengan beberapa BPR. Hal lain yang dapat dilakukan dengan mendorong pelaksanaan *merger* LKM sejenis yang kepemilikannya sama, dengan tujuan disamping memperkuat permodalan, juga memperkuat posisi dalam menghadapi persaingan. Juga dengan memperluas kepemilikan lembaga sehingga kemampuan menambah modal lebih terbuka baik melalui perubahan bentuk hukum maupun tidak.

Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), di Jawa Barat lebih dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) dengan tujuan pendirian membantu pembangunan di pedesaan. Semula kepemilikan pada Daerah Tingkat I, saat ini kepemilikannya bertambah dengan masuknya Pemerintah Daerah Tingkat II dan Bank Jabar.

N. Pengembangan Pemasaran

Guna mendorong produk yang inovatif dalam bidang pemasaran perlu dilakukan replikasi produk produk yang memiliki keunggulan di pasar. Agar



ekonomis dan dapat terjangkau secara luas diperlukan kerjasama dalam bentuk suatu jaringan pemasaran bersama. Jaringan dapat dilakukan bersama LKM sejenis maupun membentuk jaringan dengan mitra lembaga keuangan lainnya. Dengan terbentuknya jaringan dapat dilakukan riset pasar dan pengembangan produk sebelum produk diluncurkan ke pasar dengan biaya yang dapat ditanggung bersama. Produk produk BRI dapat dijadikan model untuk direplikasi.

O. Peningkatan Kualitas Pelaku LKM

Sertifikasi pelaku LKM sudah mulai dilakukan dengan standarisasi materi materi pelatihan. Sertifikasi menunjukkan kompetensi yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan karier dan remunerasi para pelaku LKM. Perbarindo banyak melakukan pelatihan pelatihan sejenis misalnya dengan mengadakan kerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia dalam rangka sertifikasi peningkatan kompetensi pelaku BPR dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Pemberian bantuan teknis dapat dilakukan oleh bank atau lembaga mitra dalam bentuk konsultasi, pelatihan/magang, pengembangan perangkat lunak, standarisasi perangkat lunak seperti misalnya Bank Jabar sebagai mitra kepada Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Muamalat Indonesia kepada BMT, dan lainnya.

P. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan suatu keharusan bagi LKM dalam meningkatkan pelayanan kepada nasabah, pengawasan dan kontrol terhadap proses kredit dan kinerja LKM secara keseluruhan. Pengembangan teknologi informasi dilakukan mulai penyediaan perangkat keras dan lunak serta peningkatan kualitas operasionalnya. Beberapa LKM dengan skala besar model Grameen Bank sudah merintis pembuatan sistem prosedur administrasi sesuai dengan jenis kredit yang ditawarkan serta kompleksitas permasalahan yang dihadapinya. Sistem sedemikian rupa diciptakan secara jaringan dengan tujuan dapat mendeteksi secara dini problematik cabang maupun titik pos pelayanan.

Q. Pengembangan Nasabah

Sebagai lembaga yang bekerja bersandarkan kepercayaan dari masyarakat lembaga keuangan mikro dituntut untuk memiliki sistem yang handal yang



dapat menjamin keamanan dana nasabah yang dikelola oleh LKM. Sistem administrasi baik yang diikuti dengan pelayanan terhadap permasalahan nasabah merupakan langkah yang harus dilakukan, karena hadirnya LKM sebagai unit usaha yang menyumbangkan lapangan kerja terbentuk karena adanya nasabah. Beberapa pengembangan nasabah saat ini sudah dilakukan dari mulai pendampingan terhadap nasabah hingga pelatihan pelatihan .

R. Pendampingan

Sistem pendampingan merupakan antisipasi untuk mendorong percepatan alokasi dana kepada nasabah yang benar benar membutuhkan. Tanpa adanya sistem pendampingan yang mengikutsertakan tenaga terdidik dan terlatih yang benar benar memahami aktivitas usaha kecil, akan amat sulit bagi kredit program yang telah dirancang untuk diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dalam jangka waktu yang relatif terbatas. Peran pendamping dikenal juga bukan hanya memberi manfaat kepada lembaga ekonomi masyarakat, tetapi juga sangat penting bagi bank dan pengusaha mikro penerima kredit.

Jumlah pendamping relatif memadai dengan jumlah kelompok yang dibina, rasio ideal bagi pemula yang banyak digunakan oleh lembaga keuangan mikro adalah 1 : 5. Artinya seorang pendamping rata rata menangani 5 kelompok nasabah. Jika 1 kelompok memiliki 5 orang nasabah, maka 1 orang pendamping menangani 25 orang nasabah. Pendamping yang berpengalaman dapat membina 10-15 kelompok nasabah setara dengan 50 hingga 75 orang nasabah.

Pendamping, lembaga keuangan mikro lainnya menyebut petugas lapangan. Peran pendamping bergantung pada skala lembaga keuangan mikro. Bagi LKM yang besar, secara organisasi pendamping sebagai partner dari bank dalam penyaluran kredit dan proses pembinaan nasabah. Bagi LKM kecil dan menengah dan sistem belum menunjang, peran pendamping juga berfungsi sebagai kolektor cicilan nasabah yang pertemuannya dilakukan secara periodik. Honor pendamping dikaitkan secara prosentase terhadap jumlah kredit yang telah disalurkan nasabah binaannya.



S. Pendekatan Kelompok

Dengan pendekatan kelompok maka biaya transaksi di tingkat nasabah maupun penyedia dana (bank) akan lebih rendah dari pendekatan individual. Selain itu pendekatan kelompok juga mampu mengendalikan resiko pinjaman pada tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan pendekatan individual. Sebagian besar pengusaha kredit mikro tidak menuntut jaminan atas kredit nasabah, sebagai gantinya maka kelompok diberdayakan sebagai jaminan yaitu dari mulai perekrutan kelompok hingga proses tunggakan yang terjadi kelompok akan mendapatkan penalti dari lembaga, disamping tabungan beku dari nasabah.

Disamping itu pendekatan kelompok amat sesuai dengan metoda pemberdayaan **partisipatif** dari masyarakat dalam menentukan peluang usaha dan upaya peningkatan taraf hidup dengan LKM / pendamping sebagai fasilitator.

Kelompok bagi masyarakat prasejahtera bahkan sebagian buta huruf mempunyai kekuatan dalam mempercepat proses belajar khususnya dalam masalah pengembangan usaha mereka. Melalui pendamping yang terlatih yang kadangkala proses komunikasi dengan melakukan media gambar kerekatan / kepaduan dan sintalitas sesama anggota kelompok dapat tercipta, sehingga kepentingan kelompok lebih didahulukan daripada kepentingan individu. Peran pendamping sebagai fasilitator sudah dimulai dari proses pembentukan kelompok, dimana kelompok yang efektif biasanya terdiri dari 5 orang. Rekomendasi pemilihan anggota kelompok diserahkan sepenuhnya pada anggota, dengan harapan mereka lebih mengetahui karakter dari masing masing anggota. Masing masing anggota kelompok oleh pendamping di survey (studi kelayakan), rumah, suami, anak, rekomendasi dari tokoh (RT/RW) mengenai masing-masing anggota tersebut. Setiap kelompok memiliki nama, dan penamaannya diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan kelompok yang telah lulus survey. Secara umum tujuan pendekatan kelompok pada LKM adalah memfasilitasi iklim kejasama diantara anggota, dengan kelompok lain, agar mereka dapat menemukan sendiri pilihan-pilihan usahanya dan penanganan permasalahannya berdasarkan kredit yang telah diperoleh dari lembaga / pendamping yang berfungsi sebagai fasilitator.





5

Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi

A. Pengantar

Ketertinggalan sebuah daerah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda, yaitu geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, daerah rawan bencana dan konflik sosial serta kebijakan pembangunan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap ciri dan kondisi dari daerah tertinggal, sehingga hal inilah yang menentukan jenis sebaran daerah tertinggal. Faktor budaya dan perilaku masyarakat yang tinggal di daerah tersebut turut menyumbang perbedaan ciri dan kondisi daerah tertinggal. Perbedaan ciri dan kondisi ini berpengaruh terhadap keadaan infrastruktur terintegrasi di daerahnya.

Infrastruktur terintegrasi adalah salah satu komponen fisik yang penting bagi sebuah wilayah, dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan denyut kegiatan sosial yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kebanyakan daerah tertinggal di Indonesia merupakan daerah perdesaan. Dari segi penataan tata ruang, infrastruktur yang ada saat ini belum terintegrasi, khususnya dengan upaya-upaya pertumbuhan ekonomi. Apalagi dengan adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh daerah tertinggal, menjadikan pengembangan infrastruktur terintegrasi makin sulit.

Pengembangan infrastruktur terintegrasi yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan mendukung terciptanya iklim investasi bagi sebuah wilayah. Hal ini akan memberikan dampak “dua arah” di mana dengan meningkatnya investasi untuk menunjang kegiatan perekonomian juga akan berdampak terhadap pengembangan infrastruktur terintegrasi. Hal ini akan memberikan dampak spiral di mana pertumbuhan ekonomi, iklim investasi dan pengembangan infrastruktur terintegrasi akan tumbuh seiring dan sejalan.

Daerah tertinggal dan wilayah “perdesaan” adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kebanyakan daerah tertinggal di Indonesia berada di wilayah perdesaan. Kenyataan ini sebaiknya dijadikan sebagai landasan untuk



pengembangan infrastruktur terintegrasi di daerah tertinggal. Model pengembangan *infrastruktur terintegrasi perdesaan* akan menjadi sasaran utama bagi percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Pembangunan infrastruktur terintegrasi yang ada saat ini seringkali tidak disesuaikan dengan potensi dan strategi pembangunan perekonomian di daerahnya, sehingga seringkali ditemui bahwa fasilitas infrastruktur terintegrasi yang dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan infrastruktur perdesaan ini harus *terintegrasi* dan mengarah kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkatkan iklim investasi untuk pengembangan infrastruktur terintegrasi yang lebih luas.

Strategi pengembangan infrastruktur terintegrasi lebih dipusatkan untuk meningkatkan perekonomian perdesaan serta diharapkan mampu menyumbang terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian daerah tertinggal dan masyarakatnya akan maju dan setaraf dengan daerah lain di Indonesia.

Berikut ini adalah paparan beberapa hal yang terkait dengan infrastruktur terintegrasi daerah tertinggal berdasarkan perbedaan sebaran wilayahnya.



	Hal Terkait Infrastruktur Terintegrasi dan Pertumbuhan Perekonomian			
Jenis Sebaran Daerah	Pedalaman	Kepulauan	Perbatasan	Pesisir
Jenis fasilitas infrastruktur terintegrasi yang ditemukan	Jalan, sekolah, puskesmas	Sekolah, puskesmas, transportasi	Jalan, sekolah, puskesmas, transportasi	Sekolah, puskesmas, transportasi, pasar
Tantangan pengembangan infrastruktur terintegrasi	Akses transportasi untuk menghubungkan sumber potensi perekonomian yang mampu mengatasi tantangan alam	Pengelolaan hasil laut dan perikanan yang lebih efisien dan efektif	Pengurangan gap dengan kondisi negara tetangga dan kebijakan yang mendukung	Kerusakan alam, keterbatasan lahan dan kondisi sosial masyarakat
Kondisi	Jumlah fasilitas infrastruktur terintegrasi cenderung terpusat di daerah pusat pemerintahan	Fasilitas infrastruktur terintegrasi tersebar di beberapa pulau, tergantung keberadaan jumlah penduduk dan mobilisasi kegiatan masyarakat di wilayah tersebut.	Perbedaan kondisi sosial (termasuk fasilitas infrastruktur terintegrasi dasar) yang jauh berbeda dengan Negara tetangga yang sering memicu terjadinya pelanggaran hukum dan konflik yang menghambat pertumbuhan perekonomian lokal	Kebanyakan fasilitas infrastruktur terintegrasi dasar kurang terpelihara yang kurang didukung oleh kondisi sikap sosial masyarakat



Strategi	Uraian
	<p>A. Infrastruktur Transportasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan laju pergerakan orang, barang dan jasa;▪ Menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah maju;▪ Menyeraskan dan memadukan sistem transportasi (darat, laut, udara) nasional yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi wilayah. <p>B. Infrastruktur Perumahan dan Penyehatan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Meningkatkan sistem pelayanan dan kualitas air bersih;▪ Memenuhi kebutuhan perumahan swadaya yang terjangkau;▪ Memenuhi aspek keberlanjutan, memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan;▪ Diarahkan pada sistem tata ruang daerah dan lingkungan hidup.
	<p>C. Infrastruktur Sumber Daya Air</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diarahkan untuk menambah cakupan air;▪ Memperhatikan azas daya dukung lingkungan;▪ Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. <p>D. Infrastruktur Energi dan Kelistrikan</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Diversifikasi energi sebagai energi alternatif untuk pembangkit listrik;▪ Sumber-sumber energi alternatif disesuaikan dengan kebutuhan & ketersediaan sumberdaya. <p>E. Infrastruktur Telekomunikasi dan Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan diarahkan pada aspek alternatif.

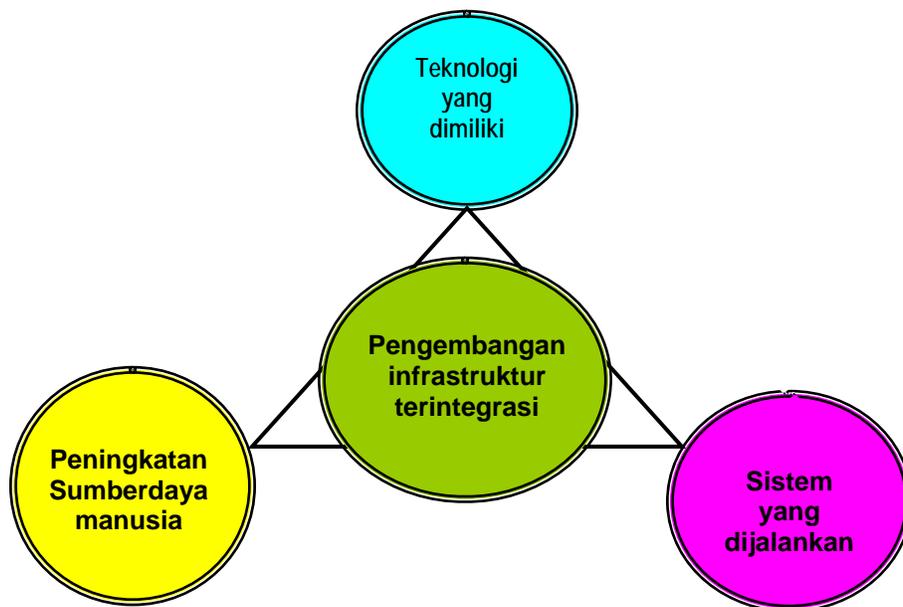


B. Strategi Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi di Daerah Tertinggal

Melihat banyaknya keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki daerah tertinggal, maka strategi kebijakannya lebih diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal yang berpihak kepada rakyat. Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat ini diharapkan memberikan dampak terhadap terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan peningkatan iklim perekonomian tersebut, maka masyarakat akan dapat hidup dengan layak dan kebutuhan dasarnya dapat dipenuhi secara memadai yang diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Pertumbuhan iklim ekonomi ini diarahkan kepada pembagunan ekonomi perdesaan yang terarah dan terintegrasi dengan berbagai sektor terkait. Strategi pengembangan infrastruktur terintegrasi untuk daerah tertinggal didukung oleh tiga aspek pengembangan, yaitu:

- a. Peningkatan sumber daya manusia;
- b. Sistem yang dijalankan;
- c. Teknologi yang dimiliki.





C. Penataan Pola Tata Ruang Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi

Penataan pola tata ruang yang ada saat ini diarahkan kepada sumber kekuasaan. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada tata ruang kota-kota di Indonesia, pada umumnya alun-alun menjadi pusat kota di mana di sekitarnya dibangun fasilitas terpenting yang terkait dengan kekuasaan pemerintahan, seperti misalnya kantor-kantor pemerintah, tempat ibadah, pusat perekonomian, bangunan penting kota, terminal, sekolah dan rumah sakit, kemudian diikuti oleh perumahan. Tata ruang ini belum diarahkan kepada sumber-sumber perekonomian masyarakat. Pola tata ruang yang demikian ini biasanya hanya didasarkan pada sebaran jumlah penduduk.

Pola tata ruang pembangunan infrastruktur harus mampu mendukung infrastruktur terintegrasi fisik untuk pembangunan ekonomi perdesaan. Sarana fisik yang dibangun harus menghubungkan sumber produksi di perdesaan dengan pengguna produk pertanian. Sarana transportasi yang dibangun harus menghubungkan pusat produksi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan pasar, baik pasar lokal maupun pasar yang lebih luas. Kemudian diikuti oleh sarana pendukung lain misalnya pusat produksi pasca panen yang terakses oleh sarana transportasi dan terhubung dengan pusat-pusat penghasil produk pertanian. Demikian juga dengan sarana komunikasi yang menjadi salah satu komponen penting untuk pengembangan infrastruktur terintegrasi perekonomian pedesaan.

D. Model dan Pola Penataan Pengembangan Infrastruktur Terintegrasi

Untuk mengintegrasikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi - yang sifatnya lintas sektoral - diperlukan perencanaan tata ruang yang disesuaikan dengan karakteristik pengembangan wilayah suatu daerah. Pengembangan wilayah dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya daerah, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan yang diwujudkan melalui penataan ruang. Penataan ruang secara teknis adalah merupakan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sehingga penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan agar terwujudnya alokasi ruang yang tepat bagi



pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang yang diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperoleh dari analisa kondisi alam dan geografis, sosial budaya, demografi penduduk, tingkat ekonomi serta aspek strategis lainnya.

Secara umum masalah penataan ruang selalu berkaitan dengan empat hal pokok yaitu: permasalahan yang multi kompleks, adanya keterkaitan berbagai isu pembangunan wilayah, beragamnya lingkup kepentingan yang harus ditampung dalam perencanaan wilayah dan cara pengambilan keputusan yang mengakomodir kepentingan semua stake holder (Djoko Sujarto, 2001).

Permasalahan penataan ruang di daerah tertinggal adalah bagaimana mengintegrasikan kawasan pusat-pusat pertumbuhan dalam suatu wilayah (lokal) yang kemudian diintegrasikan dengan wilayah yang lebih maju (regional), atau bagaimana strategi pembangunan perdesaan diintegrasikan dengan strategi pengembangan kota, dengan mengembangkan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*) dan jejaring antarkota (*network cities*).

Penataan ruang di daerah tertinggal yang dituangkan kedalam produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diarahkan pada upaya pengembangan pusat permukiman, pusat kegiatan sosial, mengembangkan dan mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan, mengembangkan keterkaitan desa – kota dan jejaring antar kota di wilayah regional. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ini selanjutnya dijadikan acuan penyusunan rencana induk sektor, seperti listrik, telekomunikasi, transportasi, air bersih dan lainnya. Pengembangan infrastruktur ekonomi, yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat-pusat bisnis, pasar, dan jejaring internasional. Pengembangan infrastruktur sosial yang menghubungkan pusat kegiatan sosial seperti pendidikan dan kesehatan dan pusat permukiman.

Oleh sebab itu salah satu misi dari pengembangan daerah tertinggal adalah memutuskan keterisolasian daerah tertinggal melalui peningkatan sarana dan prasarana komunikasi, transportasi sehingga memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya. Dalam mengimplementasikan misi tersebut kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang terkait dengan pembangunan infrastruktur adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi untuk telekomunikasi, keperintisan untuk transportasi dan listrik masuk desa. Kebijakan pembangunan infrastruktur tersebut diimplementasikan ke dalam program pengembangan prasarana dan sarana dengan kegiatan pokoknya meliputi: (1) Pengembangan sarana dan prasarana sosial dasar, terutama, bidang pendidikan dan kesehatan; (2)



Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi; (3) menyerasikan sistem transportasi di daerah tertinggal ke dalam satu kesatuan sistem yang terpadu dengan wilayah maju; (4) memperluas jaringan informasi dan teknologi; dan (5) mengembangkan prasarana perdesaan khususnya prasarana pertanian dan transportasi penghubung dengan kawasan perkotaan. 🏠



6

Penutup

Buku kecil ini tidaklah mungkin memuat semua wawasan dan kiat untuk membangun daerah tertinggal hingga desa sebagai unit terkecil yang begitu luas dan beragam. Untaian cerita, wawasan dan kiat – kiat yang disajikan dalam buku ini diharapkan akan terus sambung-menyambung dengan berbagai ide, pengalaman dan wawasan para pembacanya sehingga akan bersintesis menjadi wawasan baru, kiat baru dan kearifan baru yang lebih lengkap dan lebih kaya untuk selanjutnya dapat disajikan kembali dalam berbagai buku yang berkesinambungan untuk generasi penerus.

Buku ini bagai oase yang menampung berbagai aspirasi dan buah pemikiran para “*pendaki*”. Sebuah open source yang terbuka bagi siapa saja dalam bingkai Indonesia yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Pembangunan daerah tertinggal bukanlah sebuah proses yang mudah dan ringan. Untuk itu tidak pernah ada formula yang sederhana dan jalan pintasnya. *Menguk Ketertinggalan, Meretas Jalan Baru*, sebagai judul yang dipilih untuk buku ini menggambarkan bahwa upaya membangun daerah tertinggal ibarat perjalanan pendakian yang panjang, berliku, beronak, penuh rintangan dan tantangan. Namun demikian, seorang “*pendaki*” akan lebih menikmati petualangannya, tidak tersesat jalannya serta sampai pada tujuannya dengan selamat apabila telah melengkapinya diri dengan peta, kiat-kiat pendakian serta memiliki inspirasi dan motivasi yang positif.

Akhir kata, semoga buku kecil ini dapat berguna bagi para “*pendaki*” untuk turut mendampingi, memberikan inspirasi serta motivasi dalam menempuh perjalanan panjangnya menuju puncak.

Selamat Mendaki, Selamat Mencapai Tujuan



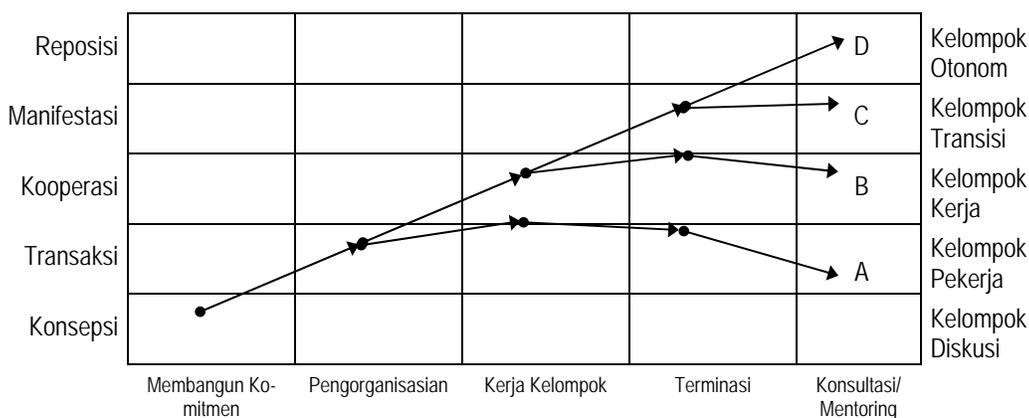
Lampiran 1.

Pembangunan Berbasis Masyarakat

1. Perbandingan Karakteristik Pembangunan

Karakteristik	Paradigma Pembangunan		
	<i>Growth Centered</i>	<i>Welfare Centered</i>	<i>People Centered</i>
Fokus	Industri	Pelayanan	Manusia
Nilai	Berpusat pada industri	Berorientasi pada manusia	Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro	Indikator sosial	Hubungan manusia dengan sumber
Peranan Pemerintah	Entrepreneur	Pemberi pelayanan	Pembina kemampuan/fasilitator
Sumber Utama	Modal	Kemampuan administrative	Kreativitas dan komitmen
Kendala	Konsentrasi dan marginalisasi	Keterbatasan anggaran dan inkompetensi aparat	Struktur dan prosedur yang tidak mendukung

2. Transformasi Komunitas





Jika tahapan intervensi dikaitkan dengan perkembangan komunitas maka dapat terlihat proyeksi hipotesis alamiah yang dijalani oleh kelompok. Dalam perkembangannya kelompok mengalami transformasi dengan jalur (*track*) yang beragam satu sama lain. Secara umum perkembangan kelompok (Hendrick; 1999) adalah sebagai berikut: konsepsi, transaksi, kooperasi, manifestasi, dan reposisi.

Konsepsi. Pada tahap ini komunitas dan intervenor masuk dalam suasana saling menjajaki. Bagaimanapun pada tahap ini komitmen yang terbangun pada dasarnya baru pada tingkat pemahaman atau konsepsi. Motif yang melatarbelakangi komitmen sangat beragam.

Transaksi. Kondisi ini terjadi umumnya pada saat intervensi mulai memasuki tahap pengorganisasian. Kelompok bersama fasilitator mulai merumuskan visi, misi dan rencana bersama. Anggota kelompok mulai memperkirakan manfaat apa yang akan mereka peroleh jika mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama tersebut. Sebaliknya fasilitator selalu berupaya menekankan bahwa visi jauh lebih penting daripada kebutuhan jangka pendek. Berbagai persoalan akan dapat diatasi oleh mereka sendiri, untuk itu konflik harus diatasi secara konstruktif. Kendati demikian, kondisi yang terbangun relatif masih diwarnai kepentingan-kepentingan langsung masing-masing individu. Keeratan dalam kelompok masih dapat dikatakan semu dan lebih didorong oleh bayangan individu terhadap manfaat yang dapat mereka peroleh jika ikut bergabung (modal, upah, dan sebagainya).

Kooperasi. Ketika berbagai rencana mulai dilaksanakan, kelompok mulai masuk pada tahap kooperasi. Konflik-konflik yang semula terpendam biasanya menjadi nyata. Individu-individu yang berkepentingan terhadap manfaat jangka pendek mulai berhadapan dengan mereka yang lebih terdorong oleh visi bersama maupun nilai-nilai yang telah disepakati di awal. Berbagai aturan main diuji. Perbaikan dan komitmen-komitmen baru bermunculan. Namun demikian, jika kelompok berhasil mengatasi berbagai krisis pada tahap ini, akan muncul kepercayaan diri dan keberanian untuk melihat perencanaan-perencanaan dengan rentang waktu yang lebih jauh, syarat nilai dan terkesan idealis merupakan sesuatu yang masuk akal.

Manifestasi. Pada tingkat perkembangan ini kelompok berhasil melampaui masa ujian kerja sama kelompok. Kepercayaan diri dan rasa memiliki mereka meningkat. Muncul keinginan yang kuat untuk memperkenalkan keberadaan kelompok, visi, misi dan dukungan yang lebih luas dari anggota masyarakat. Inilah kondisi yang tepat bagi fasilitator untuk melakukan terminasi dan bersiap-siap untuk beralih peran ke hubungan konsultasi/mentoring terhadap



kelompok. Kelompok mulai mencoba menjalani kegiatan dengan inisiatif internal yang lebih tinggi.

Reposisi. Pada tahapan ini kelompok atau komunitas mulai merekonstruksi kembali posisi dan peran yang ingin dijalankan dalam masyarakat. Peran konsultatif dari pendamping cukup penting dalam mempercepat komunitas menentukan posisi baru mereka. Biasanya pada tahap ini muncul kebutuhan untuk berafiliasi dengan kelompok sejenis dengan jaringan kerja yang lebih meluas. Juga kebutuhan untuk berhubungan dengan pelaku-pelaku lain. Peran mediasi, dan tak jarang advokasi dari para pendamping atau lembaga tertentu sangat dibutuhkan.



Lampiran 2.

Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik

1. Pelayanan Satu Atap¹

Contoh *'best practice'* dari pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan menerapkan prinsip-prinsip *'good governance'* terutama yang memanfaatkan prinsip kerjasama adalah dengan mulai maraknya penerapan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu satu atap oleh beberapa instansi baik di daerah maupun di tingkat pemerintahan pusat.

Secara umum Sistem Pelayanan Satu Atap kepada masyarakat didasarkan kepada :

Visi Pelayanan Masyarakat

Meningkatkan kualitas layanan secara konseptual berkesinambungan dan bertahap menuju tercapainya kepuasan masyarakat.

Misi Pelayanan

- Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas;
- Peningkatan sistem dan prosedur pelayanan dengan memperhatikan tuntutan perkembangan dinamika masyarakat serta Peningkatan Kemampuan terus-menerus dengan program jemput bola.

Fungsi Pelayanan

- Pengkoordinasian dibidang pelayanan umum;
- Pemberian layanan informasi dan pembayaran serta penerbitan perijinan sesuai dengan keperluan masyarakat;
- Pelaksanaan kegiatan pengolahan perijinan;
- Pengolahan ketata-usahaan kantor;
- Pelaksanaan fungsi dinas lain yang ditetapkan Bupati/Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan

Tujuan Pelayanan Satu Atap di Kabupaten/Kota yang mengacu kepada kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas layanan masyarakat;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perijinan;
- Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;

¹ Catatan: Berbagai istilah sering digunakan untuk pelayanan satu atap adalah Sistem Informasi Satu Atap – SIMTAP, *'one stop service'* or *'one roof system'*, or *'one door system'*



- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait;
- Meningkatkan kinerja organisasi yang efisien dan efektif.

Sasaran Pelayanan Satu Atap

Sasaran Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten / Kota yang bersangkutan dapat disesuaikan dengan tujuan masing-masing pelayanan seperti :

- Terwujudnya peningkatan layanan masyarakat yang optimal (prima);
- Meningkatkan hasil kerjasama dibidang pelayanan;
- Terwujudnya tingkat kesadaran masyarakat/aparat pemerintah itu sendiri;
- Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia;
- Terselenggaranya sistem/prosedur yang efisien dan memudahkan masyarakat;
- Berkurangnya segala bentuk pungutan diluar ketentuan;
- Dan lain lain

Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan meliputi semua kebutuhan masyarakat/swasta terhadap berbagai pelayanan umum.

Untuk pelayanan satu atap yang meliputi berbagai kepentingan umum seperti pengurusan KTP; Akte Kelahiran; Surat Izin Usaha; IMB; izin gangguan; izin reklame; sertifikat tanah; pembayaran PBB; layanan untuk perdagangan misalnya SIUP, TDUP, TDIK, TDP; jasa infrastruktur kota seperti pembayaran tagihan air minum, listrik, telepon; layanan pengelolaan sumber daya alam seperti pengurusan investasi pengelolaan bidang kehutanan dan lain-lain, dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu cara yang baik, efektif, efisien, cepat, tidak bertele-tele dan transparan. Belum semua pemda dapat menerapkannya mengingat kondisi daerah yang berbeda-beda. Demikian pula setiap unit pelayanan bisa berbeda dalam kombinasi jenis pelayanannya yang diberikan kepada masyarakat.

Dari hasil laporan berbagai bidang layanan satu atap pada beberapa pemda maupun pemerintah pusat dan BUMN/BUMD, ternyata tidak semua sistem tersebut dirasakan masyarakat yang berkepentingan memberi dampak yang baik, malah sebaliknya, berdampak negatif, seperti misalnya pelayanan satu atap tentang perizinan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing).

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendukung pelayanan masyarakat dengan cara terpadu tersebut adalah: (1) tempat harus memadai dalam memberikan pelayanan, (2) tersedianya sumber daya manusia yang kapabel dan responsif terhadap keluhan dan informasi masyarakat pengguna



jasa, (3) tersedianya perlengkapan kantor yang mendukung berjalannya proses pelayanan secara cepat dan efisien (antara lain telah terpasangnya 'Electronic Information Communication System', serta (4) harga jasa pelayanan yang terjangkau.

Syarat pengelolaan pelayanan terpadu satu atap :

- Tempat yang memadai;
- Sumber daya manusia yang kapabel;
- Perlengkapan kantor/ 'Electronic Information Communication System';
- Harga jasa pelayanan yang terjangkau;
- Partisipasi masyarakat;
- Proses transparan.

Pada dasarnya, dengan telah terpasangnya 'Electronic Information Communication System', *e-government* dapat memberi beberapa layanan dasar yang baik dan murah kepada masyarakat. Selain terbuka, dengan layanan satu atap dan dengan layanan *e-government*, pemohonnya tidak harus bertemu banyak petugas dan banyak meja yang menyita waktu dan peluang terjadinya korupsi (contoh pengurusan IMB yang biasanya dua minggu, bisa tuntas dalam waktu 7-10 hari, sudah termasuk pengecekan lokasi oleh tim).

Dari data yang ada pada website/media lainnya masing-masing pemerintah daerah, tercatat bahwa diantaranya yang telah menerapkan layanan satu atap antara lain Kabupaten Kebumen (Izin Lokasi 10 hari, IMB 15 hari, **SIUP (K, M, dan B) 2 hari dengan biaya berkisar antara Rp.10.000,- s/d Rp.200.000,-**, Izin Usaha Industri 7 hari, Tanda Daftar Gudang 3 hari, Izin Praktek Dokter Umum 5 hari, dan 33 jenis layanan lainnya), Kabupaten Bantul (KTP, Akte Kelahiran, Surat Izin Usaha, IMB, Tanda Daftar Usaha Pedagangan dan lain-lain); Surabaya (Tenaga Kerja Indonesia – TKI); Kabupaten Karimun (IMB, SIUJK, Izin Lokasi, Izin Gangguan/H.O, Izin Reklame, SIUP, Tanda Daftar Industri Kecil (TDI), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), fasilitas Kas untuk semua proses pembayaran); Kabupaten Takalar dan Kabupaten Tasikmalaya (SIMTAP untuk sektor semua pelayan umum), Kabupaten Sragen; Hal-hal yang menyangkut keimigrasian telah dilakukan di berbagai tempat seperti Medan, Tanjung Uban (Riau), Semarang, Jakarta, Surabaya, Pare Pare, Entikong, Nunukan, Mataram dan Kupang.

Melalui **Simtap** ini pengawasan oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, dan pejabat yang bertanggung jawab tentang tingkat layanan



kepada masyarakat dapat langsung diketahui melalui layar monitor yang dipasang di ruang kerjanya.

Di bidang investasi Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang pelayanan perizinan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) melalui mekanisme pelayanan satu atap, banyak pemerintah daerah khawatir akan membuat hambatan baru bagi pengembangan ekonomi di daerah-daerah. Pasalnya, dengan pola tersebut, investasi akan terkonsentrasi di daerah-daerah yang menjadi primadona investor saja.

Berbagai hambatan sering muncul untuk dapat menerapkan sektor investasi ini dengan baik. Selain masalah birokrasi, hambatan lainnya adalah adanya persepsi bahwa masuknya investor bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengusaha sejak awal, sudah dibebani dengan berbagai kewajiban yang tidak jarang mengakibatkan biaya tinggi.

Signifikansi

Diperlukan lembaga pelayanan satu atap di tingkat daerah untuk mempermudah pengurusan izin bagi sejumlah kebutuhan pengurusan pelayanan umum maupun untuk keperluan investasi, sehingga panjangnya birokrasi bisa dipangkas dan tidak berbelit-belit/efektif/efisien.

Adanya persepsi yang kurang baik di mana masuknya investor dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pengusaha belum apa-apa, sudah dibebani berbagai kewajiban yang tidak jarang mengakibatkan biaya tinggi yang perlu dihindari.

Tarif dan biaya perizinan dengan cara pelayanan satu atap menjadi jelas, pembayaran sebaiknya melalui transfer rekening bank untuk menghindari korupsi. Alokasi dan distribusi modal di daerah-daerah, perlu dibenahi lewat perencanaan yang baik agar potensi daerah dapat terlihat secara merata dan tidak timpang. Pola perencanaan investasi yang bersifat *top-down* perlu dikaji dengan matang agar dapat dihindari adanya ketimpangan tersebut diatas dalam pelaksanaannya.

Di bidang investasi Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang pelayanan perizinan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) melalui mekanisme pelayanan satu atap, perlu dicermati agar pelaksanaannya betul-betul jernih supaya tidak ada kesan bahwa dengan pola tersebut, lokasi investasi di daerah tidak berdasar rencana investasi yang disepakati.



2. Penyusunan Peraturan Daerah

Substansi desentralisasi dalam bentuk otonomi itu, adalah pelibatan pihak lain dalam pembangunan yang bersifat partisipatif, dimana dalam era sekarang ini paradigma baru tersebut merupakan suatu hal penting dalam proses pengambilan kebijakan sektor. Otonomi Daerah semestinya memungkinkan semakin dekatnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memungkinkan partisipasi masyarakat lebih luas dalam pembangunan daerah.

Tiga pihak yang dilibatkan dalam pembangunan yang partisipatif tersebut terutama adalah sektor masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah. Tiga pihak itu harus terlibat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari setiap kebijakan yang ada, bila pembangunan daerah ingin berhasil baik.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta², persoalan yang dihadapi dunia usaha, yang selama ini menjadi hambatan masuknya investasi ke suatu daerah adalah buruknya infrastruktur, banyaknya peraturan daerah yang bermasalah, lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian peraturan. Hal itu menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah untuk dapat lebih menyederhanakan berbagai peraturan daerah yang memihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Masalah utama dalam pembaruan tata pemerintahan di daerah, yaitu belum memadainya produk perundangan daerah yang dapat mendukung proses mengalirnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembaruan. Untuk memecahkan masalah ini, perlu dilakukan pembaruan mekanisme pembuatan kebijakan daerah. Pendekatan strategis yang dapat dilakukan adalah membentuk peraturan daerah yang mengatur mekanisme pembuatan kebijakan daerah yang partisipatif.

Pemerintah Kabupaten/Kota selama ini sudah mencoba melaksanakan pembangunan parsipatif itu, dalam bentuk musyawarah dengan warga kota/kabupaten (muskotbang-muskabbang) di mana dalam proses pengambilan keputusan di tingkat itu selalu dimulai dengan menjaring aspirasi sektor lewat muskelbang (musyawarah di tingkat kelurahan) muscambang (di tingkat kecamatan).

Dari segi masyarakat sendiri tentu mereka harus siap, sehingga ketika diajak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pendapatnya dapat diperhitungkan jangan bersikap pasif.

² Dimuat dalam Surakarta *Cyber News*, Maret 2006,



Upaya pembaruan mekanisme partisipatif harus dilakukan karena walaupun selama ini DPRD sudah sering mengadakan 'public hearing' dan sosialisasi, tetapi umumnya ketika proses sudah berjalan atau bahkan sudah selesai, masyarakat yang akan berpartisipasi tetap kesulitan.

Winarta dari Yogyakarta *Transparency*, dalam makalahnya pada workshop "Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif", Yogyakarta, Januari, 2005, menyatakan bahwa pembaruan itu harus meliputi upaya untuk mensistematisasi secara terpadu mekanisme pembuatan kebijakan daerah dalam satu ketentuan, dan semua proses pembuatan kebijakan daerah mengacu pada satu sumber termasuk DPRD dan eksekutif agar tercipta ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan daerah, sebagaimana yang diharapkan.

Dalam pelaksanaannya proses Keterlibatan masyarakat khususnya dalam pembuatan rencana anggaran pembangunan, baik di daerah, masih sulit diterapkan, meskipun hal ini sangat penting untuk dilakukan, terutama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan memonitor akuntabilitas dari pemerintah.

Candra Fajri Ananda (2005) mengatakan bahwa kesulitan pelaksanaan keterlibatan masyarakat terutama disebabkan rumitnya perumusan model yang tepat serta keheterogenan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh dikemukakannya bahwa pemda Pacitan, Probolinggo, Malang, serta Banyuwangi, yang telah memiliki peraturan daerah tentang *participatory planning* dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam implementasinya tetap saja masih rumit.

Bustanul Arifin, pengamat ekonomi dari *Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, mengatakan bahwa hal terpenting untuk mewujudkan 'participatory planning' adalah adanya modal 'social bridging', untuk membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, apabila ingin memperoleh kesejahteraan ekonomi dan keteraturan sektor yang cukup tinggi³.

³ Kompas 22 Januari 2003,



Peraturan daerah yang partisipatif :

Peraturan Daerah yang mempunyai mekanisme pembuatan kebijakan daerah untuk mensistematisasi secara terpadu mekanisme pembuatan kebijakan daerah dalam satu ketentuan, dan semua proses pembuatan kebijakan daerah mengacu pada satu sumber termasuk untuk kegiatan DPRD dan eksekutif (public hearing, musbang, dan lain-lain diakumulasikan dalam mekanisme tersebut).

Signifikansi

Kesulitan pelaksanaan keterlibatan masyarakat terutama disebabkan rumitnya perumusan model yang tepat serta keheterogenan masyarakat itu sendiri.

Untuk mewujudkan '*participatory planning*' perlu adanya modal '*social bridging*', untuk membangun kepercayaan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sebagai tindak lanjut bila telah ditetapkannya proses Perda tentang *participatory planning* dalam membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Membangun Mekanisme Pembuatan Kebijakan Daerah yang Partisipatif, harus meliputi upaya untuk mensistematisasi secara terpadu mekanisme pembuatan kebijakan daerah dalam satu ketentuan, dan semua proses pembuatan kebijakan daerah mengacu pada satu sumber termasuk DPRD dan eksekutif agar tercipta ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan daerah, sebagaimana yang diharapkan.

3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan melalui Website di Kabupaten Sidoarjo⁴

Salah satu contoh penerapan kebijakan pemerintah berbasis transparansi adalah: Upaya Penyebarluasan Informasi Pelayanan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur melalui *website* yang dikelola oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal/DPPM (<http://www.perijinan.sidoarjo.go.id>). Situs tersebut terutama diperuntukan bagi penyediaan mekanisme pengaduan secara luas dan sosialisasi program. Diinformasikan bahwa pengaduan dari publik dapat disampaikan melalui situs tersebut atau melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) pada Dinas Informasi dan Komunikasi. Brosur-brosur dalam

⁴ Sumber: <http://www.perijinan.sidoarjo.go.id>



dua bahasa (Indonesia dan Inggris) juga diterbitkan secara rutin untuk menjangkau Penanaman Modal Asing (PMA), dimana investor sesuai keperluannya bisa langsung datang ke kantor atau melalui internet, yang akan direspon oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal/DPPM sesuai mekanisme yang telah disiapkan. Poster-poster yang disebar luaskan dan ditempel di beberapa tempat, TV klik di ruang pelayanan mengenai berbagai informasi investasi, mempermudah masyarakat untuk akses pada informasi yang dibutuhkan. Tanpa harus bertanya sekalipun, dengan adanya sarana tersebut, pelanggan dapat mengetahui informasi apa yang mereka butuhkan.

4. Penerapan kebijakan pemerintah berbasis transparansi melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo⁵

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo, pada pasal 3, memuat informasi yang wajib diumumkan secara aktif, dan pada pasal 5, memuat informasi yang wajib tersedia setiap saat.

5. Penerapan Pengembangan Transparansi melalui kontrak pelayanan masyarakat/*citizen's charter*⁶

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK-UGM) melembagakan semacam kontrak pelayanan sebagai modifikasi dari *citizen's charter* yang banyak dilakukan di negara berkembang. Dengan didukung dana dari *Ford Foundation* PSKK-UGM kontrak pelayanan antara instansi pemerintah daerah dengan masyarakat yang dilayaninya. Uji coba dilakukan di beberapa tempat yaitu (1) Di Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, (2) Di Puskesmas Kecamatan Bendo Kota Blitar, dan (3) Di Kantor Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dalam kontrak pelayanan ini, hak dan kewajiban dari penyelenggara dan pengguna layanan diatur dengan jelas berdasarkan kesepakatan diantara mereka yang meliputi antara lain prosedur pelayanan, waktu pelayanan dan biaya pelayanan. Isi kesepakatan harus disebar luaskan, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Semua penyelenggaraan pelayanan harus berdasarkan *charter* tersebut. Para pengguna layanan dengan *charter* ini dapat mengetahui hak dan

⁵ Dwiyanto, Agus (2006), Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03/2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo

⁶ Pusat Penelitian Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2003



kewajibannya, menuntut penyelenggara pelayanan bila hak pengguna layanan tidak dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam *charter*. Dengan demikian masyarakat bukan saja terinformasi dengan baik, tetapi juga dapat ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan yang tertib, termasuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan layanan publik. Melalui kontrak semacam ini, transparansi pelayanan publik dapat diwujudkan.

6. Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Sampah di Kota Mataram⁷

Masalah pelayanan sampah yang dihadapi masyarakat

Pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mataram tidak berjalan baik. Lalu lintas pengangkutan sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan ke Tempat Pembuangan Akhir tidak teratur dan tidak efisien. Banyak sampah menumpuk lebih dari satu hari. Lokasi TPA belum ada; sarana dan prasarana persampahan sangat minim, dukungan SDM kurang dan pendanaan terbatas. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan belum memadai.

Metode dan instrumen yang digunakan Pemerintah Kota Mataram

Pemerintah Kota Mataram terdorong untuk berupaya menemukan solusi pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. Langkah strategis pertama yang diambil adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Latihan; Penggunaan Teknologi, dan lain-lain). Langkah kedua adalah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menangani masalah sampah khususnya dari lingkungan ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Kegiatan Partisipasi

Kelurahan Pejeruk dipilih sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Pemda melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai penanggung-jawab, membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan yang bersama masyarakat akan melaksanakan pengelolaan sampah. Jumlah Rumah Tangga (RT) di daerah model, didata untuk selanjutnya setiap RT diberi kantung sampah. Pemda menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS), gerobak, dan truk pengangkut. Setiap RT memasukan sampah dalam kantung, yang dikumpulkan seminggu sekali dengan menggunakan gerobak ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). Dinas Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya mengangkut sampah dari Tempat

⁷ Sumber: www.goodgovernance.or.id



Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Penampungan Akhir (TPA) di Kabupaten Lombok Barat yang diperoleh dengan cara kerjasama antara Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat. Teknologi *sanitary landfill* digunakan di Tempat Penampungan Akhir (TPA). Remaja dan Karang Taruna yang mengisi Masyarakat Peduli Lingkungan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat. Kepedulian masyarakat mengenai perlunya kebersihan dan keindahan terus meningkat.

Dengan cara memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan kampanye yang intensif, lokasi percontohan meluas ke kelurahan Selagalas, dan seterusnya ke daerah-daerah lain dalam kota Mataram. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, retribusi meningkat, sarana/prasarana angkutan sampah dapat terbeli secara bertahap. Dukungan Dinas dan Pemkot, penyediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, staf yang bertanggung-jawab, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, menjadi jaminan keberlanjutan pengelolaan sampah yang baik. Citra kualitas pelayanan pengelolaan sampah di kota Mataram meningkat.

7. Sekolah dan pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Jember

Masalah

- Tidak dapat melanjutkan ke SLTP karena kekurangan biaya;
- Kondisi bangunan SD (termasuk swasta) lebih dari setengahnya rusak parah;
- Kesejahteraan para guru tidak memadai.

Tindak lanjut

Pemerintah daerah melakukan regrouping sekolah agar sesuai dengan standar jumlah siswa untuk setiap kelas. Dengan cara ini terdapat penghematan sebesar Rp.3,3 milyar per tahun. Anggaran tersebutlah yang digunakan untuk dimanfaatkan sebagai subsidi SPP. Untuk rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dilibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, sedangkan pemerintah daerah hanya menyediakan dananya dalam bentuk block grant. Hasil yang diperoleh adalah berupa penghematan sebesar 15 – 30 % karena dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di samping secara langsung masyarakatpun menyumbang berbagai material, tenaga, dan anggaran. Dengan demikian, sejak tahun 2001 – 2004 pemerintah kabupaten Jember telah melaksanakan perbaikan hampir semua gedung SD yang rusak dengan total anggaran Rp.8,9 milyar.



Sedangkan untuk membebaskan SPP 44.000 siswa (sekitar 19 % dari total populasi penduduk Jembrana) SD hingga SLTA negeri, pemerintah kabupaten Jembrana mengalokasikan anggaran sebesar Rp.3,7 milyar per tahun (kurang lebih Rp.14,7 milyar selama 4 tahun). Selain untuk siswa negeri, hal yang samapun diberikan kepada siswa yang berasal dari sekolah non negeri, di mana sejak tahun 2003 telah mensubsidi sekitar 3.800 siswa dengan total anggaran sebesar Rp.437 juta.

Hasil akhir dari program yang diluncurkan oleh pemerintah daerah Jembrana adalah :

1. Dampak program pembebasan SPP :
 - Dapat melanjutkan pendidikan (3 %)
 - Mengurangi biaya sekolah (23 %)
 - Terdapat pemerataan kesempatan bersekolah (71 %)
 - Tidak mempunyai dampak apapun (3 %)
2. Kualitas pendidikan dengan adanya pembebasan SPP :
 - Tidak ada perbedaan (7 %)
 - Meningkatkan (53 %)
 - Semakin meningkat (40 %)

Catatan : Hal yang sama juga dilaksanakan di Kabupaten Rembang dan Belitung Timur. Untuk Kabupaten Rembang, sekolah (setelah dilakukan regrouping) tanpa dikenakan biaya diberlakukan mulai dari SD – SLTP dengan mengacu pada perbaikan standar pelayanan pendidikan (standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, standar infrastruktur, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan) yang kesemuanya berdasar pada mekanisme yang diatur melalui peraturan Bupati. Beberapa komponen yang dibebaskan adalah uang pangkal, BP3, biaya ulangan, buku paket dan LKS, ekstra kurikuler, pelajaran tambahan, sumbangan insidental.

Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2006, mengalokasikan anggaran melalui APBD sebesar Rp.1,115 milyar untuk membiayai 10 SLTA dengan jumlah siswa sebanyak 2.236. Khusus program S1 setiap mahasiswa mendapat bantuan biaya sebesar Rp.1 juta per bulan, dan untuk siswa SD melalui anggaran bantuan operasional sekolah pemerintah pusat.

Masalah pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jembrana

- Masyarakat tidak puas dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada;
- Sarana dan obat-obatan yang tersedia relatif tidak memadai;
- Hanya 15 – 20 % dari populasi penduduk Jembrana yang berobat.



Rencana Tindak

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan bagi seluruh penduduk Jembrana, pemerintah daerah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) pada tahun 2003, dengan menganggarkan untuk membayar premi asuransi sebesar Rp.3 milyar, dan pada tahun 2004 sebesar Rp.4,5 milyar. Dengan diluncurkannya program tersebut tingkat pelayanan kesehatan untuk seluruh warga Jembrana semakin baik. Hasil survei memperlihatkan sebagai berikut :

1. Dampak program Jaminan Kesehatan Jembrana
 - Tidak memberikan jawaban (3 %)
 - Peningkatan kesadaran (7 %)
 - Dapat berobat jika menderita sakit (10 %)
 - Terjadi pemerataan pelayanan kesehatan (33 %)
 - Mengurangi beban biaya berobat (47 %)

2. Perbedaan mendasar setelah adanya program JKJ
 - Tidak memberikan jawaban (3 %)
 - Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan (20 %)
 - Kesehatan semakin terjangkau (37 %)
 - Antusiasme masyarakat untuk berobat semakin tinggi (40%)

Catatan : Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan seluruh penduduk kabupaten Rembang, pemerintah setempat meluncurkan program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) bagi sekitar 300.000 penduduk di luar program askeskin dan askes PNS. Seluruh pelayanan kesehatan dilaksanakan di Puskesmas (rawat jalan dan rawat inap kelas II) dan RSUD (rawat jalan dan rawat inap kelas III) dan jaringannya secara percuma dengan membawa bukti diri berupa KTP Rembang atau KK bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun. Bahkan dalam keadaan darurat masyarakat dapat langsung ke RSUD melalui unit gawat darurat dengan menunjukkan bukti diri atau KTP Rembang pengantar pasien.

Kabupaten Belitung Timur bekerjasama dengan PT. Askes Persero meluncurkan program pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui askesplatinum (8 peserta) dan askesperdana (50.000 peserta) dengan total premi sebesar Rp.254 juta per bulan. Pelayanan yang diberikan meliputi rawat jalan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap, persalinan, pelayanan obat, pelayanan siplemen, dan penunjang diagnostik dan tindakan medis ringan sampai dengan berat. Seluruh pelayanan kesehatan di kedua kabupaten tidak dikenakan biaya apapun, karena telah dialokasikan melalui APBD masing-masing.



Lampiran 3.

Pengembangan Ekonomi Lokal

1. Model Replikasi Grameen Bank

Di Indonesia model Grameen Bank banyak di adopsi oleh lembaga keuangan mikro baik dari segi skema kredit maupun pola pembinaan yang dilakukan kepada para nasabahnya. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun perusahaan perkebunan, dan batubara yang terdapat di pelosok pedesaan mengadopsi model tersebut di atas.

Prinsip Pinjaman

- Tidak ada jaminan;
- Pinjaman untuk kegiatan produktif;
- Peminjam diorganisasikan dalam kelompok terdiri dari lima anggota / peminjam dan memiliki seorang ketua;
- Anggota adalah wanita yang produktif;
- Anggota menjadi penjamin pinjaman anggota lainnya dalam satu kelompok;
- Jika peminjam meninggal, sisa pinjaman dihibahkan;
- Jumlah pinjaman kecil;
- Lama pinjaman 52 minggu, dan diangsur setiap minggu dalam pertemuan mingguan kelompok;
- Pengawasan kredit dilakukan dalam pertemuan mingguan oleh petugas pendamping;
- Dikenakan denda sebesar 2% dari nilai tunggakan apabila angsuran mingguan tidak di bayar;
- Dikenakan biaya administrasi setiap kali meminjam sebesar 2.5 %;
- Pencairan menggunakan prinsip 2:2:1. Dua anggota dicairkan, minggu berikutnya dua anggota sisanya, dan pencairan pinjaman terakhir adalah ketua kelompok;
- Transparansi.

Target market model Grameen Bank, adalah :

- Wilayah pedesaan / kecamatan;
- Keluarga berpenghasilan rendah;
- Keluarga dengan usaha mikro dan kecil;
- Memenuhi persyaratan uji kelayakan.



2. Program Kredit Dakabalarea

Program ini diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (merupakan provinsi yang memiliki komitmen yang berkelanjutan dalam pengembangan lembaga keuangan mikro, baik dari segi jumlah, tujuan, maupun peruntukannya) dalam upaya memberdayakan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya diharapkan terjadi peningkatan dan pengembangan usaha mikro, koperasi serta lembaga ekonomi rakyat lainnya. Program yang diluncurkan bernama Dakabalarea (merupakan program kredit unggulan dengan pola bagi hasil dan pendampingan kelompok) yang merupakan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menentukan prioritas program pembangunan dengan tidak menghilangkan karakteristik wilayah, maupun kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Dakabalarea merupakan akronim yang dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- **(DA)** *Dahareun Loba* – Makanan pokok / sembilan bahan pokok berlimpah, difokuskan pada pengembangan pertanian dan irigasi terpadu dan peningkatan pemeliharaan jalan sebagai jalur distribusi;
- **(KA)** *Kabeuli ku ra'yat* – Terbeli oleh rakyat, difokuskan pada peningkatan daya beli masyarakat dengan pengembangan industri rumah tangga kecil/menengah, pertambangan, pengembangan pariwisata dan pembinaan usaha kecil dan koperasi;
- **(BA)** *Barudak bisa sakola* – anak anak dapat bersekolah, difokuskan pada pembinaan sekolah formal/non formal, kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, pembinaan pengobatan tradisional, perumahan dan penyehatan lingkungan;
- **(LA)** *Layanan Umum ningkat*- pelayanan umum meningkat, difokuskan pada lembaga pemerintah sebagai pelayan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparat, penyediaan dan pengelolaan sumber air, pengendalian pencemaran lingkungan, dan rehabilitasi lahan kritis;
- **(RE)** *Reformasi akan berjalan lancar*, difokuskan pada penataan hukum, penataan politik;
- **(A)** *Anu miskin ngurangan, anu iman jeung anu taqwa nambahan*, difokuskan pada upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan usaha produktif dan meningkatkan keimanan dengan moral masyarakat.

Kredit program ini menggunakan prinsip syariah-bagi hasil sesuai kesepakatan dengan Bank Jabar sebagai pengelola program. Sasaran penerima kredit adalah kelompok usaha yang dibina oleh lembaga ekonomi rakyat meliputi sektor usaha, industri kecil, perdagangan, agrobisnis, jenis



kredit, modal kerja dan investasi. Jaminan berupa kelayakan usaha dan tanggung jawab kelompok dengan membuka tabungan atas nama kelompok dengan saldo minimal 10 % dari plafon dan tidak boleh diambil sebelum pinjaman dilunasi.

3. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K)

Tujuan proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) adalah meningkatkan dan mengembangkan sistem pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dalam memberdayakan para petani dan nelayan kecil khususnya, dan penduduk perdesaan lainnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan skema sebagai berikut :

- Kredit diberikan secara berkelompok dengan tujuan mampu bekerjasama dengan dan antar kelompok dan mitra lainnya, dengan dasar kesetaraan dan kepemimpinan mereka sendiri;
- Didorong dan dimotivasi untuk berusaha atas kemauan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan dari luar;
- Mendorong timbulnya kebutuhan dari mereka sendiri dan menentukan sendiri apa yang akan mereka kembangkan;
- Bank pelaksana adalah Bank Rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh Jawa Barat;
- Besarnya kredit disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kemampuan membayar kembali;
- Mengingat kredit merupakan bagian proses pembelajaran, maka kredit dilakukan melalui beberapa tahapan;
- Jangka waktu pengembalian kredit maksimal 12 bulan dengan sistem pembayaran secara angsuran disesuaikan dengan siklus jenis usaha dari peminjam, bulanan, 3 bulanan, dan 6 bulanan;
- Bunga kredit 1 % per bulan termasuk insentif bagi petugas lapangan;
- Agunan kredit berupa obyek usaha bersama yang dibiayai dari kredit, juga tabungan beku dari anggota;
- Tujuan membantu permodalan usaha bersama dan diberikan secara kolektif yang mengandung azas tanggung renteng yang diterimakan oleh ketua yang ditunjuk oleh mereka sendiri;
- Usaha bersama yang dibiayai adalah sektor pertanian, agrobisnis, perdagangan dan jasa;



- Jenis usaha bersama yang dipilih harus berorientasi pasar, relatif cepat menghasilkan, dan setiap kelompok dapat memilih dua atau lebih macam usaha.

4. Baitul Maal Wat Tamwil – Al Amanah Sumedang

- Dari segi operasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) tidak jauh berbeda dengan koperasi, karena pemilik BMT adalah masyarakat yang menjadi anggotanya. Menghimpun simpanan anggota dan menyalurkan kembali kepada anggota melalui produk / pembiayaan kredit. Oleh karena itu BMT lebih sesuai berbadan hukum koperasi;
- Baitul Maal sebuah BMT adalah dengan menghimpun dana dari masyarakat berupa zakat, infaq, dan shadaqoh (zis), dan disalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya, atau dipinjamkan kepada anggota yang benar benar membutuhkan melalui produk pembiayaan dengan kebijakan bunga nol persen, dan pengembaliannya dengan cara angsuran;
- Baitul Tamwil, berupaya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan pokok, wajib, sukarela dan simpanan berjangka. Dana ini diputar dengan meminjamkan kepada anggota menggunakan pola syariah;
- Dalam menghimpun dana dilakukan sistem jemput bola, petugas langsung mendatangi anggota, baik anggota peminjam maupun penyimpan;
- Khusus dalam penghimpunan dana dalam bentuk simpanan diberi label yang menarik seperti *Simanis* (simpanan andalan umat Islam), *Siberkah* (simpanan berjangka barokah), dan bagi anggota yang memiliki cicilan kios, simpanannya diberikan nama khusus *Simpatik* (simpanan titipan iuran kios);
- Mendatangi majelis taklim, pondok pesantren dan sekolah sekolah umum;
- Setiap peminjam diwajibkan menyimpan dananya minimal 30 % dari total pinjaman yang berfungsi sebagai jaminan;
- Setiap jenis simpanan diberikan jasa bagi hasil setiap bulan, meskipun kebanyakan anggota penyimpan tidak mengharap jasa simpanan;
- Dengan sistem jemput bola para petugas BMT dalam menyalurkan dana sangat selektif yaitu diberikan untuk usaha yang perputaran awalnya bersifat harian, seperti misalnya pedagang.



5. Pengembangan ekonomi rakyat : Model Jembrana

Dalam menata kehidupan perekonomian rakyat di Kabupaten Jembrana, pemerintah daerah meluncurkan program penyediaan dana bergulir dan dana talangan, yang dapat digunakan sebagai modal usaha dan untuk menjaga harga jual produk-produk pertanian seperti gabah dan cengkeh. Untuk mengoptimalkan program tersebut, pemerintah daerah melibatkan peran para tokoh masyarakat seperti *subiak*, *subiak abian*, dan *banjar* dalam menjamin pengembalian pinjaman tersebut tepat waktu. Peran para tokoh ini sangat menentukan karena dapat memberikan sanksi sosial kepada kelompok masyarakat dalam suatu Banjar yang tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat waktu, sehingga kelompok lainnya dalam Banjar tersebut tidak dapat memperoleh pinjaman, sampai pinjaman dari suatu kelompok dikembalikan.

Manfaat program ini berdasarkan hasil survei, menunjukkan bahwa 94 % masyarakat menyatakan sangat bermanfaat, dalam bentuk peningkatan kesejahteraan (40 %) dan terlepas dari lilitan pengijon (40 %).

Catatan : Untuk kasus yang sama, kabupaten Rembang pun meluncurkan program pengembangan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pembentukan *holding company*, yaitu suatu BUMD yang mengelola aset-aset pemerintah daerah sebagai *pengungkit* pembangunan ekonomi Rembang. Jenis usaha (pertanian dan peternakan, kehuatanan dan perkebunan, pertambangan, pariwisata, perikanan, perdagangan dan industri, jasa, dan transportasi) yang akan dibangun adalah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, tujuan bisnis, dan prospek di masa depan.

6. Kisah Sukses 1

Ibu Isa, nasabah binaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) model **Grameen Bank** di daerah pesisir Bekasi Jawa Barat. Sejak didirikan hingga saat ini Ibu Isa tetap menjadi nasabah, yang berarti hampir 6 tahun lamanya. Pada awalnya (tahun 1999) Ibu Isa mengajukan pinjaman sebesar Rp. 150 ribu. Modal tersebut digunakan untuk tambahan modal berdagang buah-buahan. Usahanya berjalan cukup lancar dan baik, sehingga dapat menyelesaikan pinjamannya dalam waktu 6 bulan. Kemudian





mengajukan pinjaman kedua sebesar Rp.350 ribu, dan dilanjutkan dengan pinjaman ketiga sebesar Rp.750 ribu untuk menambah volume usahanya. Baik pinjaman pertama, kedua dan ketiga diselesaikan masing-masing dalam waktu 6 bulan. Selama berdagang buah, Ibu Isa bertekad untuk mengembangkan usahanya kepada usaha lainnya yang lebih cepat perputarannya dan tingkat resikonya lebih kecil.

Untuk, pinjaman ke empat diajukan sebesar Rp.1 juta, yang digunakan untuk membuka warung sembako. Kemudian ia mengajukan pinjaman kelima, keenam, ketujuh dan ke delapan masing-masing sebesar Rp.3 juta, Rp.5 juta, dan Rp.8 juta. Tahapan pinjaman yang diajukan diikuti dengan baik dan dapat melunasi tepat waktu. Sampai pada perkembangan berikutnya warung sembako berkembang menjadi toko atau grosir eceran yang cukup besar dan dapat menjadi rujukan belanja bagi warung-warung kecil lainnya.

Saat ini Ibu Isa telah mendapatkan pinjaman ke sembilan dengan nilai Rp.20 juta karena perkembangan usahanya berkembang pesat. Disamping mengelola toko dan grosir eceran yang besar juga menyediakan barang-barang / alat perlengkapan rumah tangga. Keberhasilannya hingga saat ini telah menunjukkan betapa pentingnya bantuan modal dalam pengembangan usahanya, dan LKM terbukti menjadi mitra usaha bagi Ibu Isa yang setia memberikan pelayanan kredit atas dasar saling percaya dan saling menguntungkan.

Kisah Sukses 2

Ibu Yuyun, adalah salah satu nasabah binaan LKM di Bungin Bekasi Jawa Barat, selama 5 tahun terakhir dengan kinerja usaha yang sangat baik. Fasilitas kredit yang diterima dari LKM sebesar Rp.150 ribu dan pinjaman kedua Rp.350 ribu. Kedua pinjaman digunakan untuk berdagang pakaian wanita, yang dijajakan dengan keliling kampung. Setelah melunasi pinjaman ia mengajukan pinjaman ketiga sebesar Rp.1,5 juta untuk mendiversifikasi usahanya dengan jenis usaha lain yaitu perabot rumah tangga. Kini ia menyediakan tempat usaha dirumahnya sendiri. Diversifikasi usaha yang dijalankan mendatangkan peluang yang lebih baik sehingga ia mengajukan





pinjaman keempat dengan nilai Rp 4 juta rupiah dan pinjaman kelima dengan nilai 5 juta rupiah, yang khusus digunakan untuk menambah volume usahanya dengan barang-barang elektronik.

Setelah melunasi pinjaman kelima, kemudian mengajukan pinjaman keenam dengan nilai Rp.10 juta. Usahanya berkembang cukup baik dengan jumlah pelanggan yang semakin bertambah. Selain itu jadwal pengembaliannya selalu tepat waktu yang menjadi panutan bagi nasabah lainnya. Ibu Yuyun, seperti halnya dengan nasabah lainnya sangat terbantu oleh pinjaman modal yang diberikan LKM. "Semoga LKM akan selalu hadir dalam kesulitan modal orang-orang kecil seperti saya," kata Ibu Yuyun.

1500000	4 Juli	11 Juli	11 Juli
ESK 500	1. 11 Juli	1. 18 Juli	1. 10 Juli
2. 1 Agustus	2. 25 Juli	2. 1 Agustus	2. 25 Juli
3. 1 Agustus	3. 1 Agustus	3. 1 Agustus	3. 1 Agustus
4. 8 Agustus	4. 8 Agustus	4. 8 Agustus	4. 8 Agustus
5. 15 Agustus	5. 15 Agustus	5. 15 Agustus	5. 15 Agustus
6. 22 Agustus	6. 22 Agustus	6. 22 Agustus	6. 22 Agustus
7. 28 Agustus	7. 28 Agustus	7. 28 Agustus	7. 28 Agustus
8. 5 September	8. 5 September	8. 5 September	8. 5 September
9. 12 September	9. 12 September	9. 12 September	9. 12 September

Kisah Sukses 3 : Kabupaten Gorontalo

Mengapa harus program Agro Potombulu ?



BANGUNAN PABRIK BIKOKULTUR DAN KANDANG SAPI DI DESA BIYONGA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Sebagai **antisipasi** dalam menghadapi Pasar Bebas Tahun 2010 melalui penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa;

Menciptakan masyarakat desa yang **berjiwa** wirausaha;

Menciptakan lapangan **pekerjaan** dan **pengentasan** keluarga miskin.



Untuk melaksanakan berbagai aktivitas usahanya yang berkaitan dengan sektor pertanian dalam arti luas, diperlukan komitmen yang masif antara aparat pemerintah, swasta, dan masyarakat secara berkesinambungan, dengan mengedepankan disiplin, pengetahuan, iman, dan amal. Jika tidak, dapat dilihat seperti tergambar di samping ini.

**PENYAKIT YANG MENGHANCURKAN
PT. AGRO POTOMBULU**

KUDIS = KURANG DISIPLIN

KURAP = KURANG PENGETAHUAN



KUMAN = KURANG IMAN

KUMAL = KURANG AMAL



Lampiran 4.

Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi

1. Penyediaan Infrastruktur Perdesaan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan infrastruktur perdesaan dengan menggunakan Pola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak – Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM – IP) sebagai dampak kenaikan bahan bakar minyak yang dilaksanakan pada tahun 2005 telah membuka peluang untuk mendukung kegiatan produksi, ekonomi, dan sosial yang merupakan faktor-faktor penting dalam pengembangan perdesaan. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp.250 juta per desa. Melalui musyawarah desa, ditentukan infrastruktur apa yang akan dibangun dengan memilih menu infrastruktur yang telah disediakan yaitu prasarana transportasi, prasarana air bersih, prasarana irigasi dan lainnya.

Pelaksanaan PKPS-BBM-IP tahun 2005 dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

- Swakelola, cara ini dilakukan di 11.389 desa (88,76 %) ;
- Kerjasama Operasional (KSO), cara ini dilakukan di 905 desa (7,05%) ;
- Kontraktual, cara ini dilakukan di 537 desa (4,19 %).

Dengan pola pelaksanaan sebagaimana dijelaskan di atas infrastruktur perdesaan yang terbangun melalui PKPS BBM – IP adalah :

- Prasarana transportasi (jalan/ jembatan, tambatan perahu, titan/ jembatan dan pengadaan perahu) di 10.756 desa (87,85 %) dengan nilai Rp.2.8 trilyun;
- Prasarana air bersih perdesaan (termasuk sanitasi) di 2.987 desa (7,65 %) dengan nilai Rp.246 milyar;
- Prasarana irigasi sederhana di 1.163 desa (2,99 %) dengan nilai Rp.96 milyar;
- Prasarana listrik dan penerangan di 110 desa (0,48 %) dengan nilai Rp.15 milyar;
- Lainnya (1,04 %) dengan nilai Rp.33 milyar.



Manfaat lainnya yang diperoleh dari Program PKPS-BBM-IP Tahun 2005, ini antara lain :

- Tingginya tingkat antusias masyarakat untuk memberikan usulan;
- Budaya kerja gotong royong (termasuk kaum perempuan) dihidupkan kembali, yang dirasakan selama ini sudah semakin berkurang;
- Masyarakat berlatih untuk bekerja bagaimana caranya mengelola proyek, membuat bronjong, dekker dan perkerasan jalan. Selain itu masyarakat mendapat upah sehingga pendapatan penduduk meningkat;
- Memberikan kontribusi dalam bentuk material dan rela tanahnya dibebaskan untuk pelebaran jalan serta rela dibayar dengan upah relatif tidak terlalu besar, asalkan ruas jalan yang ditingkatkan semakin panjang;
- Tingkat partisipasi yang tinggi memberi indikasi bahwa sense of responsibility dari masyarakat meningkat, dan ini memberi dampak kepada meningkatnya sense of belonging. Disamping itu, melalui tingkat partisipasi yang tinggi, masyarakat mengetahui sejauh mana kemajuan pekerjaan, permasalahan yang ada dan bagaimana cara menyelesaikannya;
- Membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan kemudahan pergerakan orang, barang dan jasa serta menghemat waktu tempuh.

Program penyediaan infrastruktur perdesaan dengan pola PKPS-BBM-IP ini pada tahun 2006 dilanjutkan melalui pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) melalui Program Rural Infrastructure Support Project (RISP – ADB)/ Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dengan lokasi di 4 (empat) provinsi, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, dengan total desa tertinggal sebanyak 1.840 desa. Alokasi dana yang disediakan untuk setiap desa sasaran sebesar Rp 250 juta.



2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Rembang

Permasalahan yang berkaitan dengan kualitas lingkungan di Kabupaten Rembang umumnya menyangkut kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang tersebar di beberapa desa. Secara umum terdapat 4 (empat) masalah pokok yang bersangkutan paut dengan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman, diantaranya luas lantai bangunan, bangunan tidak permanen/temporer, lantai bangunan masih berupa tanah, dan pola tata letak permukiman. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah daerah menggulirkan **Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman** yang bertujuan menyediakan kebutuhan dasar penduduk berupa penyediaan perumahan, penataan lingkungan perumahan dan permukiman, serta penataan sanitasi lingkungan. Penanganan perumahan dan permukiman dilakukan melalui kegiatan redefinisi (grentifikasi, rehabilitasi, renovasi, rekonstruksi, dan preservasi), dan restrukturisasi (renewal, redevelopment, dan restorasi), serta pengembalian fungsi.

Beberapa kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Rembang adalah :

- Peningkatan kualitas permukiman Kawasan Bahari Terpadu (desa Tasik Agung, desa Tanjungsari, dan desa Pacar) di Kecamatan Rembang, yaitu penataan lingkungan permukiman nelayan dari reklamasi liar menjadi permukiman yang tertata rapi menghadap ke pantai. Kegiatan ini merupakan sinergi penataan kawasan di bidang permukiman, perhubungan (penyediaan dermaga dan lapangan penumpukan), perikanan (penataan TPI dan PPI) serta pariwisata (pengembangan TRP Kartini);
- Peningkatan kualitas permukiman nelayan melalui luncuran Program Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) yang dilaksanakan di 6 kecamatan (35 desa, 19 desa diantaranya telah selesai penataannya) untuk perioda 2006 – 2009.

Kegiatan di atas tersebut dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, di mana seluruh pentahapannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Rembang.



Atas dasar pelaksanaan program di atas, Kabupaten Rembang mendapat penghargaan sebagai pemenang ketiga dalam Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah bidang Pekerjaan Umum (PKPD-PU) Tahun 2006 yang dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum, untuk Bidang Cipta Karya yaitu **Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**.

3. Pengembangan Infrastruktur Kelistrikan Perdesaan

Masyarakat Desa Cinta Mekar Kabupaten Subang Jawa Barat, telah berhasil memproduksi listrik murah dengan memanfaatkan potensi sungai Ciasem dan menjualnya kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Penyediaan energi listrik tersebut diperoleh dengan membuat saluran dari Sungai Ciasem selebar 1 meter yang panjangnya 400 meter. Air yang dialirkan sepanjang saluran tersebut kemudian dipecah menjadi dua bagian, satu untuk saluran irigasi pertanian dan sisanya ditampung di kolam yang selanjutnya “dijatuhkan” untuk memutar turbin microhydro.



Energi listrik yang dihasilkan mempunyai kapasitas sebesar 120 kilowatt dengan ongkos produksi sebesar Rp. 432,-/kWh, jauh lebih murah dibanding ongkos rata-rata produksi PLN sebesar Rp.1.000,-/kWh. Pembangkit listrik mini tenaga air (microhydro-power plant) ini jauh lebih murah karena tidak membutuhkan bahan bakar untuk menggerakkan turbin.



4. Pembangunan Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan



Desa Olimoo'o adalah salah satu desa di Kecamatan Batudaa Pantai yang jaraknya 23 km dari ibu kota Kecamatan dan 64 km dari ibu kota Kabupaten Gorontalo, terletak di wilayah pesisir dan tergolong desa tertinggal. Desa Olimoo'o (luas 1.800 m²) terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 721 jiwa atau 168 KK (penduduk miskin 34 KK atau 25,37 % dari jumlah penduduk).

Kondisi masyarakat yang sangat menjunjung tinggi filosofi Gorontalo "Huyula" tercermin dengan peran aktif aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, seluruh masyarakat, serta mendapat dukungan pemuda melalui kelembagaan yang ada seperti LPM, Karang Taruna, dan PKK dalam membangun desa Olimoo'o.

Permasalahan yang menimpa desa Olimoo'o adalah persoalan klasik yang terjadi di lingkungan perdesaan, yaitu berkaitan dengan penyediaan infrastruktur air bersih/air minum dan penyehatan lingkungan. Persoalan ini lebih dipicu karena selama ini masyarakat masih beranggapan bahwa sumber air adalah milik sosial yang akan ada selamanya meskipun tanpa pengelolaan dan pelestarian. Anggapan tersebut tidak seluruhnya benar, faktanya banyak daerah yang dahulunya kaya dengan sumber air lambat laun kesulitan air bahkan kekurangan air. Persoalan lain juga terjadi pada kebiasaan masyarakat yang membuang hajat di sembarang tempat karena fasilitas sanitasi yang tidak memadai bahkan dianggap belum perlu ada.



Hal inilah yang melatar belakangi pemerintah kabupaten Gorontalo membuat program kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) berbasis masyarakat Gorontalo, dengan menempatkan desa Olimoo'o sebagai desa percontohan untuk penerapan program tersebut.

Landasan hukum yang digunakan untuk meluncurkan program ini adalah, berdasar pada :



1. Peraturan Daerah Nomor 4/2002 tentang Penataan dan Kebersihan Lingkungan;
2. Peraturan Daerah Nomor 10/2002 tentang Retribusi Pengujian Kualitas Air;
3. Peraturan Bupati Nomor 580/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Gorontalo;
4. Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 242/2006 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Kabupaten Gorontalo tahun 2006.

Maksud, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan program ini adalah, sebagai upaya peningkatan cakupan infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), agar aksesnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa secara adil, merata, efektif, berkelanjutan serta terpeliharanya sarana dan prasarana terbangun melalui pengelolaan oleh Unit Pengelolaan Sarana AMPL berbasis masyarakat yang terbentuk di desa, serta secara umum adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat desa, namun secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat desa yang kurang mampu agar memperoleh akses AMPL yang sama, adil dan merata melalui metode subsidi silang.

Rencana aksi yang dilaksanakan adalah pemasangan kran umum sebanyak 17 unit (berkembang menjadi 23 unit), pembangunan instalasi saringan pasir lambat sebanyak 2 unit (berlokasi di 2 dusun), penambahan pipa jaringan sepanjang 684 m, pembuatan saluran setempat sebanyak 17 unit (berkembang menjadi 23 unit), serta pembangunan jamban semi permanen sebanyak 46 unit (menjadi jamban permanen sebanyak 71 unit). Biaya yang dianggarkan untuk melaksanakan program kegiatan tersebut sebesar Rp.67.500.000,- (merupakan dana stimulan dari APBD Kabupaten Gorontalo



dan partisipasi masyarakat sebesar Rp.29.250.000,- berupa material dan tenaga). Program ini dijalankan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2006. Dari realisasi pelaksanaan program tersebut, 421 penduduk (98 KK) terlayani sarana air minum, dan 387 penduduk (92 KK) telah menggunakan jamban permanen.



Lampiran 5.

International Donor Organizations

AUSAID c/o Embassy of Australia

Jl. HR Rasuna Said Kav. C15-16
Kuningan, Jakarta 12940
Tel. 021 2550 5580 / 0811 842 465; Fax. 021 522 7106

Development Section (CIDA)

Canadian Embassy, World Trade Center, 6th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12940
Fax. 021 2550 7813

Denmark Royal Danish Embassy

H. E. Mr Niels Erik Andersen
Menara Rajawali, 25th Floor
Jl. Mega Kuningan Lot No. 5.1, Jakarta 12950 Indonesia
Tel. 021 576 1478; Fax. 021 576 1535
Email: jktamb@um.dk; Website : www.emb-denmark.or.id
Sekretaris: Sanny 576 1478 ext. 106

European Union

Delegation of the European Commission in Indonesia
Wisma Dharmala Sakti, 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 32, Jakarta
Tel. +62-21-570.60.76 ext. 250; Fax. +62-21-570.60.75

Japanese Grant Assistance

For Grassroots / Human Security Project
The Embassy of Japan
Jl. M.H. Thamrin no. 24
Jakarta 10350
Tel. 021 3192 4308; Fax. 021 315 7152; HP. 0811180535

Japan International Cooperation Agency (JICA)

Indonesia Office : Plaza BII Tower II 27th Floor, Jl. M.H. Thamrin 51 Jakarta
Pusat 10350 Indonesia
Tel. 62-21-3907533 (ext. 431); Fax. 62-21-3907536
<http://www.jica.or.id>

Royal Netherlands Embassy

Jl. H.R. Rasuna Said Kav S-3
Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia
Tel. 021 525 1515; Fax. 021 5700734, 527 5975



USAID

US Embassy
Jl. Medan Merdeka Selatan 5, Jakarta
Fax. +62-21 380 6694

World Bank

World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Asian Development Bank

BRI II Building, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46, Jakarta Selatan

United Nations Development Programme (UNDP)

Mr. Hakan Bjorkman

Menara Thamrin Lt 8 Kav 3
Tel. +62-21-3141308; Fax. +62-21-39838941

Ford Foundation

Widjojo Center, 11th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 71
Jakarta 12190 PO Box. 2030
Tel. 252 4073; Fax. 252 4078
Email: s.siskel@fordfound.org

Asia Foundation

Jl. Dharmawangsa Raya 50
Kebayoran Baru Jakarta 12160, Indonesia
Tel. 7278 8424; Fax. 720 3123
Email: general@tafindo.org
Secretary: Rena

GTZ Office

Deutsche Bank Building 20th Floor
Imam Bonjol No. 80 Jakarta 10310

Department for International Development (DFID)

Manggala Wanabakti, Blok VII, lt. 6, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta 10270
Tel. 62-21-5704397; Fax. 62-21-5704401



Friederich Naumann Stiftung

Jl. Rajasa II No. 7 Jakarta 12110 Indonesia PO. Box. 3495 Jakarta 12043

Tel. 62-21-7256012/13; Fax. 62-21-7203868

Website : www.fnst.de

Save the Children Indonesia

Jl. Kemang Selatan Raya No. 111/H Jakarta Selatan 12730

PO. Box. 7963 JKSKM 12079, Indonesia

Tel. 62-21-7197681; Fax. 62-21-7197682

The British Council Indonesia

S Widjojo Center 1st Floor, Jl. Jend Sudirman 71 Jakarta 12190

Tel. 62-21-2524115 ext. 171; Fax. 62-21-2524129

Website : [www. Britcoun.or.id](http://www.Britcoun.or.id)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

Wisma Metropolitan II, 10-11th floor Kav. 31,

Jl. Jend Sudirman Jakarta 12920,

Indonesia PO. Box. 8318/JKSMP Jakarta 12083

Tel : 62-21-5705816 ext. 278

Organization for Economic Co-operation and Development



OECD Tokyo Centre - For Asia

3rd Floor, Nippon Press Center Building, 2-2-1 Uchisaiwaicho
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011
Tel. 81 3 5532 0021; Fax. 81 3 5532 0035
E-mail : tokyo.contact@oecd.org; Website : www.oecdtokyo.org

Australian Agency For International Development

Jl.Rasuna Said Kav. C15-16 Kuningan, Jakarta 12920, Indonesia
Tel. +62-21-2550 5573; Fax. +62-21-522 7106
E-mail : Nicole_Burns@ausaid.gov.au; Website : www.Ausaid.gov.au

New Zealand Agency for International Development

New Zealand Embassy, Gedung BRI II Lt 23, Jl. Jend Sudirman, Jakarta
Tel. +62-21 5709460 (x 209); Fax. +62-21-5709457
E-mail : sara.carley@mfat.govt.nz; Website : www.nzaid.govt.nz

ASEAN Secretariat

70 A, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta, Indonesia
PO Box 2072
Fax. +62-21-724-3504, 739-8234; Tel. +62-21-724-3372, 726-2991 ext. 315
E-mail: erik@asean.or.id

UNDP

One United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA
Tel. +1 (212) 906-5000; Fax. +1 (212) 906-5001
<http://www.undp.org/>

World Health Organization

CH – 1211 Geneva 2, Switzerland
Tel. 791.2111; Fax. 791.0746
E-mail: info@who.int; <http://www.who.int>

WHO/SEARO

WHO Regional Office for South-East Asia
World Health House; Indraprastha Estate; Mahatma Ghandi Marg
New Delhi 110 002, India
Tel. (91 11) 331 7804; 331 7823; Fax. (91 11) 331 8607; 332 7972
E-mail: PANDEYH@whosea.org; <http://w3.whosea.org/>

USAID

Ronald Reagan Building
1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C. 20523, USA
Tel. 202-712-4810; Fax. 202-216-3524



E-mail: webmaster@usaid.net; <http://www.usaid.gov/>

World Bank

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433, USA

Tel. (202) 473-1000; Fax. (202) 477-6391

E-mail : info@worldbank.org; <http://www.worldbank.org>

Asia Development Bank

6 ADB Avenue, Mandaluyong City

0401 Metro Manila, Philippines

Tel. +632-632-444; Fax +632-636-444

<http://www.adb.org/>

Ford Foundation

320 East 43rd Street

New York, NY 10017, USA

Tel. 1 212 573-5000; Fax. 1 212 351-3677

<http://www.fordfound.org>

Population Council

One Dag Hammarskjold Plaza

New York, NY 10017, USA

Tel. (212) 339-0500; Fax. (212) 755-6052

E-mail: pubinfo@popcouncil.org; <http://www.popcouncil.org>



International Organization in Indonesia

1. **Association of South East Asian Nations (ASEAN Secretariat)**
Jl. Sisingamangaraja No. 70 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel. (62-21) 724 3340, 726 2991, 724 3372
Fax. (62-21) 739 8234, 724 3384
2. **Asean-Inter Parliamentary Organization (AIPO)**
DPR-RI Building, 6th Floor, Lokawirasabha Section,
Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta 10270
Tel. (62-21) 571 5691, 571 5511; Fax. (62-21) 572 1319
3. **United Nations Information Center (UNIC)**
Gedung Executive Lt 14 , Jl. MH Thamrin Kav 9 Jakarta 10350
Tel. (62-21) 380 0292, 385 4550; Fax. (62-21) 3983 1014
E-mail : unic-jakarta@unic-jakarta.org
4. **United Nations Development Programme (UNDP)**
Menara Thamrin Lt 8 Kav 3
Tel. +62-21-3141308; Fax. +62-21-39838941
5. **United Nations Children's Fund (UNICEF)**
Wisma Metropolitan II, 10-11th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta 10012
Tel. (62-21) 570 5816; Fax. (62-21) 571 1326
Telex : UNICEF IA
6. **United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)**
Gedung Arya 14th Fl. Jl. Kebon Sirih Kav.75 Jakarta 10340
Tel: (62 21) 3912888 Fax: (62 21) 3912777
7. **United Nations Population Fund (UNFPA)**
Menara Thamrin 22nd Fl. Jl. MH Thamrin Kav 3 14 Jakarta 10250
Tel: (62 21) 3907121 Fax: (62 21) 31927902
8. **International Labour Organization (ILO)**
Menara Thamrin 22nd Fl. Jl. MH Thamrin Kav 3 14 Jakarta 10250
Tel: (62 21) 3913112 Fax: (62 21) 3100766



9. **United Nations Educational, Scientific Cultural Organization (UNESCO)**
UNESCO House Jl. Galuh (II) No.5 Kebayoran Baru Jakarta (62 21) Tel : 7399818 Fax: (62 21) 72796489
E-mail : jakarta@unesco.org
10. **World Health Organization (WHO)**
United Nation Building, Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10010
Tel. (62-21) 390 77227, 391 9340; Fax. (62-21) 323 827 (direct fax)
11. **United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)**
UNIDO Office Jakarta
United Nation Building, 5th Floor,
Jl. M.H. Thamrin No. 14, Jakarta 10010
Tel. (62-21) 314 1308 Ext. 602, 604; Fax. (62-21) 390 7126
12. **International Bank for Reconstruction and Development (IBRD - WORLD BANK)**
The World Bank Resident Staff in Indonesia
Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 12th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Tel. (62-21) 5299 3000 (30 lines); Fax. (62-21) 5299 3111 (5 lines)
13. **International Monetary Fund (IMF)**
C/O Bank Indonesia
Tipikal Building, 1st Floor, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010
Tel. (62-21) 231 1884, 351 8937; Fax. (62-21) 231 1939
14. **International Finance Corporation (IFC - THE WORLD BANK GROUP)**
International Finance Corporation
Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 13th Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190
Tel. (62-21) 5299 3001(8 lines); Fax. (62-21) 5299 3002 (2 lines)
15. **Economic and Social Commission for Asia and The Pacific (ESCAP CGPRT CENTER)**
Jl. Merdeka No. 145, Bogor 1611, Indonesia
Tel. (62-251) 343 277, 356 813; Fax. (62-251) 336 290



16. **Center for International Forestry Research (CIFOR)**
Jl. Cifor, Situ Gede, Bogor Barat 16680, Jawa Barat - Indonesia
P.O. Box 6596 JKPWB Jakarta 10065
Tel. (62-251) 622 622 (Hunting System); Fax. (62-251) 622 100
17. **Asian Development Bank (A D B)**
Gedung BRI II, 7th Floor, Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta Pusat
Tel. (62-21) 251 2721 (Hunting); Fax. (62-21) 251 2749
18. **International Committee of The Red Cross (ICRC)**
The Regional Delegation of the International Committee of the Red Cross (ICRC)
Jl. Iskandarsyah I. No. 14, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia
P.O. Box 4122, Jakarta 12041
Tel. (62-21) 720 7252, 739 6756; Fax : 720 0335
20. **EUROPEAN UNION**
Wisma Dharmala Sakti 16th Fl,
Jl. Jend Sudirman 32, Jakarta Selatan
Telp 570-6076, 570-6068, Fax 570-6075
21. **FAO - Food and Agriculture Organization**
Menara Thamrin Lt 7th, Jl MH Thamrin Kav 3 Jakarta 10350
Telp 319-24939, Fax 3922747
22. **IBRD-WORLD BANK - International Bank for Reconstruction and Development**
Lippo Life Bld. Fl. 3, Jl HR Rasuna Said B-10, Jakarta 12940
Telp 250-0316, Fax 252-2438
23. **ICRC - International Committee of the Red Cross**
Jl Iskandarsyah I/14 Kebayoran Baru, Jakarta 12041
Telp 720-7252, 739-6756, Fax 720-0335
24. **IFC - International Finance Cooperation**
Lippo Life Bld. 8th. Fl., Suite 805
Jl HR Rasuna Said B-10, Jakarta 12940
Telp 252-0316, 252-6089, Fax 252-3289



Lampiran 6.



Kebijakan Pemberian Dana Hibah

Yayasan Tifa mempunyai dua mekanisme pemberian dana hibah (grant-making) :

- Pertama* : melalui pendekatan proaktif dimana Yayasan Tifa akan berperan aktif dalam kerjasama dengan organisasi yang memiliki misi sejalan dengan Tifa, disebut *Pro-active Grants*.
- Kedua* : melalui penerimaan usulan program yang sesuai dengan arahan strategis dan program prioritas/pendukung Tifa, disebut *Open Grants*.

Dana Hibah diberikan kepada :

- Organisasi dengan usulan program kegiatan sejalan dengan visi dan misi Tifa;
- Organisasi yang memiliki “track record” yang tidak tercela baik sepanjang berhubungan dengan Tifa maupun dengan lembaga donor lainnya;
- Organisasi yang berbadan hukum;
- Organisasi yang bekerja sama dengan lembaga pemerintah;
- Universitas atau lembaga di bawah universitas.

Catatan : Bila pengaju berbentuk koalisi, jaringan, forum atau sejenisnya maka salah satu anggota yang berbadan hukumlah yang bertindak untuk dan atas nama kelompok tadi dalam administrasi hibah.

Dana Hibah tidak diberikan kepada

- Perseorangan (individu), termasuk usulan untuk beasiswa, perjalanan, konferensi dan lain-lain;
- Semua instansi aparat pemerintah (kecuali universitas), badan legislatif, yudikatif, partai politik, militer atau yang berafiliasi/terkait langsung dengannya;
- Semua organisasi yang bertujuan mencari laba;
- Usulan program yang produk atau hasil akhirnya dijual kepada umum (kecuali atas persetujuan Tifa);



- Organisasi yang sedang memiliki kerjasama dengan Tifa pada periode berjalan kecuali atas pertimbangan khusus.

Informasi Tambahan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pemberian dana hibah :

- Organisasi pengaju proposal untuk kategori *Open Grants* dapat melihat perkembangan status proposalnya melalui website Tifa dengan menggunakan nomor registrasi yang diinformasikan dalam surat pemberitahuan penerimaan proposal yang dikirimkan Yayasan Tifa;
- Organisasi yang mengajukan proposal lebih dari 1 (satu), maka organisasi tersebut harus menentukan proposal yang akan dipilih untuk diproses;
- Selama proses pengkajian, akan dilakukan komunikasi oleh Program Officer Tifa. Komunikasi dilakukan untuk meminta informasi tambahan, mengusulkan perubahan kegiatan termasuk juga usulan atas perubahan anggaran yang diusulkan. Komunikasi dapat dilakukan lewat telepon, facsimile, e-mail, dan sebagainya. Dengan komunikasi ini **tidak** berarti bahwa Tifa sudah memberi persetujuan atas usulan kegiatan;
- Persetujuan pemberian dana hibah diberikan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Hibah yang sudah ditandatangani oleh Direktur Eksekutif Yayasan Tifa. Dengan demikian Tifa **tidak** memiliki komitmen untuk mendanai usulan kegiatan sebelum Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Hibah ditanda-tangani;
- Yayasan Tifa **tidak** mendanai pengeluaran untuk kegiatan yang sudah dilakukan (*reimbursable cost*) sebelum tanggal Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Dana Hibah.

- Proposal dikirim ke :
Yayasan Tifa
Jl. Jaya Mandala No. 88, Menteng Dalam
Jakarta Selatan 12870
Fax. (62-21) 837 83648
e-mail : public@tifafoundation.org



LGSP (*Local Governance Support Program*) atau Program Dukungan bagi Tata Pemerintahan Daerah yang didanai oleh USAID adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang ditujukan bagi pemerintah daerah mitra untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam :

- merencanakan dan mengelola pelayanan umum dan keuangan daerah;
- transparansi dan akuntabilitas proses legislatif dan administrasi;
- menjawab prioritas masyarakat;
- memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan daerah;
- bekerjasama dengan penyedia jasa lokal (*service provider*) dalam penyediaan pelayanan.

LGSP mencerminkan komitmen *United States Agency for International Development's* (USAID) dalam mendukung usaha-usaha **desentralisasi** dan **demokratisasi** yang telah dilakukan Indonesia. Lembaga-lembaga pemerintahan di tingkat pusat, provinsi dan daerah telah berinisiatif untuk memperbaiki kualitas pelayanan umum, melaksanakan perencanaan yang partisipatif dan penyusunan anggaran kinerja, serta memperkenalkan pemilihan umum secara langsung. LGSP mendukung usaha-usaha tersebut dan usaha sejenis lainnya melalui pemberian pelatihan, contoh dan informasi yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia. LGSP juga akan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi keunggulan masing-masing daerah dan menggali lebih jauh sumber daya yang dimiliki untuk memperbaiki kualitas penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat.

Selama lebih dari empat tahun ke depan (Februari 2005 sampai September 2009) LGSP akan bekerja dengan lebih dari 100 pemerintah daerah terpilih di Indonesia di tujuh provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Bantuan khusus juga diberikan untuk Kalimantan Timur, Papua, dan Nanggroe Aceh Darussalam.



LGSP memberikan bantuan teknis, pelatihan, sarana, publikasi dan informasi kepada pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat di bidang : **perencanaan, penganggaran dan pelaporan terpadu**. LGSP berpijak pada visi tata pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan yang sehat dengan menggunakan perencanaan strategis dan partisipatif serta penganggaran berbasis kinerja untuk memfasilitasi masukan-masukan dari masyarakat ke dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya pemerintah daerah. LGSP akan membantu pemerintah daerah untuk :

- menerapkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pemerintah daerah secara terpadu;
- menyusun anggaran kinerja berdasarkan alokasi sumber daya yang realistis dengan hasil-hasil yang terukur untuk memenuhi prioritas masyarakat;
- memasukkan belanja tidak langsung ke dalam anggaran dinas;
- mendukung penerapan anggaran kinerja bagi BUMD, dan
- menyusun strategi dan taktik peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Legislatif dan proses politik, DPRD memainkan peranan penting dalam mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. LGSP bertujuan untuk melengkapi DPRD dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk :

- mengawasi proses perencanaan dan penganggaran;
- menyusun kebijakan dan merancang peraturan perundangan daerah;
- mewakili konstituennya;
- membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan media;
- melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif;
- memanfaatkan dewan dan komite advokasi daerah secara efektif dalam pengambilan keputusan;
- mengelola pemilihan daerah melalui komisi pemilihan daerah.

Penguatan administrasi daerah, pemerintah daerah ada untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakatnya. LGSP berusaha membantu pemerintah daerah memperbaiki manajemennya melalui :

- perampingan pelayanan masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan daya tanggap;
- menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan dunia usaha;



- mendorong koordinasi antar-pemerintah daerah dalam manajemen pelayanan umum, dan
- memperbaiki penyediaan pelayanan umum.

Masyarakat sipil dan media, kebijakan dan pelayanan pemerintah daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan masyarakatnya. LGSP akan membantu kelompok masyarakat dan media untuk :

- memberikan masukan bagi peningkatan pelayanan dan pemantauan kinerja;
- memantau dewan dan komite advokasi daerah;
- memperkuat kode etik media dan standar profesi jurnalistik;
- meningkatkan akses media dan memberikan pelatihan khusus bagi media untuk menginformasikan laporan.

USAID/Indonesia

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 3-5
Jakarta, Indonesia 10110
Tel: (011-62-21) 3435-9000



Tentang Kemitraan

Kemitraan adalah organisasi yang dibentuk oleh berbagai pihak dengan bertujuan untuk mendukung inisiatif-inisiatif bersama dalam pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Kantor eksekutif Kemitraan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya sebagai mitra kerja di dalam memajukan agenda reformasi nasional. Kemitraan setara ini mempersatukan Pemerintah Indonesia (eksekutif), legislatif, yudikatif, dan masyarakat sipil melalui dukungan masyarakat internasional, guna menerapkan praktik tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia. Masyarakat internasional '*hanya*' menyediakan keahlian, pengalaman, dukungan teknis, dan keuangan, pada akhirnya *kepemimpinan dan tanggung jawab keberhasilannya tergantung pada masyarakat Indonesia*.

Organisasi

Kemitraan adalah sebuah badan hukum yang dibentuk sebagai sebuah Kemitraan sipil-hukum yang bersifat nirlaba. Struktur manajemennya mencerminkan status hukumnya dan secara teknis dioperasikan sebagai suatu proyek *United Nation Development Programme* (UNDP) yang disebut *National Execution*. Lembaga pelaksana 'proyek' ini adalah Direktorat Aparat Negara yang berada di dalam lingkup Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Lembaga pelaksana ini bekerja bersama Kemitraan pada berbagai tingkatan, baik untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan manajemen proyek maupun agar aktif berinteraksi dengan *Policy Advisory Committee* atau komite penasehat kebijakan organisasi sebagai wakil dari manajemen Kemitraan, anggota dewan, dan lembaga donor. Lembaga pelaksana juga terlibat dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek Kemitraan.



Kemitraan ini dipimpin oleh *Governing Board* yang mayoritas anggotanya berbangsa Indonesia yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan sektor swasta. Selain itu, di dalamnya juga terdapat perwakilan dari tiga lembaga multilateral, diantaranya UNDP, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB), serta para donor bilateral. *Governing Board* juga terdiri dari semua anggota (*Partners*) dari orang Indonesia, yang bertugas memberi pengarah terhadap pelaksanaan program kerja dan mobilisasi sumber daya.

Program Kerja

Kemitraan memfokuskan prioritas program pembaruannya pada enam sektor, yang pada dasarnya berkaitan satu sama lain. Keenam sektor ini adalah, Pembaruan Hukum dan Peradilan (*Legal and Yudicial Reform*), Pembaruan Perwakilan (*Representation Reform*), Pembaruan Keamanan dan Kepolisian (*Security and Police Reform*), Pembaruan Pelayanan Publik (*Civil Service Reform*), dan dua program lain yang masing-masing terintegrasi ke dalam ke empat sektor sebelumnya; yaitu Desentralisasi dan Otonomi Daerah (*Decentralization and Regional Autonomy*), serta Anti Korupsi (*Anti Corruption*). Untuk melengkapi upaya organisasi dalam mendorong pembaruan tata pemerintahan melalui enam sektor prioritas ini, Kemitraan di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan *perspektif multipihak* (*multi-stakeholders-perspektive*) dengan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembaruan dan mendukung sektor korporasi dalam mempraktekkan tata pemerintahan yang lebih baik. Termasuk di dalamnya mengutamakan persoalan persamaan jender, serta mendorong keterwakilan yang pantas bagi perempuan dan kelompok yang termarjinalkan.

Sumber-Sumber Pendanaan

Sumber-sumber utama pendanaan organisasi berasal dari kontribusi pemerintah negara-negara lain serta lembaga-lembaga donor internasional (semua disebut sebagai 'donor') yang disalurkan melalui UNDP kepada Kemitraan.

Komitmen para donor tersebut tidak dapat diketahui hingga dana diterima dan dicatat oleh UNDP. Berdasarkan pada sifat-sifat ini, kegiatan-kegiatan Kemitraan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :



Dana Hibah

Dana hibah UNDP merupakan satu mekanisme yang dibangun guna menampung kontribusi dari satu atau lebih donor, termasuk korporasi swasta dan perorangan, di dalam mendukung suatu tema, proyek, negara, atau wilayah tertentu.

Dana yang terkumpul tersebut dimungkinkan digunakan untuk membiayai proposal proyek yang didukung oleh program pembaruan tata pemerintahan dan guna memenuhi pembiayaan operasional dari program pembaruan tersebut. Dari dana tersebut akan ditagihkan, sesuai dengan keputusan dan arahan Dewan Eksekutif UNDP, tiga persen untuk biaya administrasi dari pengelolaan dana dan untuk biaya layanan lain yang dibutuhkan. Berbagai bunga yang timbul dari dana tersebut akan ditambahkan ke dalam jumlah dana yang ada sesuai dengan aturan, kebijakan dan arahan yang berlaku di lingkungan UNDP.

Dana Fasilitas

Dana ini diperuntukan bagi Kemitraan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan terkait dengan upaya pembangunan metode pendekatan, dan pengembangan ide-ide kreatif dalam melaksanakan agenda pembaruan, melalui pelibatan langsung dari mitra kerja, dari pemerintah, masyarakat, dan sektor korporasi bersama dengan mitra internasional. Fasilitasi ini dipergunakan sebagai dukungan dan pendanaan atas biaya-biaya lokakarya, dialog, survey/riset, komunikasi dan analisis media, dan kegiatan lain yang relevan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Dana langsung

Dana ini berasal dari kontribusi lembaga donor yang termasuk di dalam *executing agency* (EA) atau lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (UN agency) sebagai *implementing agency*, dalam pembayaran secara langsung kepada pihak-pihak lain untuk barang maupun jasa terkait dengan kegiatan program atau proyek.

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Menara Eksekutif Lt 10

Jl. M.H. Thamrin Kav. 9 Jakarta 10350

Tel. (+62-21) 390 2566

Fax. (+62-21) 230 2933

www.kemitraan.or.id atau www.civilservicereform.org



Lampiran 7.



ALAMAT KEDUTAAN BESAR DI INDONESIA

AFGHANISTAN

Jalan Dr Kusumaatmaja SH 15, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 314-3169, Fax 335-390

ALGERIA

Jalan HR Rasuna Said Kav 10-1, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 525-4719, 525-4809, Fax 525-4654

ARGENTINA

Mulia Tower Building, Suite 1901
Jalan Jend Gatot Subroto Kav 9-11, Jakarta 12930
Telp 526-5661, Fax 526-5664

AUSTRALIA

Jalan HR Rasuna Said Kav 15-16, Kuningan, Jakarta 12940
Telp 522-7111, Fax 522-7101

AUSTRIA

Jalan Diponegoro 44, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 338-090, 338-101, 310-7451, Fax 390-4927

BANGLADESH

Jalan Denpasar Raya 3, Kav 10, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 525-1986, 522-1574, 314-1690, Fax 526-1807

BELGIUM

Wisma BCA, 15th Fl, Jl. Jend. Sudirman 22-23, Jakarta 12920
Telp 571-0510, 571-2322, 390-4036, Fax 570-0676

BRAZIL

Menara Mulia Suite 1602, Jl Gatot Subroto 9-11 Jakarta 12930
Telp 526-5656 to 526-5658, Fax 526-5659



BRUNEI DARUSSALAM

Wisma BCA Fl 8, Jl Jend Sudirman 22-23, Jakarta 12920
Telp 571-2180, 571-2181, 571-2198, 571-2124, Fax 571-2205

BULGARIA

Jalan Imam Bonjol 34-36, Menteng, Jakarta 10310
Telp 390-4048

CAMBODIA

Panin Bank Plaza Fl. 4, Jl Palmerah Utara 52, Jakarta 11480
Telp 548-3643, 547-3716, Fax 548-3684

CANADA

Wisma Metropolitan I, Fl 5, Jl Jend Sudirman 29, Jakarta 12920
Telp 525-0709, Fax 571-2251

CHILE

Bina Mulia Bld. I, 7th Fl.
Jalan HR Rasuna Said 10, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-1131, 520-1132, Fax 520-1955

CHINA

Jalan Jenderal Sudirman 69, Jakarta Selatan
Telp 724-4489, 724-4515, 724-3336, Fax 720-7782

COLOMBIA

Central Plaza Bld. 16th Fl. Jl Jend. Sudirman 47, Jakarta Selatan
Telp 525-6446, Fax 520-7717

CROATIA

Menara Mulia, Suite 2101, Jl Gatot Subroto 9-11 Jakarta 12930
Telp 525-7822, 525-7611, Fax 520-4073

CUBA

Villa Pejaten Mas G-4, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp 780-6673, 750-9823, Fax 780-6673

CZECHO

Jalan Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 390-4075 to 390-4077, Fax 336-282



DENMARK

Menara Rajawali, 25th Floor
Jalan Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp 576-1478 (Hunting), Fax 576-1535
email: dkemb9@cbn.net.id
Homepage: www.emb-denmark.or.id

EGYPT

Jalan Teuku Umar 68, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 314-3440, 331-141, 335-350, Fax 314-5073

FINLAND

Menara Rajawali, 9Th Floor
Jalan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telp 576-1650 (Hunting), Fax 576-1631, 576-1654 (Commercial Section) Tlx. 62128
FINAM IA
email: sanomat.jak@formin.fi
Homepage: www.finembjak.com/

FRANCE

Jalan MH Thamrin 20, Jakarta Pusat
Telp 314-2807, 310-0504, Fax 314-3338

GERMANY

Jalan MH Thamrin 1, Jakarta Pusat
Telp 390-1750, Fax 390-1757

GREAT BRITAIN

Jalan MH Thamrin 75, Jakarta Pusat
Telp 314-4229, Fax 390-7493,

HOLY SEE APSTOLIC NUNCIATURE

Jalan Medan Merdeka Timur 18, Jakarta Pusat
Telp 384-1142, 381-0736, 380-0736, Fax 384-1143

HUNGARY

Jalan HR Rasuna Said X/3, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-3459, 520-3460, Fax 530-3461

INDIA

Jalan HR Rasuna Said S-1, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-4150, 520-4152, Fax 520-4160



IRAN

Jalan HOS Cokroaminoto 110, Menteng, Jakarta 10310
Telp 331-378, 331-391, Fax 310-7860

IRAQ

Jalan Teuku Umar 38, Menteng, Jakarta 10350
Telp 390-4067 to 390-4069, Fax 390-4066

ITALY

Jalan Diponegoro 45, Menteng, Jakarta 10310
Telp 337-445 Fax 337-422

JAPAN

Jalan MH Thamrin 24, Jakarta Pusat
Telp 324-308, Fax 325-460

JORDAN

Jalan Denpasar Raya Block A-13
Kav. 01-02 Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-4400, 520-4401, Fax 520-2447

DEMOCRATIC REPUBLIC OF KOREA

Jalan HR Rasuna Said Kav. X-5, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 521-0181, 521-0182, Fax 521-0183

REPUBLIC OF KOREA

Jalan Jenderal Gatot Subroto 57, Jakarta Selatan
Telp 520-1915, Fax 525-4159

KUWAIT

Jalan Denpasar Raya Blok A-XII/1, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-2477 to 520-2480, Fax 522-4931, 520-4359

LAOS

Jalan Kintamani Raya C-15 no. 33, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-2673, 520-9602, Fax 522-9601

LEBANON

Jalan YBR V/82, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-7121, 525-3074, 525-4306, Fax 520-7121



LIBYA

Jalan Pekalongan 24, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 390-8467, 335-308, 335-754, Fax 335-726

MALAYSIA

Jalan HR Rasuna Said X/6, Kuningan, Jakarta 12940
Telp 522-4947 Fax 522-4974

MEXICO

Wisma Nusantara 4th Fl
Jalan MH Thamrin 59, Jakarta 10350
Telp 337-974, 337-453, Fax 331-500

MOROCCO

Kuningan Plaza Suite 512, South Tower
Jalan HR Rasuna Said C 11-14, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-0773, 520-0956, Fax 520-0586

MYANMAR

Jalan H Agus Salim 109, Menteng, Jakarta 10350
Telp 314-0440, 327-684, Fax 327-204

NETHERLAND

Rasuna Said S-3, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 525-1515, Fax 570-0734

NEW ZEALAND

Jalan Diponegoro 14, Menteng, Jakarta 10310
Telp 336-680, Fax 315-3686

NIGERIA

Jalan Taman Patra XIV no 11, Kuningan Timur, Jakarta Selatan
Telp 526-0922, 526-0923, Fax 526-0924

NORWAY

Menara Rajawali 25th Floor.
Jl. Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telp 576-1523, Fax 576-1537

PAKISTAN

Jalan Teuku Umar 50, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 314-4008, 314-4009, 314-4011, Fax 310-3945, 310-3947, 314-4075



PALESTINE

Jalan Diponegoro 59, Menteng, Jakarta 10310
Telp 314-5444, 310-8005, 323-521, Fax 310-8011

PAPUA NEW GUINEA

Panin Bank Centre 6th Fl. Jl Jend Sudirman 1, Jakarta 10270
Telp 725-1218 Fax 720-1012

PERU

Menara Rajawali, 12Th Floor.
Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950
Telp 576-1820 (Hunting), Fax 576-1825
email: embaperu@cbn.net.id

PHILIPPINES

Jalan Imam Bonjol 6-8, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 310-0334, 310-0302, Fax 315-1167

POLAND

Jalan Diponegoro 65, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 314-0509, Fax 327-343

ROMANIA

Jalan Teuku Cik Di Tiro 42 A, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 310-6240, 310-6241, Fax 390-7759

RUSSIA

Jalan HR Rasuna Said Kav X-7, Jakarta 12950
Telp 522-2912 to 522-2913, Fax 522-2916

SAUDI ARABIA

Jalan Haryono MT Kav 27, Jakarta Timur
Telp 801-1533, Fax 801-1527

SINGAPORE

Jl. HR Rasuna Said Blok X 4, Kav. 2, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-1489, Fax 520-1486

SLOVAKIA

Jalan Prof Moh Yamin SH 29, Menteng, Jakarta 10310
Telp 310-1068, 315-1429, Fax 310-1180



SOUTH AFRICA

Wisma GKBI 7th. Fl., Suite 705
Jalan Jendral Sudirman 28, Jakarta 10210
Telp 574-0660, Fax 574-0661

SPAIN

Jalan H Agus Salim 61, Menteng, Jakarta 10350
Telp 335-937, 335-771, 335-940, 314-2355, Fax 325-996

SRI LANKA

Jalan Diponegoro 70, Menteng, Jakarta 10310
Telp 314-1018, Fax 310-7962

SUDAN

Wisma Bank Dharmala 7th Fl.
Jalan Jend Sudirman Kav 28, Jakarta 12910
Telp 521-2075, Fax 521-2077

SWEDEN

Menara Rajawali 9Th Floor
Jalan Mega Kuningan Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telp 576-2690, Fax 576-2691
email: sweden@cbn.net.id
Homepage: www.swedemb-jakarta.com

SWITZERLAND

Jalan HR Rasuna Said Block X 3/2,
Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-7451, 552-5107, Fax 520-2289

SYRIAN ARAB REPUBLIC

Jalan Karang Asem I/8, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-4117, 520-1641, Fax 520-2511

THAILAND

Jalan Imam Bonjol 74, Menteng, Jakarta 10310
Telp 390-4055, 390-4225, Fax 310-7469

TUNISIA

Wisma Dharmala Sakti 11th Fl.
Jalan Jend Sudirman Kav 32, Jakarta 10220
Telp 570-3432, 570-3492, 570-4220, Fax 570-0016



TURKEY

Jalan HR Rasuna Said 1, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp 525-6250, Fax 522-6056

UNITED ARAB EMIRATES

Jalan Singaraja C-VI/16-17, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 520-6518, Fax 520-6526

UNITED STATES OF AMERICA

Jalan Medan Merdeka Selatan 5, Jakarta Pusat
Telp 344-2211, Fax 386-2259

VENEZUELA

Jalan Denpasar III-YBR IV/19, Kuningan, Jakarta 12950
Telp 522-3019, Fax 525-0195

VIETNAM

Jalan Teuku Umar 25, Menteng, Jakarta Pusat
Telp 310-0357, 310-0358, Fax 314-9615

YEMEN

Jalan Yusuf Adiwinata 29, Menteng, Jakarta 10350
Telp 390-4074, 310-8029, 310-8035, Fax 390-4946

YUGOSLAVIA

Jalan HOS Cokroaminoto 109, Menteng, Jakarta 10310
Telp 314-3560, 314-3720, Fax 314-3613

